

POLITIK BAHASA NASIONAL

1

98

**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JAKARTA 1976

**POLITIK BAHASA
NASIONAL**

1

PB
306 449 598
POL
P

POLITIK BAHASA NASIONAL

1

PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

editor

AMRAN HALIM

H A D I A H
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA 1976

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA

Klasifikasi	No. Induk : <u>103</u>
	Tgl. : <u>15/2/2008</u>
	Ttd. : _____

P U S T A K A A N
P U S A T B A H A S A
K E N T R A L K A B U P A T E R A J A B A N T A N T A R A N

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PRAKATA	7
II. PIDATO PENGANTAR OLEH KETUA PROYEK PENGEM- BANGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH	9
III. PIDATO PEMBUKAAN OLEH DIREKTUR JENDERAL KEBU- DAYAAN	11
IV. KERTAS KERJA	
1. <i>Fungsi Politik Bahasa Nasional</i> oleh Amran Halim	13
2. <i>Lembaga Bahasa Nasional dan Pengembangan Bahasa</i> oleh S. Effendi	27
3. <i>Politik Bahasa Nasional dan Pembinaan Bahasa Indonesia</i> oleh S. Takdir Alisjahbana	37
4. <i>Pengembangan Bahasa Nasional sebagai Unsur Kebudayaan</i> <i>Nasional</i> oleh Koentjaraningrat	55
5. <i>Politik Bahasa Nasional dan Pengajaran Bahasa</i> oleh Jazir Burhan	65
6. <i>Politik Bahasa Nasional dan Ketahanan Nasional</i> oleh Imam Sukarsono	83
7. <i>Politik Bahasa Nasional dan Pengembangan Pendidikan</i> oleh Basjuni Suriamihardja	101
8. <i>Politik Bahasa Nasional dan Pengembangan Kesusastraan</i> oleh Ajip Rosidi	115
9. <i>Persoalan Bahasa Indonesia untuk Pers</i> oleh Goenawan Mo- hammad	123
V. PANITIA DAN PESERTA	
1. Daftar Panitia	131
2. Daftar Peserta	132

KATA PENGANTAR

Berbagai segi masalah kebahasaan di Indonesia telah banyak dibahas dalam berbagai media dan dengan berbagai gaya. Di dalam pembahasan itu disajikan masalah bahasa Indonesia, masalah bahasa daerah, dan masalah pemakaian bahasa asing. Hubungan antara ketiga kelompok masalah kebahasaan ini kadang-kadang tidak disinggung sama sekali kadang-kadang dibahas sepiantas lalu saja sehingga terdapat kesan bahwa ketiga kelompok masalah itu dapat digarap secara terpisah. Dalam kenyataannya, ketiga kelompok masalah kebahasaan itu merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang mempunyai hubungan timbal balik, dan yang memiliki hubungan pengaruh-mempengaruhi baik secara positif maupun secara negatif. Oleh karena itu, pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan kita, yang meliputi ketiga kelompok masalah kebahasaan tersebut tadi, memerlukan adanya dasar pengolahan yang menyeluruh pula. Dasar pengolahan yang menyeluruh itu disebut **Politik Bahasa Nasional**, yang bermakna politik atau kebijaksanaan nasional mengenai masalah bahasa dan sastra.

Praseminar Politik Bahasa Nasional yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 29–31 Oktober 1974 diadakan dengan tujuan menyusun kerangka dasar politik bahasa nasional yang diperlukan itu. Oleh karena masalah kebahasaan tidak pula dapat dipisahkan dari masalah nasional kita yang lain, terutama masalah sosial dan budaya, Praseminar tersebut diikuti oleh tokoh-tokoh yang mewakili berbagai lapisan masyarakat, dan kertas kerja yang dibahas di dalam Praseminar itu disajikan oleh tokoh-tokoh yang bidang keahlian atau perhatiannya tidak terbatas pada bidang kebahasaan saja.

Di dalam Praseminar itu, masalah politik bahasa nasional telah ditinjau dari berbagai segi, seperti ternyata dari kertas-kertas kerja yang disajikan, yaitu (1) "Politik Bahasa Nasional" oleh Amran Halim, (2) "Lembaga Bahasa Nasional" (sekarang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) dan Pengembangan Bahasa Indonesia" oleh S. Effendi, (3) "Politik Bahasa Nasional dan Pembinaan Bahasa Indonesia" oleh Prof. S. Takdir Alisjahbana, (4) "Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Unsur Kebudayaan Nasional" oleh Prof. Koentjaraningrat, (5) "Politik Bahasa Nasional dan Pengajaran Bahasa" oleh Jazir Burhan, (6) "Politik Bahasa Nasional dan Ketahanan Nasional" oleh Imam Sukarsono, (7) "Politik Bahasa Nasional dan Pengembangan Pendidikan" oleh Basjuni Suramihardja, (8) "Politik Bahasa Nasional dan Pengembangan Kesusastraan" oleh Ajip Rosidi, dan (9) "Persoalan Bahasa Indonesia untuk Pers" oleh Goenawan Mohamad.

Buku *Politik Bahasa Nasional*, jilid I, ini berisi kertas-kertas kerja yang telah disajikan serta dibahas di dalam Praseminar itu. Penerbitan buku ini, yang telah dimungkinkan oleh tersedianya biaya yang disalurkan melalui Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dilakukan dengan tujuan agar kertas-kertas kerja itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Menurut rencana, penerbitan buku *Politik Bahasa Nasional* ini akan disusun dengan penerbitan buku *Politik Bahasa Nasional*, jilid II dan III. Mudah-mudahan penerbitan ketiga jilid buku ini dapat kita manfaatkan di dalam usaha kita untuk mengolah keseluruhan masalah bahasa yang kita hadapi di tanah air kita ini.

Kepada semua pihak yang telah memungkinkan penerbitan buku ini diucapkan terima kasih tak terhingga.

Jakarta, 16 Agustus 1976

Amran Halim

Editor

PIDATO PENGANTAR

OLEH

KETUA PROYEK PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH

Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan,
Bapak Direktur Jenderal Pendidikan,
serta hadirin yang saya muliakan,

Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang sedalam-dalamnya kepada hadirin yang telah menyisihkan waktunya yang sangat berharga guna ikut serta dalam Praseminar Politik Bahasa Nasional yang akan berlangsung selama tiga hari di gedung ini. Ucapan terima kasih ini terutama saya tujukan kepada hadirin yang telah bersusah payah mengadakan waktu guna menyiapkan kertas kerjanya sehingga memungkinkan penyelenggaraan praseminar ini sesuai dengan rencana.

Hadirin yang saya muliakan,

Praseminar ini diadakan pada hari-hari sesudah peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-46 kemarin, yang begitu besar artinya bagi kebangkitan rasa nasional bangsa Indonesia. Seperti yang telah diberitahukan, praseminar ini mengawali seminar yang akan kami adakan pada tanggal 3—5 Februari 1975 nanti.

Penyelenggaraan praseminar ini maupun seminar nanti dimungkinkan oleh adanya biaya Pelita yang disalurkan melalui Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.

Dalam praseminar ini dan selanjutnya dalam seminar nanti Proyek Pengembangan ingin meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dari masa-masa yang lalu mengenai kebijaksanaan nasional di dalam bidang kebahasaan bagi kepentingan keseluruhan pembangunan nasional, yang mencakup pembakuan dan pengembangan bahasa Indonesia secara menyeluruh, lengkap, dan berencana, di samping pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah, dan pengembangan pengajaran bahasa asing. Langkah-langkah yang lebih mantap ke arah ini semua baru dapat dijalankan mulai tahun ini sesudah Lembaga Bahasa Nasional* mendapat anggaran melalui Pelita dalam Proyek Penelitian dan Proyek Pengembangan, yang masing-masing saling mengisi.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah ialah: (a) penelitian dan penyusunan kamus, (b) penelitian dan penyusunan istilah, (c) penelitian bahasa Indonesia, (d)

penelitian sastra Indonesia, (e) penelitian bahasa daerah dan (f) penelitian sastra daerah.

Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah meliputi: (a) pengembangan politik bahasa nasional, (b) pengembangan pusat informasi kebahasaan, (c) pengembangan ketenagaan teknis, (d) pengembangan bahasa dan sastra, (e) pengembangan kerja sama kebahasaan, (f) pengembangan bahasa Indonesia melalui media massa, dan (g) pengembangan penulisan, penterjemahan, dan penerbitan.

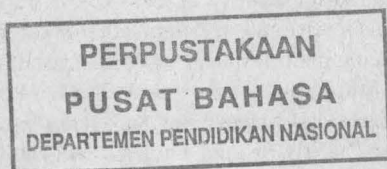
Proyek-proyek besar ini tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang terdapat pada Lembaga Bahasa Nasional* saja pada saat ini. Oleh karena keseluruhan jaringan masalah kebahasaan merupakan masalah nasional, perencanaan dan pengembangan politik bahasa nasional memerlukan adanya kerja sama yang bersungguh-sungguh antara Lembaga Bahasa Nasional*-yang sebentar lagi menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa--dengan pelbagai departemen, lembaga pendidikan, badan profesional, dan segenap lapisan masyarakat.

Praseminar ini merupakan salah satu usaha kerja sama kebahasaan ini, dan saya yakin bahwa dengan sumbangan anda sekalian tujuan kita dapat tercapai.

Dengan ini atas nama hadirin saya mohon Bapak Direktur Jenderal berkenan tampil untuk memberi sambutan Bapak.

Terima kasih.

S.W. Rujianti Mulyadi



* Lembaga Bahasa Nasional menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1974.

PIDATO PEMBUKAAN
OLEH
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Saudara-saudara yang terhormat,

Sungguh berbesar hati saya melihat Saudara sekalian berkumpul di sini untuk bersama-sama dengan Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah mengadakan diskusi untuk dapat bertukar fikiran guna meletakkan dasar-dasar pemikiran mengenai politik bahasa di negeri kita ini.

Berbagai seminar mengenai bahasa pernah diadakan, tetapi baru pertama kali ini diadakan pendalaman khusus mengenai politik bahasa nasional. Ini menunjukkan bahwa telah benar-benar dirasakan dan disadari bahwa bahasa sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang ampuh serta bahasa-bahasa yang hidup di Indonesia ini haruslah ditinjau dari berbagai segi untuk dapat diatur ke arah pembakuan dan pengembangan yang mantap.

Dari Saudara-saudara sekalian diharapkan sumbangan fikiran yang menghasilkan perumusan yang terarah mengenai kedudukan bahasa nasional, bahasa daerah, serta bahasa asing di negara kita yang telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, seperti yang dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36. Penjelasan atas pasal ini berbunyi "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dsb.) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh Negara". Jarak antara penetapan Undang-Undang 1945 dan sekarang sudah hampir 30 tahun. Pada pundak kitalah terletak kewajiban untuk menjabarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan suatu politik bahasa nasional, dalam arti "kebijaksanaan bahasa untuk kepentingan nasional".

Selamat bekerja dalam praseminar ini!

Prof. Ida Bagus Mantra

1

**FUNGSI POLITIK
BAHASA NASIONAL**

AMRAN HALIM

Masalah bahasa di Indonesia adalah masalah nasional yang memerlukan pengolahan yang berencana, terarah, dan teliti. Masalah bahasa ini adalah keseluruhan masalah yang ditimbulkan oleh kenyataan bahwa jumlah bahasa yang terdapat dan dipakai di Indonesia besar, bahwa bahasa-bahasa ini merupakan bagian daripada dan didukung oleh kebudayaan yang hidup, dan bahwa bahasa-bahasa ini memainkan peranan yang berbeda di dalam hubungan dengan kepentingan nasional. Di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi pemerintahan, terdapat bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya belum diketahui dengan pasti dan bahasa-bahasa asing yang dipakai sebagai bahasa perhubungan internasional.

Sebagai masalah nasional, keseluruhan masalah bahasa di Indonesia merupakan satu jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah bahasa asing. Di dalam jaringan ini, sebagai akibat pemakaian bahasa-bahasa ini di dalam masyarakat yang sama, yaitu masyarakat Indonesia, masalah bahasa nasional, masalah bahasa daerah, dan masalah bahasa asing itu memiliki hubungan timbal balik. Pengolahan masalah bahasa nasional tidak dapat dipisahkan dari pengolahan bahasa-bahasa daerah; demikian pula sebaliknya. Pengolahan masalah bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah tidak pula dapat dilepaskan dari masalah pemakaian dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing tertentu di Indoensia. Oleh karena itu, pengolahan keseluruhan masalah bahasa ini memerlukan adanya satu kebijaksanaan nasional yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pengolahan masalah bahasa itu benar-benar berencana, terarah dan teliti. Kebijaksanaan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah bahasa itu disebut *politik bahasa nasional*.

BAHASA NASIONAL

Sumpah Pemuda 1928 yang berisi pengakuan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita, merupakan langkah pertama yang menentukan di dalam perumusan garis kebijaksanaan mengenai bahasa nasional kita. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, yang menyatakan bahwa "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia", memberikan dasar yang kuat dan resmi bagi pemakaian bahasa Indonesia bukan saja sebagai bahasa perhubungan pada tingkat nasional tetapi juga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kongres Bahasa Indonesia 1954, di Medan, yang mengakui bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, dan bahwa di dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu bahasa Indonesia telah diperkaya oleh bahasa-bahasa lain, terutama bahasa-bahasa daerah, yang terdapat di Indonesia merupakan langkah maju yang berdasarkan kenyataan. Namun demikian, kalau kita perhatikan benar, beberapa pertanyaan pokok menge-

nai garis kebijaksanaan tentang bahasa kita itu masih tetap belum terjawab.

Salah satu fungsi politik bahasa nasional adalah memberikan dasar dan pengarahan bagi perencanaan serta pengembangan bahasa nasional, dan pada waktu yang sama memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pokok yang berhubungan dengan:

1. fungsi dan kedudukan bahasa nasional dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain,
2. penentuan ciri-ciri bahasa Indonesia baku,
3. tata cara pembakuan dan pengembangan bahasa nasional, dan
4. pengembangan pengajaran bahasa nasional pada semua jenis dan tingkat lembaga pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat perguruan tinggi.

Politik bahasa nasional juga memberikan dasar dan pengarahan bagi masalah bahasa nasional di dalam hubungannya dengan:

1. pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar lembaga-lembaga pendidikan.
2. pelaksanaan administrasi pemerintahan,
3. pengembangan ketenagaan baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan swasta,
4. pengembangan kesusastraan nasional,
5. pengembangan kebudayaan nasional,
6. peningkatan mutu dan jumlah bahan bacaan umum,
7. peningkatan mutu persuratkabaran dan siaran radio serta televisi, dan
8. penulisan buku-buku ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk karangan asli maupun dalam bentuk terjemahan.

Masalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sudah banyak disebut-sebut. Selain daripada ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam dokumen-dokumen resmi seperti Sumpah Pemuda 1928, Undang-Undang Dasar 1945 (Bab XV, Pasal 36), dan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 1954, kita dapati kenyataan bahwa masalah ini sudah dibahas dengan bermacam-macam cara dan gaya di dalam berbagai-bagai tulisan dalam bentuk kertas kerja, tesis, skripsi, pidato pengukuhan jabatan guru besar, dan karangan di dalam surat kabar serta majalah. Pada dasarnya tulisan-tulisan itu menunjukkan adanya kesepakatan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia, alat penyatuan berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan, dan kesukuannya ke dalam satu masyarakat nasional Indonesia, dan alat perhubungan antarsuku, antardaerah serta budaya. Kedua, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi pemerintahan, bahasa pengantar

di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Namun demikian, kita belum memiliki dokumen resmi yang lengkap, teliti dan terarah mengenai fungsi dan kedudukan bahasa nasional kita itu. Dokumen resmi yang diperlukan ini adalah politik bahasa nasional.

Politik bahasa nasional juga berisi ketentuan-ketentuan mengenai ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Apa yang kita maksudkan dengan bahasa Indonesia baku? Apa ciri-cirinya? Demi kesatuan Indonesia, apakah kita perlu memiliki bahasa Indonesia baku yang mutlak berlaku di seluruh Indonesia dan di dalam segala lapisan masyarakat kita? Siapa atau lembaga mana yang perlu diberi wewenang untuk memperhatikan dan menjaga kelangsungan hidup bahasa Indonesia baku itu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lain yang sejalan dengannya perlu dituangkan dalam bentuk politik bahasa nasional. Untuk ini diperlukan perumusan yang teliti dan berdasarkan penyelidikan yang cermat dengan memperhitungkan kenyataan bahwa:

1. bahasa Indonesia dipakai di seluruh Indonesia, di daerah-daerah yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan dan kesukuannya, dan di dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda pula latar belakang pendidikan serta kepentingannya;
2. bahasa Indonesia dipakai baik secara lisan maupun secara tertulis di dalam berbagai-bagai keadaan, mengenai segala macam soal, dan di kalangan masyarakat yang terikat oleh tata cara hubungan sosial tertentu;
3. perbedaan-perbedaan yang cukup besar terdapat di antara bahasa Indonesia lisan dan bahasa Indonesia tertulis;
4. di dalam pertumbuhannya dari bahasa Melayu sebagai *lingua franca* menjadi bahasa nasional dan bahasa negara kita, perkembangan bahasa Indonesia seperti yang kita miliki sekarang telah dimungkinkan oleh adanya tingkat toleransi kebahasaan yang tinggi, dan, sebagai akibatnya, telah menyerap berbagai-bagai unsur fonologi, sintaksis dan kosa kata dari bahasa-bahasa daerah, terutama bahasa Jawa, dan dari bahasa-bahasa asing tertentu, terutama bahasa Belanda dan bahasa Inggris;
5. laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern menghendaki pengembangan tata istilah yang serasi, yang tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan hanya memanfaatkan kosa kata bahasa Indonesia sebagai satu-satunya sumber; dan
6. Lembaga Bahasa Nasional yang kita miliki sekarang belum mempunyai wewenang yang cukup luas dan perlengkapan yang cukup baik untuk mengolah masalah kebahasaan kita dengan penuh wibawa.

Ketentuan-ketentuan mengenai bahasa Indonesia baku bertalian erat

dengan masalah tata cara pembakuan dan pengembangan bahasa Indonesia. Setelah kita ketahui sasaran yang hendak dicapai, yaitu bahasa Indonesia yang baku, pertanyaan yang timbul adalah bagaimanakah tata cara yang dapat dipakai di dalam usaha pembakuan dan pengembangan bahasa Indonesia itu. Jalan mana yang dapat ditempuh? Siapa atau lembaga mana yang harus mengerjakannya? Oleh karena pembakuan dan pengembangan bahasa adalah proses yang hidup dan berlangsung terus, dan dengan demikian tidak ada titik akhirnya selama bahasa Indonesia masih dipakai sebagai bahasa yang hidup, siapa atau lembaga mana yang bertanggung jawab atas kelangsungan pelaksanaan proses itu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diberi dasar dan pengarahannya oleh politik bahasa nasional dengan mengingat kenyataan bahwa:

1. pembakuan dan pengembangan bahasa yang efektif perlu didasarkan atas keadaan sosiolinguistik yang ada;
2. pembakuan dan pengembangan bahasa yang benar-benar preskriptif tidak memiliki jaminan bahwa hasilnya akan menjelma sebagai bahasa yang hidup, yang kaidah-kaidahnya akan diindahkan oleh masyarakat pemakainya, sedangkan--sebaliknya--pembakuan dan pengembangan bahasa yang benar-benar deskriptif akan menjadi rumit sekali dan belum tentu dapat mencapai sasaran yang diinginkan; dan
3. masalah bahasa adalah masalah yang menyangkut kepentingan segenap lapisan masyarakat pemakainya, dan oleh karena itu, pembakuan serta pengembangan bahasa itu perlu melibatkan bukan saja tokoh-tokoh kebahasaan tetapi juga segenap lapisan masyarakat pemakainya.

Untuk kepentingan pembakuan dan pengembangan bahasa Indonesia kita dapat memanfaatkan metode, teknik dan hasil-hasil lain yang telah dicapai di dalam ilmu yang sekarang dikenal dengan nama sosiolinguistik. Untuk kepentingan kelangsungan usaha pembakuan dan pengembangan bahasa Indonesia, sudah pada tempatnya kalau kita meningkatkan pemanfaatan Lembaga Bahasa Nasional sebagai lembaga nasional yang bertanggung jawab atas keseluruhan masalah kebahasaan kita.

Politik bahasa nasional perlu pula mengatur dan menyediakan pengajaran bagi pengembangan pengajaran bahasa Indonesia di segala jenis dan tingkat lembaga pendidikan. Di dalam hubungan ini, pertanyaan yang timbul adalah apa tujuan yang hendak dicapai dengan pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan? Jalan yang mana yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan itu?

Tujuan pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan kita adalah (1) menjadikan anak didik kita manusia susila Indonesia yang memiliki kepercayaan akan dasar dan filsafat negaranya, serta kebanggaan atas bahasa dan sastra nasionalnya, dan (2) memberi anak didik kita penguasaan atas

pemakaian bahasa Indonesia. Penguasaan ini mencakup:

1. kesanggupan memahami apa yang dikatakan atau yang dituliskan oleh orang lain di dalam bahasa Indonesia, dan
2. kesanggupan memanfaatkan bahasa Indonesia untuk menyatakan perasaan, fikiran dan keinginan baik secara lisan maupun secara tertulis dengan tepat, sesuai dengan keadaan, bahan yang dikemukakan dan hubungan sosial budaya yang terlibat, dengan tidak mempergunakan unsur-unsur bahasa asing atau bahasa-bahasa lain yang tidak benar-benar diperlukan.

Jalan yang dapat ditempuh untuk tujuan itu adalah pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa yang hidup di segala jenis dan tingkat lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Supaya mencapai tujuannya dengan sebaik-baiknya, pengajaran bahasa Indonesia itu perlu dilanjutkan sampai dengan tingkat perguruan tinggi, dan tidak terhenti pada akhir pendidikan tingkat menengah atas seperti yang kita dapati sekarang.

Tujuan pengajaran bahasa Indonesia berhubungan erat dengan masalah bahasa Indonesia baku oleh karena sasaran yang hendak kita capai tentulah penguasaan atas pemakaian bahasa Indonesia yang baku. Dengan demikian, pengembangan pengajaran bahasa Indonesia hendaklah seiring dengan pembakuan dan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri.

Di dalam memberikan dasar dan pengarahannya untuk kepentingan pengembangan pengajaran bahasa Indonesia itu, politik bahasa nasional perlu memperhitungkan kenyataan bahwa:

1. bahasa Indonesia diajarkan di seluruh Indonesia, kepada anak-anak didik yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya serta bahasa ibunya;
2. hanya sebagian kecil rakyat Indonesia yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu; dan
3. perkembangan teknik dan sarana perhubungan adalah sedemikian rupa sehingga surat kabar, majalah, dan siaran radio dan televisi telah sanggup menjangkau hampir seluruh pelosok tanah air kita.

Selanjutnya, politik bahasa nasional perlu memberikan dasar dan pengarahannya kepada pemakaian bahasa Indonesia di dalam hubungannya dengan berbagai-bagai kepentingan, kegiatan, dan segi kehidupan nasional kita, seperti yang telah dikemukakan tadi. Di dalam hal ini politik bahasa nasional perlu menyediakan dasar dan pengarahannya bagi jawaban atas pertanyaan seperti:

1. Apakah pembatasan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai dari kelas empat sekolah dasar masih perlu dipertahankan? Apakah tidak sebaiknya bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar

tar mulai dari awal sampai akhir pendidikan formal? Kebijaksanaan apakah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengajaran bahasa Indonesia dan meningkatkan penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia di luar lembaga-lembaga pendidikan?

2. Kebijaksanaan apakah yang dapat dipergunakan untuk mengatur dan memberikan pengarahan kepada pemakaian bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan?
3. Sampai ke mana penguasaan bahasa Indonesia dapat dan perlu dijadikan salah satu unsur yang menentukan di dalam pengembangan ketenagaan (penerimaan karyawan baru, kenaikan pangkat dan pemberian tugas-tugas sipil dan militer, maupun di kalangan swasta?
4. Sampai ke manakah dapat dicapai keserasian antara pengembangan bahasa Indonesia yang baku dan pengembangan kesusastraan nasional yang hidup?
5. Apakah peranan bahasa Indonesia sebagai perhubungan dan alat ekspresi budaya di dalam pengembangan kebudayaan nasional? Sampai ke mana dapat dicapai keserasian antara pengembangan bahasa Indonesia dan pengembangan kebudayaan nasional?
6. Kebijaksanaan apakah yang dapat dimanfaatkan di dalam memberikan dasar dan pengarahan kepada peningkatan mutu dan jumlah bahan bacaan umum?
7. Sampai ke manakah pengembangan bahasa Indonesia dapat dan perlu di manfaatkan untuk peningkatan mutu persuratkabaran dan siaran radio serta televisi?
8. Sampai ke manakah dapat dicapai keserasian antara pengembangan bahasa Indonesia dan laju perkembangan penulisan buku-buku ilmu pengetahuan? Pengarahan yang bagaimana dapat diberikan kepada pengembangan tata istilah?

Jelaslah bahwa politik bahasa nasional diperlukan untuk memberikan dasar pegangan dan pengarahan bagi pengolahan masalah fungsi dan kedudukan, serta segala segi pembakuan dan pengembangan serta pengajaran bahasa nasional kita.

BAHASA DAERAH

Di samping mengolah masalah bahasa nasional, politik bahasa nasional juga berfungsi sebagai sumber dasar dan pengarahan bagi pengolahan masalah bahasa-bahasa daerah kita yang berjumlah ratusan itu. Seperti juga halnya dengan masalah bahasa nasional, pertanyaan-pertanyaan pokok mengenai bahasa-bahasa daerah perlu dirumuskan jawabannya dalam bentuk ketentuan-ketentuan dan garis kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam bentuk politik bahasa nasional.

Pertanyaan-pertanyaan pokok itu berhubungan dengan masalah:

1. fungsi dan kedudukan bahasa-bahasa daerah,
2. penentuan ciri-ciri bahasa daerah baku,
3. pembakuan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah tertentu,
4. pengembangan pengajaran bahasa-bahasa daerah, dan
5. pendokumentasian bahasa-bahasa daerah yang hanya dipakai sebagai bahasa lisan.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan Bab XV, Pasal 36, menyatakan bahwa bahasa-bahasa daerah yang masih dipakai sebagai alat perhubungan yang hidup dan dibina oleh masyarakat pemakainya dihargai dan dipelihara oleh negara oleh karena bahasa-bahasa itu adalah bagian daripada kebudayaan Indonesia yang hidup. Di samping itu, masalah bahasa-bahasa daerah dan hubungannya dengan bahasa Indonesia sudah banyak pula dibahas di dalam seminar-seminar dan tulisan-tulisan di dalam surat kabar atau majalah. Kongres Bahasa Indonesia 1954, misalnya, mengakui adanya peranan yang besar yang dimainkan oleh bahasa-bahasa daerah di dalam pertumbuhan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional seperti yang kita miliki dewasa ini. Namun, ketentuan-ketentuan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa-bahasa daerah itu dan garis kebijaksanaan yang dipakai di dalam pembinaan dan pengembangannya belumlah tertuang di dalam bentuk kebijaksanaan nasional yang menyeluruh dan terarah yang mencakup tidak hanya masalah bahasa-bahasa daerah tetapi juga masalah bahasa nasional dan bahasa-bahasa asing tertentu yang dipakai atau yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan politik bahasa nasional.

Di dalam perumusan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa-bahasa daerah, politik bahasa nasional perlu memperhitungkan kenyataan bahwa:

1. kelangsungan hidup dan pembinaan bahasa-bahasa daerah yang terus di pelihara oleh masyarakat pemakainya dan merupakan bagian daripada kebudayaan Indonesia yang hidup dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahasa-bahasa daerah adalah lambang nilai sosial budaya yang mencerminkan dan terikat pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat pemakainya;
3. bahasa-bahasa daerah adalah kekayaan budaya yang dapat dimanfaatkan bukan saja untuk kepentingan pengembangan dan pembakuan bahasa nasional kita tetapi juga untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah itu sendiri, dan oleh karena itu perlu dipelihara;
4. bahasa-bahasa daerah berbeda-beda bukan saja di dalam struktur keba-

- hasaannya tetapi juga di dalam jumlah penutur aslinya;
5. bahasa-bahasa daerah tertentu dipakai sebagai alat perhitungan baik secara lisan maupun secara tertulis, sedangkan bahasa-bahasa daerah lainnya hanya dipakai secara lisan; dan
 6. di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahasa-bahasa daerah mempengaruhi dan, pada waktu yang sama, dipengaruhi oleh bahasa nasional, bahasa-bahasa daerah lain dan bahasa-bahasa asing tertentu sebagai akibat meningkatnya penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia bertambah lancarnya hubungan antardaerah, dan meningkatnya arus perpindahan penduduk serta jumlah perkawinan antarsuku.

Tingkat perkembangan bahasa-bahasa daerah tertentu adalah sedemikian rupa sehingga diperlukan perumusan ciri-ciri yang membedakan bahasa daerah baku dari yang tidak baku. Di dalam hubungan ini, seperti halnya dengan perumusan ciri-ciri bahasa Indonesia baku, politik bahasa nasional memberikan dasar dan pengarah dengan memperhitungkan kenyataan sosial budaya di samping pertimbangan kebahasaan.

Bahasa-bahasa daerah tertentu perlu dibakukan dan dikembangkan. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hubungan ini adalah bahasa-bahasa daerah mana yang perlu dibakukan dan dikembangkan. Jalan yang mana yang dapat ditempuh untuk keperluan itu? Siapa atau lembaga apa yang melaksanakannya dan menjaga kelangsungan proses pembakuan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah itu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini merupakan dasar dan garis kebijaksanaan yang dituangkan di dalam politik bahasa nasional.

Politik bahasa nasional juga berisi garis kebijaksanaan mengenai pengembangan pengajaran bahasa-bahasa daerah dan pemakainya sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Apa yang hendak dicapai dengan pengembangan pengajaran bahasa-bahasa daerah? Sampai ke mana pengembangan pengajaran bahasa-bahasa daerah dapat membantu pembinaan sastra daerah? Di lembaga-lembaga pendidikan mana dan sampai tingkat mana pengajaran bahasa-bahasa daerah perlu dilaksanakan? Sampai ke mana pemakaian bahasa-bahasa daerah sebagai bahasa pengantar sampai dengan kelas tiga di sekolah dasar perlu dipertahankan? Apakah tidak sebaiknya bahasa Indonesia dipakai sebagai satu-satunya bahasa pengantar di segala jenis dan tingkat pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat perguruan tinggi? Pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengannya perlu dijawab oleh politik bahasa nasional.

Akhirnya, politik bahasa nasional perlu memberikan garis kebijaksanaan mengenai masalah bahasa-bahasa daerah yang hanya dipergunakan sebagai alat perhubungan lisan, bahasa-bahasa daerah yang banyak persamaannya dengan

bahasa Indonesia sehingga tidak dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, dan bahasa-bahasa daerah yang letak daerah pemakaiannya terpencil dan jumlah penutur aslinya sedemikian kecilnya sehingga kelangsungan hidupnya terancam.

BAHASA ASING

Selain daripada pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah, di Indonesia terdapat pula pemakaian bahasa-bahasa asing tertentu, terutama bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Bahasa Inggris sebagai "bahasa asing pertama" diajarkan mulai dari kelas satu sekolah lanjutan tingkat pertama sampai dengan tingkat pertama di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Bahasa Prancis dan bahasa Jerman diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan menengah atas dan tinggi. Beberapa lembaga pendidikan tinggi mengajarkan bahasa Belanda. Di dalam hubungan ini pertanyaan-pertanyaan pokok yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan bahasa-bahasa asing itu?
2. Apa fungsi bahasa-bahasa asing itu di dalam hubungannya dengan kepentingan nasional?
3. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan pengajaran bahasa-bahasa asing itu di lembaga-lembaga pendidikan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini merupakan garis kebijaksanaan mengenai masalah bahasa asing yang perlu dirumuskan sebagai bagian daripada politik bahasa nasional.

Politik bahasa nasional perlu menegaskan bahwa bahasa-bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis dan bahasa Jerman itu berkedudukan sebagai bahasa asing di Indonesia. Di dalam kedudukan demikian, bahasa-bahasa asing itu tidak bersaing dengan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara serta dengan bahasa-bahasa daerah baik sebagai lambang nilai sosial budaya maupun sebagai alat perhubungan antardaerah. Selain daripada itu, masalah pengembangannya bukanlah merupakan masalah kebahasaan Indonesia.

Masalah fungsi bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama di Indonesia, perlu pula dirumuskan di dalam politik bahasa nasional. Di dalam hubungan ini kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa:

1. sebagai warga masyarakat dunia, Indonesia memerlukan pemakaian bahasa-bahasa asing tertentu, terutama bahasa Inggris, sebagai alat perhubungan antarbangsa;
2. buku-buku dan sarana lain yang memungkinkan kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta memanfaatkannya

untuk kepentingan nasional kita, sebagian besar tertulis di dalam bahasa asing; dan

3. bahasa asing yang dipakai sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi modern dapat kita manfaatkan sebagai salah satu sumber untuk kepentingan pengembangan bahasa nasional kita, terutama di dalam pengembangan tata istilah.

Politik bahasa nasional perlu memberikan dasar pegangan dan pengarahan sedemikian rupa sehingga pemanfaatan bahasa-bahasa asing itu tidak mengakibatkan pemakaian unsur-unsur bahasa asing secara berlebih-lebihan di dalam bahasa Indonesia.

Erat berhubungan dengan masalah fungsi bahasa-bahasa asing adalah masalah pengajaran dan pengembangan pengajaran bahasa-bahasa asing itu. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 096 tahun 1967 menyatakan bahwa pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah menengah bertujuan memungkinkan anak didik memiliki penguasaan pemakaian bahasa itu sedemikian rupa sehingga ia dapat:

1. memanfaatkan buku-buku dan bahan-bahan kepustakaan lainnya, yang sebagian besar tertulis di dalam bahasa Inggris;
2. memahami pelajaran dan kuliah yang diberikan oleh para pengajar asing;
3. membuat catatan seperlunya, dan menggambarkan kehidupan Indonesia kepada orang-orang asing; dan
4. berhubungan secara lisan dengan orang-orang asing.

Namun, garis kebijaksanaan yang lebih tegas dan pengarahan yang lebih lengkap mengenai pengajaran dan pengembangan pengajaran bahasa-bahasa asing perlu dirumuskan di dalam politik bahasa nasional.

Kenyataan bahwa penguasaan bahasa-bahasa asing tertentu seringkali dianggap sebagai lambang status sosial di dalam masyarakat kita meningkatkan kebutuhan kita akan politik bahasa nasional yang menyeluruh, teliti, dan terarah. Ini adalah kebutuhan nasional.

KESIMPULAN

Politik bahasa nasional adalah kebijaksanaan nasional yang resmi mengenai keseluruhan masalah bahasa kita. Ia berisi ketentuan-ketentuan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah dan bahasa-bahasa asing yang dipergunakan di Indonesia. Ia memberikan dasar pegangan dan pengarahan yang diperlukan di dalam penentuan ciri-ciri bahasa baku, di dalam usaha pembakuan dan pengembangan bahasa, dan di dalam pengembangan pengajaran bahasa. Sebagai kebijaksanaan nasional yang resmi, politik bahasa nasional dapat dijadikan dasar di dalam penentuan skala prioritas di dalam perencanaan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan

bahasa dan sastra kita pada masa yang akan datang.

BAHAN KEPUSTAKAAN

- Alisjahbana, S. Takdir. 1957. *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Rakjat.
- Fishman, Joshua A. 1971. *Sociolinguistics: A Brief Introduction*. Cetakan kedua. Rowley, Massachusetts: Newbury House.
- Editor. 1974. *Advances in Language Planning*. The Hague: Mouton.
- Halim Amran. 1971. "Multilingualism in Relation to the Development of Bahasa Indonesia". *RELJ Journal*, December 1971: 4-19.
- , 1972. "Perguruan Tinggi dan Pengembangan Bahasa Indonesia". Stensil. Palembang: Lembaga Bahasa, Universitas Sriwijaya.
- , dan Latief, A. 1973. "Some Sociolinguistic Problems of Indonesia". *Bahasa dan Kesusastraan*, No. 3, Tahun 1973: 1-15.
- Rubin, Joan, dan Jernudd, Bjorn H., Editor. 1971. *Can Language be Planned?* Honolulu: The University Press of Hawaii.
- , dan Shuy, Roger, Editor. 1973. *Language Planning: Current Issues and Research*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Slametmuljana. 1966. *Politik Bahasa Nasional*. Cetakan kedua. Jakarta: Djambatan.

- Departemen Penerangan R.I. t.t. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua*. jilid III. Jakarta.
- Effendi, S. 1973. "Lembaga Bahasa Nasional dan Pembinaan Bahasa Indonesia". Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional.
- Fishman, Josua A., ed. 1972. *Advances in the Sociology of Language*. vol. II. The Hague-Paris: Mouton. Terutama kertas kerja Joan Rubin, "Evaluation and Language Planning".
- Kawulusan, Hans E. t.t. *Bunga Rampai Management Modern*. Jakarta: Indonesian Development Evaluation & Analysis Systems.
- Lembaga Bahasa Nasional. 1972. "Kegiatan Pembinaan Bahasa". Jakarta.
- Pride, J.B. dan Janet Holmens. ed. 1972. *Sociolinguistics*. Great Britain: Hazell Watson & Viney Ltd. Terutama kertas kerja E. Haugen, "Dialect, Language, Nation".
- Rubin, Joan dan Bjorn H. Jernudd, ed 1971. *Can Language Be Planned*. Hawaii: The University of Hawaii. Terutama kertas-kertas kerja Sutan Takdir Alisjahbana, "Some Planning Processes in the Development of the Indonesian-Malay Language"; Bjorn H. Jernudd dan J. Das Gupta, "Towards a Theory of Language Planning"; dan Herbert C. Kelman, "Language as an Aid and Barrier to Involvement in the National System".

2

**LEMBAGA BAHASA NASIONAL
DAN PENGEMBANGAN BAHASA**

S.EFFENDI

Dengan Surat Keputusan Presiden no. 45 tahun 1974, Lembaga Bahasa Nasional diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang berkedudukan di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, pemakaian nama Lembaga Bahasa Nasional dalam kertas kerja ini hendaknya dibaca sesuai dengan surat keputusan tersebut.

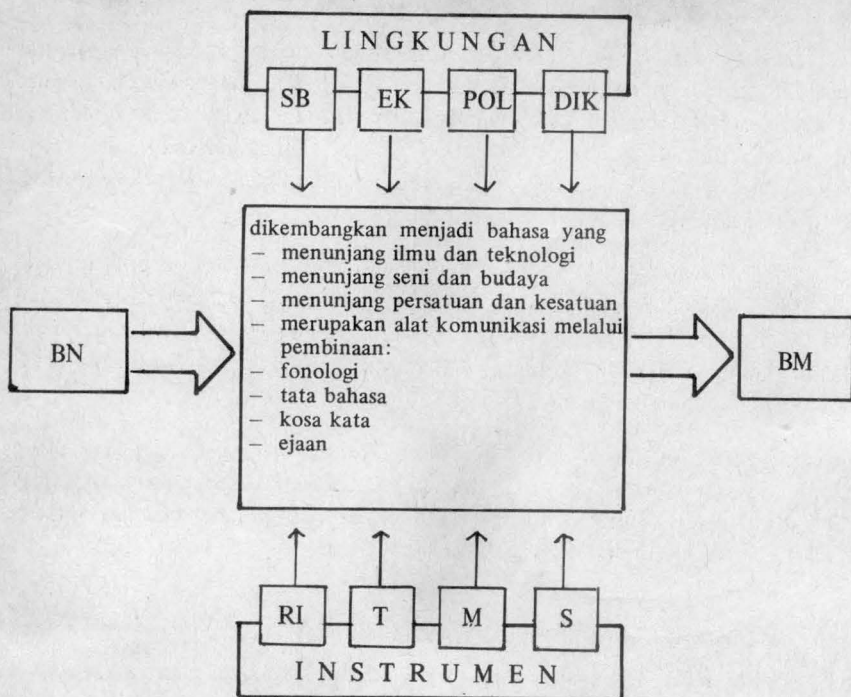
Dalam kertas kerja ini akan dikemukakan beberapa pokok pikiran yang melandasi kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan bahasa nasional dan daerah, dan program-program kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua secara singkat, berdasarkan bahan-bahan yang ada di Lembaga Bahasa Nasional.

Apabila ternyata dalam kertas kerja ini terdapat hal-hal yang penting tetapi tidak dikemukakan, maka kenyataan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Dalam hubungan ini, pimpinan Lembaga Bahasa Nasional diharapkan dapat melengkapinya.

PENGEMBANGAN BAHASA SEBAGAI SUATU SISTEM

Dalam pengembangan bahasa kita dapat melihat adanya beberapa komponen yang saling berinteraksi dan bersifat teknologis, yakni komponen (1) bahasa yang akan dikembangkan, (2) proses pengembangan, (3) hasil pengembangan, (4) instrumen pengembangan, dan (5) lingkungan pengembangan. Komponen pertama meliputi fonologi, tata bahasa, dan leksikon. Komponen kedua menyangkut sasaran-sasaran pengarah proses. Misalnya, bahasa yang dikembangkan itu harus menjadi bahasa yang dapat menunjang ilmu, teknologi, seni budaya, persatuan dan kesatuan, dan menjadi alat komunikasi bangsa melalui pembinaan fonologi, tata bahasa, leksikon, dan ejaan. Komponen keempat menyangkut rencana induk pengembangan, tenaga pengembang, manajemen pengembangan, fasilitas dana, dan peralatan, dan komponen kelima meliputi lingkungan sosial budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan.

Berdasarkan pemikiran di atas, sistem pengembangan bahasa nasional dapat dibagikan sebagai berikut:



Catatan:

DIK = Pendidikan	BN = Bahasa Nasional
RI = Rencana Induk	BM = Bahasa Modern
T = Tenaga	SB = Seni budaya
M = Manajemen	EK = Ekonomi
S = Sarana	POL = Politik

Tetapi proses pengembangan demikian bukanlah merupakan proses yang selesai. Ia baru melewati proses seleksi kaidah dan kodifikasi bentuk. Karena itu, hasil pengembangan merupakan tujuan antara, yakni bahasa modern atau bahasa baku yang diharapkan menjadi sarana penunjang modernisasi dan pembangunan nasional. Tujuan akhir pengembangan bahasa nasional adalah "tercapainya suatu kemampuan untuk mempergunakan bahasa Indonesia yang sebaik mungkin di kalangan masyarakat luas" (*Repelita II*, h. 230). Untuk mencapai tujuan ini, yang dikembangkan adalah manusia Indonesia, dan pengembangannya melalui proses elaborasi dan penerimaan manusia Indonesia itu terhadap kaidah-kaidah baku. Pengembangan bahasa nasional untuk mencapai tujuan ini paling efisien dan relatif mudah di kontrol secara efektif apabila dilakukan di sekolah.²

MASALAH PENGEMBANGAN BAHASA DEWASA INI

Berdasarkan pemikiran pengembangan bahasa sebagai suatu sistem, hampir satu setengah tahun yang lalu,³ saya menyatakan bahwa Lembaga Bahasa Nasional melihat tiga masalah pokok dalam pengembangan bahasa nasional:

- a. Hasil pengembangan bahasa kurang serasi dengan kebutuhan masyarakat masa kini;
- b. Pengelolaan pengembangan bahasa banyak mengandung kelemahan;
- c. Sumber-sumber yang bertalian dengan keuangan, materil, dan tenaga terlatih sangat tidak memadai.

Dari masalah pokok pertama, kita dapat melihat bahwa (1) kesetiaan dan kebanggaan menggunakan bahasa nasional menurun—tidak sedikit orang Indonesia menggunakan bahasa nasional seenaknya sekalipun dalam situasi yang menghendaki ketertiban atau kecermatan penggunaan bahasa, dan tidak sedikit pula orang Indonesia yang merasa bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa nasional, (2) kemampuan berbahasa nasional daripada pemakainya kurang memuaskan — tidak sedikit lulusan sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sekolah tinggi yang tidak mampu menyatakan pikiran dan kehendaknya dalam bahasa nasional yang baik, dan tidak sedikit pula orang Indonesia yang bahkan belum dapat berbahasa nasional dan (3) bahasa Indonesia itu sendiri belum mencapai tingkat standar yang memperlihatkan kestabilan dan ketelitian dalam kosa kata, istilah, tata bahasa, lafal, dan ejaan—cukup banyak konsep ilmu dan teknologi modern yang belum tertampung oleh kosa kata atau istilah yang tersedia dalam bahasa nasional, dan cukup banyak pula masalah ketatabahasa, lafal, dan ejaan yang belum dikodifikasikan dan dikembangkan.

Dari masalah pokok kedua, kita dapat melihat bahwa (1) politik bahasa nasional belum dijabarkan berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang meluas, sungguh-sungguh, kontinu dan terarah—keputusan-keputusan yang pernah diturunkan daripadanya seringkali bersifat insidentil dan tidak diikuti kegiatan-kegiatan yang konkret, (2) perencanaan belum dilakukan semestinya — umumnya perencanaan bahasa tidak menyeluruh, lebih bersifat intuitif, tidak berdasarkan fakta atau informasi dari hasil penelitian yang sungguh-sungguh, sehingga sasaran-sasaran, pendekatan-pendekatan dan pemerioritasan tidak merupakan pengarah pengembangan yang baik dan sering tidak saling berhubungan, (3) organisasi pengembangan yang ada, milik pemerintah ataupun swasta, kurang rasionil, efisien dan efektif—Lembaga Bahasa Nasional yang dibebani tugas membina dan mengembangkan bahasa nasional dan daerah, suatu tugas mahaberat, hanya diberi kedudukan di bawah suatu direktorat jenderal; berbagai himpunan, ikatan atau fakultas sastra yang langsung berkepentingan dengan pengembangan

bahasa bekerja sendiri-sendiri, (4) penggalakan-penggalakan dalam kegiatan pengembangan bahasa kekurangan motivasi dan program yang kongkret sehingga tidak efektif dan efisien—tidak sedikit orang Indonesia yang acuh tak acuh terhadap kegiatan bahasa karena mereka tidak yakin bahwa kegiatan itu bermanfaat, dan (5) pembimbingan serta evaluasi hasil pengembangan cukup terbengkalai—hingga dewasa ini kita hanya mengetahui dengan samar-samar apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh para sarjana atau ahli dalam bidang bahasa nasional dan daerah, serta hasil-hasil yang dicapainya; dan hasil evaluasi yang ada umumnya kurang memberikan umpan balik bagi perencanaan yang baik dan kurang dimanfaatkan.

Dari masalah pokok ketiga, kita dapat melihat bahwa (1) kegiatan-kegiatan pengembangan bahasa dilaksanakan dengan biaya yang murah — bertahun-tahun lamanya Lembaga Bahasa Nasional tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kebahasaan yang berarti antara lain karena amat terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah (dan baru dapat bergerak setelah program pengembangan bahasa dan sastra dimasukkan dalam Repelita Kedua), (2) tenaga ahli dan terlatih dalam bidang penelitian bahasa dan sastra cukup terbatas—mencari 20 tenaga ahli dan terlatih dalam bidang penelitian bahasa dan sastra di Jakarta yang berpenduduk 5 juta orang bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan merupakan pekerjaan yang mustahil bisa dilakukan, (3) bahan-bahan dan informasi tentang bahasa nasional dan daerah sangat terbatas—mereka yang akan mengadakan penelitian atau membuat perencanaan akan menjumpai kesulitan memperoleh bahan atau informasi yang lengkap, baik di Lembaga Bahasa Nasional, di beberapa fakultas sastra, ataupun di pusat-pusat dokumentasi lainnya di Indonesia, dan (4) peralatan pengembangan bahasa pun terbatas dalam jumlah maupun mutu—mereka yang meneliti frekuensi kosa kata akan menghitung ratusan ribu kartu dengan pensil atau paling mujur dengan mesin hitung; mereka yang mentranskripsikan bunyi-bunyi bahasa daerah tertentu secara fonetis terpaksa bekerja hanya dengan mendengarkan rekaman dari alat perekam yang kurang memenuhi syarat.

Masalah-masalah tersebut mungkin belum lengkap diidentifikasi tetapi telah cukup menyadarkan Lembaga Bahasa Nasional bahwa (1) pengembangan bahasa nasional tidak mungkin hanya dilakukan oleh sebuah lembaga resmi, melainkan harus oleh semua pihak yang berkepentingan, secara individual ataupun kelompok, dengan mengerahkan segala sumber yang tersedia, (2) cara-cara penyelesaian yang tepat perlu segera dirumuskan, dan (3) program-program yang kongkret dan relevan perlu segera dilaksanakan.

PROGRAM PENGEMBANGAN

Menyadari perlunya pengembangan bahasa ditingkatkan untuk mencapai

"suatu kemampuan untuk mempergunakan bahasa Indonesia yang sebaik mungkin di kalangan masyarakat luas sebagai sarana komunikasi nasional antarmanusia Indonesia" (Repelita Kedua, h. 230), Pemerintah memasukkan program pengembangan bahasa dan kesusastraan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua dan menugaskan kepada Lembaga Bahasa Nasional untuk melaksanakan program tersebut.

Ada dua proyek yang sedang dan akan dilaksanakan selama Pelita Kedua ini (1974/1975--1978/1979): (1) Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dan (2) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, masing-masing dengan beberapa kegiatan dan sasaran, yang di bawah ini akan dikemukakan secara singkat:

Proyek Penelitian

Proyek ini bertujuan mengumpulkan data dan mendeskripsikan struktur dan fungsi bahasa Indonesia dan daerah, memberikan rekomendasi dan menyediakan sarana untuk pengembangan bahasa dan sastra, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penelitian dan Penyusunan Kamus. Hasil yang diharapkan adalah: (1) data tentang kamus, (2) Kamus Besar Bahasa Indonesia, (3) Kamus Besar Bahasa Jawa-Indonesia (4) Kamus Besar Bahasa Sunda-Indonesia (5) Kamus Besar Bahasa Bali-Indonesia, (6) Kamus Bahasa Indonesia SD, (7) Kamus bahasa-bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar.
- b. Penelitian dan Penyusunan Istilah. Hasil yang diharapkan adalah: (1) data tentang istilah (2) pembakuan dan pengembangan istilah dalam 25 bidang ilmu.
- c. Penelitian Bahasa Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah: (1) data dan deskripsi tentang bahasa Indonesia, di Jawa dan di luar Jawa, termasuk yang bertalian dengan pengajaran, dan (2) data tentang tulisan-tulisan berharga tentang bahasa Indonesia, yang perlu diselamatkan, disebarluaskan, atau dikembangkan.
- d. Penelitian Sastra Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah: (1) data dan deskripsi tentang bahasa-bahasa daerah, di Jawa dan di Luar Jawa, termasuk yang bertalian dengan pengajaran, dan (2) data tentang tulisan-tulisan berharga tentang bahasa-bahasa daerah yang perlu diselamatkan, dikembangkan, atau disebarluaskan.
- e. Penelitian Sastra Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah: (1) data dan deskripsi tentang sastra Indonesia, di Jawa dan di luar Jawa, termasuk yang berhubungan dengan pengajaran, dan (2) data tentang tulisan-tulisan berharga mengenai sastra Indonesia yang perlu diselamatkan, dikembangkan, atau disebarluaskan.

- f. Penelitian Sastra Daerah. Hasil yang diharapkan adalah: (1) data dan deskripsi tentang sastra daerah, di Jawa dan di luar Jawa, termasuk yang bertalian dengan pengajaran, dan (2) data tentang tulisan-tulisan berharga mengenai sastra daerah yang perlu diselamatkan, dikembangkan, atau disebarluaskan.

Proyek Pengembangan

Proyek ini bertujuan mengembangkan sarana informasi kebahasaan, ketenagaan, politik bahasa nasional, wawasan kebahasaan, sikap bangga memiliki dan menggunakan bahasa nasional, dan sikap saling mengerti antarbangsa, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Pusat Informasi Kebahasaan. Hasil yang diharapkan adalah: (1) gedung pusat informasi kebahasaan yang representatif dan (2) terkumpulnya data atau informasi tentang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah secara lengkap dan dapat melayani masyarakat yang memerlukannya.
- b. Pengembangan Ketenagaan Teknis. Hasil yang diharapkan adalah: (1) tersedianya tenaga-tenaga yang terlatih dalam bidang penelitian dan perencanaan bahasa, bidang perkamusan, bidang penterjemahan, dan bidang pemetaan melalui penataran di dalam dan di luar negeri dan (2) data tentang tenaga-tenaga dalam bidang bahasa dan sastra di lingkungan pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
- c. Pengembangan Politik Bahasa Nasional. Hasil yang diharapkan adalah: (1) rumusan lebih jelas tentang fungsi dan kedudukan bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing yang diajarkan di sekolah, serta tentang pendekatan dan pengaturan prioritas dalam pengembangan bahasa, dan (2) penerimaan masyarakat terhadap politik bahasa nasional.
- d. Pengembangan Bahasa dan Sastra. Hasil yang diharapkan adalah: (1) terselenggaranya seminar dan lokakarya tentang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, dan kongres bahasa Indonesia, dan (2) tersebarluasnya hasil seminar, lokakarya, dan kongres tersebut di kalangan masyarakat luas.
- e. Pengembangan Kerja Sama Kebahasaan. Hasil yang diharapkan adalah: (1) terselenggaranya secara teratur sidang-sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (2) terselenggaranya pertemuan peninjauan dalam rangka kerja sama kebahasaan dengan negara-negara ASEAN yang lain, dan (3) tersebarluasnya hasil pertemuan dan sidang-sidang tersebut, di kalangan masyarakat.
- f. Pengembangan Penulisan, Penterjemahan, Penerbitan Majalah Bahasa dan Sastra, dan Penerbitan lain. Hasil yang diharapkan adalah: (1) buku-buku pedoman penelitian, penyusunan kamus, penyusunan istilah, dan pedo-

man untuk keperluan praktis pengembangan bahasa, (2) buku sumber tentang sejarah bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, (3) buku-buku terjemahan karya sastra daerah dan asing yang bermutu dan buku-buku referensi tentang bahasa dan sastra ke dalam bahasa Indonesia, (4) monografi tentang bahasa dan sastra, (5) terbitnya majalah ilmiah tentang bahasa dan sastra dan majalah pengajaran bahasa dan sastra, dan (6) tersebarluasnya hasil penulisan, terjemahan dan majalah tersebut di kalangan masyarakat luas.

- g. Pengembangan Bahasa melalui Media Massa. Hasil yang diharapkan adalah: (1) terselenggaranya siaran-siaran pembinaan bahasa Indonesia secara teratur dan terus-menerus melalui TVRI dan RRI, dan (2) terselenggaranya siaran pembinaan bahasa Indonesia secara teratur dan terus-menerus melalui surat kabar dan majalah umum.
- h. Pengembangan Organisasi dan Perencanaan. Hasil yang diharapkan adalah: (1) terangsangnya organisasi profesi dalam bidang bahasa dan sastra untuk giat mengembangkan profesinya dan menunjang pengembangan bahasa nasional, dan (2) tersusunnya rencana induk dan pedoman-pedoman perencanaan operasional pengembangan bahasa.

Menurut rencana, untuk melaksanakan kedua proyek tersebut selama lima tahun, Pemerintah akan menyediakan biaya dari anggaran pembangunan sebanyak tiga milyar rupiah. Untuk tahun 1974/1975, proyek penelitian memperoleh biaya 43 juta rupiah dan proyek pengembangan kurang lebih 150 juta rupiah.

Pelaksana kedua proyek tersebut bukan hanya dari lingkungan Lembaga Bahasa Nasional, tetapi juga dari fakultas sastra UI, UNPAD, GAMA, ITB, IPB, UNHAS, UNSRI, IKIP, IAIN, dan lain-lain. Dengan mengerahkan sumber-sumber tenaga tersebut, diharapkan kedua proyek itu mencapai hasil sebagaimana mestinya.

Catatan:

1. Hans E. Kaulan mendefinisikan sistem sebagai "a set of things plus a set of relations".
"Systems Concept" dalam *Bunga Rampai Management Modern*, tt.
2. Sikap Sutan Takdir Alisjahbana yang membatasi diri pada bahasa sekolah sebagai sasaran pembinaan bahasa nasional pada masa lampau-mungkin juga hingga dewasa ini-adalah sikap yang tepat ("Some Planning Processes in the Development of the Indonesian-Malay Language" dalam *Can Language Be Planned*, 1971).
3. Disampaikan dalam Seminar Masalah Pembinaan Bahasa Indonesia di Universitas, 9 Juli 1973 di Jakarta.

Bahan Bacaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1974. "Program Pengembangan Bahasa dan Sastra". Jakarta.

3

**POLITIK BAHASA NASIONAL
DAN PEMBINAAN BAHASA
INDONESIA**

S. TAKDIR ALISJAHBANA

Kepada saya diminta untuk berbicara tentang politik bahasa nasional dan pembinaan bahasa Indonesia. Pengertian politik bahasa nasional menghadapkan kita kepada suatu kesulitan bahasa Indonesia yang sering kita jumpai, yaitu perkataan *nasional* itu menerangkan perkataan *politik* atau *bahasakah?* Apabila yang dimaksud *politik dari bahasa nasional* kita, maka saya akan berbicara tentang politik bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan, bahasa persatuan dan bahasa resmi. Tetapi apabila yang dimaksud *politik nasional tentang bahasa*, maka saya harus membicarakan bukan saja bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi kita, tetapi juga bahasa daerah dan dialek, malahan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa asing yang lain, berhubungan dengan kedudukannya dalam perguruan kita, maupun dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan kita. Pada pikiran saya yang diminta kepada saya adalah anggapan yang kedua, sedangkan pada akhir uraian ini nanti saya mendapat kesempatan pula untuk membicarakan politik bahasa Indonesia dalam hubungan dengan pembinaannya.

Bahwa kita di Indonesia perlu menjalankan suatu politik bahasa sudah jelas oleh karena seperti kita sekalian tahu, daerah Indonesia yang melintang sepertujuh dari lingkaran ekuator dan yang dibagi oleh lautan dalam beribu-ribu pulau dan oleh pegunungan dalam beribu-ribu lembah dan dataran, sejak dari semula telah selayaknya mempunyai jumlah bahasa dan dialek yang sangat banyak. Meskipun demikian, sebagian yang terbesar dari beratus-ratus bahasa dan dialek itu masuk satu rumpun, yaitu rumpun bahasa-bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa Melayu dalam arti yang luas, yang sebagian pula dari rumpun yang lebih besar yang dinamakan bahasa-bahasa Austronesia atau bahasa-bahasa Melayu-Polinesia. Terhadap bahasa yang beratus-ratus jumlahnya itu tentulah bangsa Indonesia dan teristimewa pemerintahnya mesti mempunyai suatu sikap, malahan suatu kebijaksanaan politik, yang akan terbayang dalam usaha dan uang yang diberikan kepada usaha tentang bahasa-bahasa itu satu per satu. Oleh karena bahasa yang beratus-ratus jumlahnya itu tidak sama besarnya, dari bahasa Jawa yang kira-kira lima puluh juta jumlah pemakainya sampai kepada bahasa di pusat Sulawesi atau Irian Jaya yang hanya dipakai oleh beberapa ribu orang, pastilah sikap dan kebijaksanaan terhadap bahasa-bahasa itu tak mungkin sama. Dalam hal ini mesti kita ingatkan juga kepentingan kebudayaan berbagai-bagai bahasa itu, bukan saja dalam arti kebudayaan *an sich* tetapi juga dalam arti sumbangan yang dapat diberikannya untuk pembentukan kebudayaan Indonesia, malahan mungkin kebudayaan dunia yang sedang tumbuh. Dalam hal ini tentu kepentingan bahasa Jawa yang mewakili kebudayaan yang tinggi jauh lebih besar daripada kepentingan suatu bahasa yang dipergunakan oleh suatu suku di suatu lembah kecil di Irian Jaya. Tetapi meski bagaimana sekalipun kecilnya lingkungan suatu bahasa, sebagai bahasa yang menjelmakan sesuatu kebudayaan, bagaimana sekalipun primitifnya,

tentu berharga untuk diketahui dan diselidiki. Tiap-tiap bahasa itu adalah penjelmaan yang unik dari suatu kebudayaan yang unik, dan untuk menumbuhkan ilmu bahasa sebagai sebagian daripada ilmu kebudayaan yang di zaman kita masih jauh dari sempurna itu, tiap-tiap bahasa perlu dipelajari, dianalisa, dipahami dan dilukiskan secara ilmu atas keunikannya dan tentu juga kesamaannya dengan bahasa-bahasa yang lain. Tentang hal ini sikap ilmu tak boleh tidak mesti objektif, segala bahasa sebagai bahasa, yaitu penjelmaan budi dan budaya manusia, sama-sama berharga.

Tetapi bagi kita jelaslah bahwa untuk menyelidiki segala bahasa yang ada di kepulauan Indonesia ini kita bukan saja tak cukup mempunyai uang, tetapi juga tak dapat menyediakan tenaga untuk melakukannya. Demikian politik bahasa yang berhubungan dengan kepentingan penyelidikan bahasa secara ilmu di negeri kita tak boleh tidak mesti bersifat sangat terbatas. Kita telah boleh bergirang hati, apabila kita cukup mempunyai uang dan tenaga untuk menyelidiki dan melukiskan bahasa-bahasa yang penting, dan terpaksa membiarkan bahasa-bahasa yang kecil dan terpencil lenyap dalam arus pergaulan modern, mungkin sebelum kita dapat menyelidiki dan melukiskannya. Dalam hubungan ini tak boleh tidak kita mesti bersikap liberal, malahan berterima kasih pada ahli-ahli dan penyelidik-penyelidik dari luar negeri yang sanggup melakukan penyelidikan yang tak dapat kita lakukan sendiri, yaitu selama penyelidikan itu dilakukan atas dasar dan menurut metode ilmu dan tidak hanya sebagai topeng untuk tujuan-tujuan yang lain.

Sementara itu, seperti kita ketahui, untuk mempelajari sepuluh atau lima belas dari beratus-ratus bahasa di Indonesia ini, kita sudah kekurangan uang dan tenaga sehingga sampai sekarang sebagian terbesar pekerjaan itu boleh dikatakan terbengkalai. Bantuan dari pihak Belanda yang membantu melatih dan mengongkosi latihan dan usaha penyelidikan bahasa-bahasa daerah yang dilakukan beberapa tahun yang akhir-akhir ini mesti dihargai dari jurusan itu, dan kita sesungguhnya berharap supaya dalam waktu yang pendek kita bukan hanya mendapat panen kamus dan tata bahasa yang deskriptif tentang bahasa-bahasa itu, tetapi juga terjemahan tentang sastra, deskripsi seni, adat-istiadat, cara hidup, agama, pemikiran, pendeknya seluruh kebudayaan yang empunya bahasa itu. Hal yang akhir ini pasti merupakan sumbangan yang berharga bagi kebudayaan Indonesia dan malahan juga bagi kebudayaan dunia, yang di segala penjuru mencari bahan untuk pertumbuhannya yang tak mungkin dapat ditahan pada tingkat kesatuan dan rapatnya pergaulan dan perhubungan dunia yang makin kecil dewasa ini. Mungkin ada kebenarannya ucapan Prof. Dr. A. Teeuw bulan Juli yang lalu di Jakarta bahwa pengertian tentang sastra Indonesia akan dapat menjadi bahan dalam pertumbuhan pengertian sastra di abad kita yang dapat dikatakan abad *Umwertung aller Werte*, abad perubahan segala nilai, dan menghendaki definisi-definisi yang

baru untuk bermacam-macam konsep dan pengertian.

Adalah karena banyaknya jumlah bahasa itu, yang meskipun berasal dari satu rumpun bahasa tetapi sesamanya sangat besar bedanya, maka dalam sejarah timbul keperluan suatu bahasa yang sekadarnya dapat dipakai dalam perhubungan perdagangan, dalam perhubungan diplomasi dan lain-lain antara berbagai-bagai golongan bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa sendiri. Seperti kita ketahui, bahasa yang menjadi bahasa perhubungan atau *lingua franca* selama berabad-abad di daerah Asia Tenggara ini adalah sejenis bahasa Melayu. Demikian sejak dari semula bahasa Melayu, yang bukan bahasa yang terbesar dan bukan pula bahasa yang terkaya di kepulauan ini, mempunyai kedudukan yang istimewa di tengah-tengah bahasa yang beratus-ratus itu. Kita sudah tahu bahwa kedudukan yang istimewa bahasa Melayu itu pertama sekali disebabkan oleh kedudukan geografis yang istimewa tempat kediaman bangsa Melayu itu pada kedua belah pihak selat Melaka, yang menjadi saluran perhubungan dan perdagangan yang terpenting antara barat dan timur di Asia Tenggara, di sisi sifat bangsa Melayu yang gelisah, suka merantau. Kemudian penyebarannya dikuatkan oleh pula keadaan politik kekuasaan Sriwijaya, Aceh dan Melaka yang menguasai Selat Melaka itu. Agama Islam yang didukung oleh saudagar, agama Kristen dan Katolik yang menembus ke daerah-daerah yang terpencil, dan penjajahan Belanda dan Jepang membantu perkembangan bahasa Melayu. Dilihat dari jurusan ini pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, bahasa kebangsaan dan bahasa resmi di Indonesia, dan kemudian juga di Malaysia, adalah kelanjutan yang sewajarnya dari kedudukan bahasa Melayu sebagai *lingua franca*, yaitu bahasa perdagangan, bahasa administrasi dan politik, dan bahasa agama. Dengan pengangkatannya menjadi bahasa Indonesia itu, kedudukannya yang berabad-abad itu dikukuhkan dan diresmikan. Hal ini tidak boleh tidak mempunyai suatu konsekuensi, bukan hanya terhadap bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia itu, tetapi juga pada umumnya terhadap segala bahasa yang lain di kepulauan Indonesia.

Pada tempatnya kita bertanya, bagaimanakah perhubungan antara bahasa-bahasa yang lain itu, yang sekarang umumnya disebut bahasa-bahasa daerah, dengan bahasa Indonesia yang disebut bahasa kebangsaan, bahasa persatuan dan bahasa resmi. Yang sangat mengkhaskan kedudukan bahasa Indonesia di tengah-tengah bahasa-bahasa daerah itu bukanlah soal linguistik, tetapi soal yang lebih luas daripada itu, yaitu soal kebudayaan. Bahasa-bahasa daerah itu sebagian terbesar menjelmakan kebudayaan daerah yang bersifat tradisi sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan resmi dalam suasana Indonesia sebagai negara modern di tengah-tengah dunia modern mesti menjelmakan kebudayaan modern itu. Oleh karena kebudayaan modern besar sekali bedanya dari kebudayaan pramodern Indonesia seperti terjelma

dalam bahasa-bahasa daerah yang banyak itu, tak boleh tidak perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah itu bertambah lama akan bertambah besar.

Suasana kebudayaan modern yang berbeda benar dari suasana kebudayaan daerah yang belum modern jelas mengenai suasana hukum dan administrasi kenegaraan dan terutama mengenai segala sesuatu yang menjelmakan unsur progresif kebudayaan modern, yaitu ilmu, teknologi, dan ekonomi yang melingkungi universitas, bank, dan pabrik. Pada umumnya kita dapat berkata bahwa dalam kebudayaan modern itu berkuasa rasio, inisiatif, dan perhitungan yang nyata. Sebaliknya, suasana bahasa daerah sebagai suasana lanjutan kebudayaan lama yang dikuasai oleh perasaan, intuisi, fantasi dan ketenangan adalah mengenai kehidupan kekeluargaan yang mesra, kehidupan kesenian, dan kehidupan agama yang menguasai suasana kebudayaan yang lama. Perbedaan suasana ini makin lama akan makin besar sehingga pada suatu ketika tentang konsep-konsep dan kata-katanya bahasa Indonesia sebagai suatu bahasa modern akan lebih dekat kepada bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan lain-lain, karena sama-sama menjelmakan kebudayaan modern. Mungkin sekali hal ini tidak akan terbatas pada kata-kata dan pengertian yang kita sebut "istilah" sekarang, tetapi sedikit-banyaknya akan berpengaruh juga kepada sintaksis dan malahan tata bahasa, oleh karena suasana dan cara berpikir kebudayaan modern berbeda dari kebudayaan tradisi. Yang akhir ini telah jelas benar apabila kita bandingkan sastra Indonesia modern dengan sastra Melayu, Jawa, Sunda lama, dan lain-lain. Sampai sekarang revolusi puisi individu yang dilakukan oleh Chairil Anwar ataupun Rendra dalam bahasa Indonesia masih belum menjelma dalam bahasa Jawa atau Minangkabau, atau baru hanya kabur-kabur kelihatan. Hal ini bukan berarti bahwa dalam segala lapangan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern akan berbeda dari atau bertentangan dengan bahasa daerah. Di beberapa lapangan pergaulan, seperti dalam percakapan sehari-hari yang lebih mesra antara orang-orang dalam lingkungan yang kecil, bahasa Indonesia dan bahasa daerah akan bercampur-aduk. Bahasa daerah akan dipengaruhi bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia banyak akan menyerap kata-kata dan ungkapan-ungkapan bahasa daerah.

Yang jelas ialah bahwa dengan pengangkatan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan, bahasa persatuan dan bahasa resmi, bagi bahasa-bahasa daerah tertutuplah kemungkinan akan menjadi bahasa modern pula yang sepenuhnya-penuhnya dipakai dalam kehidupan administrasi dan ketatanegaraan modern, dalam universitas dan bank. Sejalan dengan ini, nampak kepada kita bahwa kedudukan bahasa daerah di sekolah-sekolah di daerah, yang hanya menjadi bahasa pengantar selama beberapa tahun yang pertama, lambat laun diganti oleh bahasa Indonesia.

Dengan membandingkan kedudukan bahasa daerah yang terbesar seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Madura dengan kedudukan bahasa Indonesia di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, jelaslah bagi kita politik bahasa yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak kita merdeka. Dibandingkan dengan kedudukan bahasa Indonesia yang makin lama makin penting dalam kehidupan modern bangsa kita, bahasa daerah sangat dikebelakangkan. Dilihat dari jurusan ini keluh kesah tentang keterbelakangan bahasa daerah dan terabainya bahasa daerah telah pada tempatnya, meskipun tak ada pilihan yang lain. Dalam politik bahasa yang serupa ini, yang telah memutuskan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar, pasal 36, menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi satu-satunya, yang menguasai kehidupan modern dalam urusan kenegaraan dan administrasi, dalam pendidikan, dalam politik, dalam ekonomi, yang dapat kita kemukakan hanyalah hingga manakah bahasa-bahasa daerah yang banyak dan sering amat kaya itu dapat menyumbang kepada bahasa Indonesia dan bersama-sama dengan itu kepada kebudayaan Indonesia modern. Penyelidikan dan pelukisan bahasa-bahasa daerah itu dengan objektif, seperti sudah dikatakan, adalah suatu sumbangan yang besar bagi ilmu bahasa, yang besar artinya baik bagi penyelidikan masyarakat dan kebudayaan maupun bagi penyelidikan logika dan jiwa manusia. Tetapi, selain daripada penyelidikan bahasa yang objektif ini, bahasa daerah yang menjelmakan kebudayaan tradisi kita turun-temurun, banyak mengandung unsur kebudayaan turun-temurun yang bersifat ekspresif, yaitu yang dikuasai oleh perasaan, intuisi, dan fantasi. Kita sekalian tahu bahwa bangsa Indonesia masuk ke dalam dunia modern dan mencerna unsur-unsur kebudayaan modern ketika masyarakat dan kebudayaan modern itu mengalami krisis justru karena sifat-sifat kemodernannya yang dikuasai oleh rasio, individualisme, dan keduniaan. Kedudukan rasio yang terlampau kuat dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan telah mengancam membuat masyarakat dan kebudayaan modern menjadi kering, kaku dan kasar; individualisme membuat perhubungan sesama manusia kehilangan kemesraan, kerukunan dan tolong-menolong, dan menjadi terpecah-pecah dan penuh kesepian pribadi. Kehidupan dan cita-cita yang berlebih-lebihan akan harta dan nilai keduniaan membuat suasana masyarakat dingin berhitung, malahan menimbulkan persaingan yang sering melampaui batas kemanusiaan. Dalam krisis ini, yang makin lama makin meluas, terutama angkatan muda di seluruh dunia mulai mencari nilai-nilai modern. Dalam hal ini kebudayaan Indonesia yang lama, seperti yang masih banyak dijelmakan oleh bahasa-bahasa daerah dalam rumusan nilai-nilai kerohanian dan kesusilaan, dapat memberi sumbangan. Untuk kekayaan rohani yang banyak tersimpan dalam kebudayaan tradisi dan yang mungkin menjadi sumber inspirasi dan teladan baik bagi kebudayaan Indonesia maupun bagi dunia modern yang sedang tumbuh, tak dapat kita memaksakan pelajaran bahasa daerah lebih dari yang

diberikan sekarang. Jalan yang sebaik-baiknya untuk memakai kekayaan tradisi itu ialah menterjemahkan sebanyak mungkin segala ciptaan dan pikiran yang berharga dari bahasa-bahasa daerah itu ke dalam bahasa Indonesia, malahan sering juga ke dalam bahasa Inggris.

Selain daripada itu, dalam perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern, sering juga bahasa Indonesia dapat memakai kata-kata daerah untuk nama-nama benda dan perbuatan, baik dalam hubungan memperkayanya dengan pengertian-pengertian kebudayaan tradisi maupun dalam penyesuaiannya akan dunia modern. Kita sekalian tahu bahwa dalam istilah bahasa Indonesia modern banyak terdapat kata-kata yang berasal dari bahasa daerah: *keterampilan*, *penataran*, *penerapan*, *otot*, dan lain-lain. Akhirnya bukan hanya dalam seni tari, musik, ukiran, perpatungan, dan lain-lain seni Indonesia modern banyak dapat mengambil dan belajar dari seni tradisi, tetapi-seperti sudah saya nyatakan selama berpuluh tahun--dalam hal sastra pun penulis-penulis modern dapat belajar kepada pujangga-pujangga lama tentang ketajamannya memandang alam, kecakapannya membuat lambang-lambang dan ungkapan-ungkapan dan keterampilannya memainkan bunyi dan irama.

Sesungguhnya masih banyak yang harus kita katakan tentang bahasa daerah untuk kepentingan ilmu dan kebudayaan modern yang sedang tumbuh di Indonesia, tetapi tak dapat disangkal bahwa pekerjaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang terpenting adalah membina bahasa Indonesia supaya bahasa itu dapat menjadi alat bangsa Indonesia dalam perlombaan di dunia modern dengan bangsa-bangsa yang lain. Bahasa Indonesia mesti menjadi pusat perhatian dan usaha karena kepadanya bergantung kemajuan pikiran, masyarakat dan kebudayaan Indonesia modern. Nanti saya akan kembali kepada soal itu.

Selain daripada bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan, bahasa persatuan dan bahasa resmi, dan bahasa-bahasa daerah yang banyak jumlahnya dan beraneka ragam kedudukannya dan sifat kebudayaannya, politik bahasa di negara kita menghadapi juga soal-soal bahasa asing, yang sangat penting baik bagi perkembangan kebudayaan Indonesia maupun bagi perhubungan bangsa Indonesia dengan dunia luar.

Dalam makin bersatunya dunia sekarang oleh kecepatan lalu-lintas dan komunikasi, tidak boleh tidak bangsa Indonesia perlu akan bahasa yang dapat dipakainya dalam berhubungan dengan dunia luar. Dalam keadaan seperti sekarang ini bagi bangsa Indonesia bahasa itu jelas bahasa Inggris. Dengan terhentinya penjajahan Belanda kedudukan bahasa Belanda sebagai bahasa kebudayaan modern di Indonesia telah amat berkurang, dan boleh dikatakan diganti oleh bahasa Inggris. Kita harus girang menyambut pergantian ini

karena bahasa Inggris adalah bahasa yang lebih besar dan kaya, yang dapat dipakai oleh bahasa Indonesia yang sekarang terbelakang untuk mengangkat dirinya ke tingkat internasional seperti dicita-citakannya.

Sementara itu apabila bangsa Indonesia menghendaki kemajuan dunia modern merata kepada rakyatnya, seperti kelihatan kepada kita di negara Jepang atau Eropa Barat, maka tak boleh tidak bahasa Indonesia mesti dikembangkan ke tingkat bahasa Inggris sehingga keperluan akan bahasa Inggris bagi rakyat yang banyak yang tidak langsung berhubungan dengan luar negeri tetap sangat terbatas. Kita tak dapat mengharapkan segala orang yang dalam pekerjaannya menghendaki alat-alat dan cara bekerja yang modern mesti pandai bahasa Inggris. Kalau demikian kedudukan bahasa Indonesia tak lebih dari bahasa pergaulan semata, yang tidak cukup memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada bangsa Indonesia. Keadaan yang sangat menyedihkan dewasa ini pada sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, dan sejajar dengan itu pada lapisan atas dan terpelajar bangsa Indonesia, ialah bahwa hanya dengan bahasa Inggris golongan itu dapat mencapai kemajuan ilmu, teknologi, dan ekonomi. Mahasiswa kita yang tidak atau kurang pandai bahasa Inggris hanya mungkin mendapat ilmu sejauh diktat dan kuliah yang diperolehnya. Jumlah buku-buku bahasa Inggris yang sangat terbatas di negeri ini pun tak dapat dimanfaatkannya. Dalam hubungan ini untuk kemajuan masyarakat dan kebudayaan yang sesungguhnya, jalan yang dipilih oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia semestinya bukan pertama sekali meluaskan dan mengintensifkan pelajaran bahasa Inggris, tetapi *menyempurkan bahasa Indonesia* dan melengkapinya dengan buku, majalah, dan lain-lain, yang menjadi syarat mutlak kehidupan ilmu dan kebudayaan modern. Harus dijaga supaya bahasa Inggris jangan menjadi bahasa yang pertama dan terutama di negeri ini, sedangkan bahasa Indonesia mundur kembali ke tingkat yang rendah seperti di zaman Belanda. Hal ini tentu menentukan apa yang diajarkan tentang bahasa Inggris dan bagaimana mengajarkannya kepada bangsa Indonesia. Pada pikiran saya, pada tingkat SMA malahan sampai ke universitas, mesti dipentingkan penguasaan bahasa Inggris yang pasif, sedangkan pengetahuan yang aktif itu hanya diperlukan bagi golongan yang langsung berhubungan dan berkepentingan dengan luar negeri.

Tentulah selain dari bahasa Inggris bangsa Indonesia masih akan mempelajari berbagai-bagai bahasa asing yang lain, karena pentingnya dilihat dari jurusan ilmu ataupun ekonomi atau oleh karena perhubungan atau pergaulan yang rapat dengan bangsa Indonesia karena letaknya yang dekat. Dalam keadaan yang seakrang ini bangsa Indonesia banyak mempelajari bahasa Prancis dan Jerman tetapi mungkin di masa yang akan datang keperluan akan bahasa Rusia, Cina dan Jepang bertambah lama bertambah

penting. Sebagai negara Islam, dalam arti negara yang sebagian terbesar penduduknya beragama Islam, tentu penting pula kedudukan bahasa Arab. Berhubung dengan ini saya ingin mengatakan bahwa penguasaan yang sungguh-sungguh tentang bahasa Arab sehingga dapat dipakai untuk mempelajari karangan ahli-ahli bahasa Arab dari zaman yang lampau dan zaman sekarang, jarang sekali tersua. Kalau bangsa Indonesia hendak berpengaruh dalam perkembangan agama Islam dalam dunia modern sesuai dengan jumlah penganutnya yang besar, maka tak dapat tidak penguasaan bahasa Arab oleh ahli-ahli agama mesti lebih luas dan dalam dari dewasa ini.

Bahasa yang penting juga untuk perkembangan kebudayaan Indonesia ialah bahasa Sangsekerta dan Latin. Pengetahuan bahasa Sangsekerta perlu untuk mengetahui latar belakang dan pengaruh kebudayaan India kepada kebudayaan Indonesia, terutama sekali di Bali dan di Pulau Jawa. Selain dari itu, tak dapat disangkal bahwa kebudayaan India kuno adalah salah satu sumber kehidupan agama dan pemikiran yang dalam dunia modern ini masih amat besar pengaruhnya. Pengetahuan bahasa Latin akan makin lama makin penting, oleh karena bahasa itu menjadi latar belakang daripada konsep-konsep kebudayaan modern seperti yang berkuasa di dunia dan yang disertai oleh bangsa Indonesia. Ilmu kedokteran, biologi, dan lain-lain masih banyak memerlukan bahasa Latin. Akhirnya tak boleh kita lupakan bahasa Belanda, bahasa yang sejalan dengan kekuasaan bangsa Belanda kira-kira tiga ratus tahun di negeri kita. Sejarah dan hukum bangsa kita dan segala macam ilmu tentang negara kita tak dapat dipelajari dengan tidak mengetahui bahasa Belanda. Pada waktu sekarang, ketika masih banyak orang Indonesia yang pandai berbahasa Belanda, kepandaian bahasa Belanda masih merupakan suatu ciri kecendekiawanan yang tak dapat diabaikan di negeri kita.

Akhirnya tentulah lambat laun seperti di negara-negara yang telah maju sekarang ini akan tiba masanya ahli-ahli Indonesia, baik karena minatnya maupun karena pekerjaannya, akan tertarik kepada bahasa-bahasa lain di dunia yang tak langsung berpengaruh kepada masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Seperti bangsa Jerman, Inggris, Amerika, dan lain-lain mempunyai ahli-ahlinya tentang hampir semua bahasa di dunia, bangsa Indonesia pun kalau kemajuan di Indonesia berjalan seperti yang kita harapkan, di masa yang akan datang akan mempunyai ahli-ahli tentang bahasa Afrika, Eskimo, dan lain-lain, tetapi pengetahuan tentang bahasa-bahasa yang demikian tak usahlah kita masukkan dalam politik bahasa kita dewasa ini.

Dalam uraian tentang politik bahasa dewasa ini telah saya tunjukkan dengan nyata bahwa politik bahasa kita harus berporoskan politik kita tentang bahasa Indonesia oleh karena bukan saja bahasa Indonesia yang menyatukan bangsa Indonesia, dan bukan saja oleh karena bahasa itu adalah bahasa resmi negara kita, tetapi terutama sekali oleh karena bahasa itu bahasa

modern kita sekarang dan dimasa yang akan datang, Yang dimaksud dengan bahasa modern di sini adalah bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Perancis, dan bahasa Rusia, yang sepenuh-penuhnya menjelmakan sikap dan pemandangan hidup manusia modern dalam kebudayaannya yang dikuasai oleh nilai-nilai ilmu dan ekonomi yang melahirkan teknologi. Meskipun bahasa-bahasa modern yang banyak itu dilihat dari jurusan linguistik besar bedanya, seperti bahasa Jepang, bahasa Rusia, dan bahasa Prancis, meskipun anggapan tentang yang dinamakan masyarakat dan kebudayaan modern itu mungkin berbeda-beda seperti di Amerika Serikat dan di Rusia, dan meskipun dalam perkembangan ilmu, ekonomi, dan teknologi tekanan kemajuan kebudayaan-kebudayaan modern itu berbeda-beda, kesamaan di antara konsep-konsep dan cara-cara berpikir yang dikuasai oleh kerasionalan ilmu dan teknologi dan keefisienan ekonomi amat besar, apalagi jika dibandingkan dengan kebudayaan-kebudayaan yang dianggap pramodern.

Dilihat dari definisi bahasa dan kebudayaan modern seperti ini jelaslah bahwa kebudayaan Indonesia yang modern sekarang dan demikian juga bahasanya belum sampai ke tingkat kemodernan negara-negara yang maju seperti disebut di atas, atau dengan kata yang lain: kita di Indonesia masih terkebelakang. Belum sampainya ke tingkat kemajuan seperti bahasa Inggris, Rusia, Jepang, Jerman dan lain-lain itu menyebabkan kenyataan bahwa politik bahasa dewasa ini kita mesti berputar sekitar bahasa Indonesia karena kepada kesempurnaan bahasa Indonesia yang menjadi alat pikiran dan alat perhubungan bangsa Indonesia itu bergantung kemajuan bangsa Indonesia dalam dunia modern. Dalam hubungan keterbelakangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia, pembinaan bahasa Indonesia itu hanya sebagian daripada pembinaan masyarakat dan kebudayaan modern Indonesia, dan pembinaannya mestilah sejalan dengan pembinaan bagian-bagian masyarakat dan kebudayaan yang lain.

Sudah sering saya katakan dan di sini hendak saya ulang kembali bahwa dilihat dari jurusan perkembangan dan perlombaan dalam sejarah, keterbelakangan kita itu memberi kesempatan yang baik kepada kita untuk dari semula membina bahasa kita dengan memakai pengetahuan ilmu bahasa, ilmu masyarakat, ilmu kebudayaan, malahan juga ilmu jiwa dan ilmu logika, dan dengan demikian berusaha menjadikannya bahasa yang lebih baik, yaitu lebih logis dan efisien untuk masyarakat dan kebudayaan modern dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan lain-lain yang sekarang telah tua.

Usaha pembinaan bahasa Indonesia itu adalah usaha pemodernan, penyetandaran dan penyiapan bacaan yang sesuai dengan keperluan masyarakat modern Indonesia. Dalam hubungan uraian ini tentulah usaha pemodernan adalah yang terpenting. Usaha penyetandaran dan penyiapan

bacaan mesti dianggap sebagai alat untuk melakukan usaha pemodernan itu.

Pada hakekatnya tiap-tiap bahasa adalah alat perhubungan, pengucapan dan pemikiran yang terbaik dalam lingkungan masyarakat dan kebudayaan yang empunya bahasa itu. Dalam hubungan inilah orang berkata bahwa bahasa adalah jiwa bangsa, dan dilihat dari jurusan ini bahasa yang bagaimana sekalipun primitifnya sama kedudukannya dan kesempurnaannya dalam hubungan kebudayaannya, jika dibandingkan dengan bahasa yang bagaimana sekalipun majunya. Demikian perubahan bangsa Indonesia dari kebudayaan yang pramodern, yaitu prakemajuan ilmu, ekonomi, dan teknologi, sejarah modern menjadi bangsa yang hidup dalam kebudayaan modern menghendaki perubahan yang sangat besar tentang bahasa Indonesia, seperti kita alami setiap hari pada perguruan tinggi, di lingkungan perundang-undangan, pada administrasi pemerintah dan sebagainya. Bukan saja benda-benda yang nyata dan perbuatan-perbuatan dalam kebudayaan modern sangat banyak yang berbeda dari kebudayaan kita yang lama, tetapi dalam banyak hal cara berpikir kita pun mesti berubah bersama-sama dengan perubahan tekanan dalam nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup. Untuk sekaliannya ini bukan saja diperlukan banyak kata-kata untuk benda-benda dan perbuatan-perbuatan yang tak ada dalam kebudayaan kita yang lama, tetapi kehidupan kita pun menghendaki juga konsep-konsep yang berbeda. Perasaan kekurangan kata-kata, keluh-kesah tentang susah merumuskan sesuatu pengertian modern dalam bahasa Indonesia, dan teristimewa kesulitan yang amat besar yang dialami oleh segala orang yang bekerja dalam lapangan terjemahan sekarang ini, adalah bukti bahwa masih banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan untuk mendapat suatu bahasa Indonesia yang sesungguhnya merupakan alat pergaulan, alat pengucapan, dan alat berpikir dalam kebudayaan Indonesia yang modern.

Dalam hubungan inilah tak boleh tidak pekerjaan yang terpenting yang mesti dilakukan oleh Lembaga Bahasa Nasional adalah menentukan istilah-istilah modern di sisi ungkapan-ungkapan dan rumusan-rumusan yang sejalan dengan konsep-konsep yang dijemakan oleh istilah-istilah itu. Pekerjaan ini jangan sekali-kali dianggap enteng dan akan dapat dilakukan oleh Lembaga Bahasa Nasional sendiri, Kalau pekerjaan Lembaga Bahasa Nasional sesungguhnya akan berhasil, maka ia mesti mengikutsertakan masyarakat seluas mungkin. Sekalian jabatan, lembaga, cabang ilmu, perusahaan dan lain-lain di seluruh Indonesia mesti menyertai pekerjaan itu sebab kebudayaan modern dengan ilmu, ekonomi, dan teknologinya meresapi seluruh kehidupan masyarakat dan kebudayaan itu sehingga tiap-tiap orang yang bekerja di lapangan yang berhubungan dengan kebudayaan modern berkewajiban lambat laun membentuk bahasa Indonesia modern dalam lingkungan pekerjaannya. Sering sekali mereka yang demikian itu sendiri mesti kreatif dalam

lapangannya, menciptakan kata-kata yang diperlukannya, bukan saja oleh karena pusat untuk bertanya terlampau jauh dan terlampau sibuk tetapi juga oleh karena mereka sendirilah yang paling dapat merasakan dan memikirkan pengertian-pengertian yang diperlukan mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Dilihat dari jurusan ini tugas Lembaga Bahasa Nasional mungkin rupanya lebih enteng, tetapi sebaliknya jauh lebih penting dan asasi, oleh karena ia mesti berusaha meletakkan dasar, menentukan asas-asas dan memberi petunjuk-petunjuk yang jelas kepada segala orang yang terlibat dalam pembentukan istilah. Pekerjaan pemodernan bahasa Indonesia itu mesti bersistem dan berintegrasi, kalau usaha perancangan dan pembinaan yang kita lakukan diharapkan menghasilkan bahasa yang sebaik-baiknya di zaman kita. Di sisi pekerjaan ini tentulah terdapat pekerjaan membandingkan, mengkoordinasi, untuk akhirnya memutuskan kata mana yang datang dari segala penjuru kepada Lembaga Bahasa Nasional itu akan dipakai sebagai kata istilah atau kata modern yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, pekerjaan Lembaga Bahasa Nasional itu lebih menyeluruh, yang menghendaki bukan terutama pengetahuan tentang detail yang kecil tetapi hubungan keseluruhannya dalam suatu sistem ilmu dan kebudayaan. Untuk dengan cepat mempunyai pandangan yang menyeluruh dan mengambil keputusan berdasarkan keseluruhan itu, tentulah sebaik-baiknya dipakai bantuan komputer yang mengumpulkan segala kata, baik asing maupun Indonesia, yang terlibat dalam pembentukan istilah itu di seluruh Indonesia. Sebelum komputer yang demikian itu ada, tentulah sistem kartu kata-kata dapat membantu sekadarnya, dan mudah-mudahan kursus-kursus penataran leksikografi di Tugu baru-baru ini dapat membantu dalam hal ini dan menghubungkannya sekali dengan kamus-kamus yang akan disiapkan.

Telah jelas bahwa pemodernan bahasa Indonesia itu bukan hanya mengenai konsep-konsep yang terjelma dalam kata-kata, tetapi juga mengenai aturan pembentukan kata-kata dan jalan kalimat, sebab kata-kata itu akhirnya mesti tersusun dalam jalan pikiran yang berbeda dari jalan pikiran dalam kebudayaan lama. Apabila kita membandingkan bahasa Indonesia sekarang dengan bahasa **Hang Tuah** beberapa ratus tahun yang lalu, jelaslah apa yang saya maksud. Di sisi itu bahasa ilmu yang menjadi ciri yang penting dari kebudayaan modern kita menghendaki ketelitian dan kerasionalan yang berbeda dari keindahan lambang dan bunyi bahasa yang lama. Suatu contoh: pertumpukan ajektif atau kata keadaan dalam bahasa modern sering menghendaki susunan kata yang lain supaya tidak menimbulkan salah faham tentang kata-kata mana yang diterangkan oleh adjektif itu. Dalam memakai awalan dan akhiran atau morfem kelihatan kepada kita pergeseran dalam bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan bahasa Melayu yang lama. Seperti tentang kata-kata, dalam pemodernan tata bahasa ini pun tugas yang

terpenting dari pimpinan pusat pembinaan bahasa Indonesia adalah membandingkan bermacam-macam kemungkinan dan memilih daripadanya yang paling logis dan sesuai dengan suasana dan cara berpikir kebudayaan modern, dan kalau mungkin juga yang paling luas dapat diterima dan dipahamkan berdasarkan sifat bahasa-bahasa Indonesia atau Melayu dalam arti yang luas.

Dengan uraian yang terakhir ini tibalah kita kepada soal penyetandaran atau pembakuan bahasa Indonesia. Soal pembakuan ini mempunyai dua aspek. Pertama, pembakuan bahasa Indonesia yang dilihat dari jurusan sosiologi berasal sebagai bahasa perhubungan antara masyarakat-masyarakat yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Seperti kita tahu, bahasa Melayu sebagai *lingua franca* amat kuat dipengaruhi oleh bahasa-bahasa daerah, tetapi setelah menjadi bahasa modern yang resmi dan bahasa perhubungan yang lebih rapat ia menghendaki keseragaman yang lebih ketat. Yang kedua, ciptaan kata-kata baru dalam suasana perkembangan kebudayaan dan bahasa Indonesia, dan kata-kata pinjaman yang banyak dicerna menjadi kata-kata Indonesia juga menghendaki penyeragaman. Demikian dalam usaha pembakuan ini pertama sekali kita hadapi pembakuan ejaan yang syukurlah sekarang ini sejak dua tahun telah berlaku di negeri ini, malahan bersama-sama dengan Malaysia sekali. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditegaskan lagi, untuk sementara kita dapat berkata bahwa ejaan Indonesia-Malaysia telah mencapai suatu tingkat penyetandaran yang berasio, juga jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa modern yang lain. Oleh karena tiap-tiap bahasa yang merupakan suatu struktur mempunyai bermacam-macam aturan tentang pemakaian kata-kata dan kalimat-kalimatnya, tak boleh tidak usaha penyetandaran itu berpusat kepada usaha menentukan tata bahasa bahasa Indonesia, dan hal itu berarti menentukan tata bahasa yang normatif. Dalam hubungan ini tata bahasa deskriptif hanya dapat memberi bahan sekadarnya kepada orang yang menulis tata bahasa normatif, Saya telah beberapa kali menulis tentang tata bahasa normatif, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, sehingga di sini cukuplah saya hanya mengemukakan beberapa asas yang harus dipakai untuk mendapat tata bahasa yang sesuai dengan keperluan kita zaman sekarang.

Pertama, tata bahasa itu mesti didasarkan atas sejumlah karangan bahasa Indonesia yang terbaik pada waktu ini, terutama prosa.

Kedua, kita mesti mempunyai pemandangan yang luas tentang bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia.

Ketiga, mesti diketahui sebanyak-banyaknya kemungkinan-kemungkinan pemakaian morfem dalam bahasa-bahasa daerah dibandingkan dengan bahasa Melayu sehingga keputusan-keputusan yang perlu diambil dalam menentukan aturan-aturan bahasa Indonesia modern mendapat dasar yang seluas-luasnya.

Keempat, kesadaran dan pengetahuan tentang pokok cara berpikir modern seperti terjelma dalam pemikiran ilmunya yang teliti, dan berhubungan dengan suasana masyarakat dan kebudayaannya sebagai keseluruhan sebab akhirnya bahasa Indonesia itu mesti menjadi bahasa modern yang menjelmakan kebudayaan modern di Indonesia.

Keputusan-keputusan yang diusahakan dalam tata bahasa normatif itu hendaklah berdasarkan rasio dan seefisien-efisiennya dengan memakai bahan-bahan yang ada dan dengan pemandangan ke masa depan bahasa Indonesia. Tak dapat disangkal bahwa tata bahasa normatif itu adalah sintesa antara kenyataan dan kemungkinan-kemungkinan yang terdapat dalam bahasa Indonesia sebagai lanjutan bahasa Melayu dan sebagai bahagian dari rumpun bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dalam arti yang luas, dengan tuntutan-tuntutan dan kecenderungan-kecenderungan cara berpikir dan suasana kebudayaan modern. Di tempat yang lain sudah saya katakan bahwa tata bahasa normatif yang akan menjadi pegangan untuk menentukan bahasa Indonesia yang benar dan yang salah terutama sekali mesti diwajibkan pada segala tingkat sekolah dan dari sana lambat laun akan menguasai seluruh masyarakat. Tata bahasa normatif itu tak boleh tidak merupakan suatu konstruksi yang diciptakan berdasarkan pengetahuan tentang masa yang silam, analisa tentang masa sekarang, dan harapan tentang masa yang akan datang.

Dalam tata bahasa normatif itu tentulah kedudukan bentuk-bentuk kata dan pembentukan kata amat penting oleh karena tiap-tiap bahasa itu terjadi dari sejumlah kata yang benar yang menjelmakan konsep-konsep kebudayaan. Dalam masa bahasa Indonesia banyak menerima kata-kata asing dan kata-kata daerah Indonesia dalam perkembangannya yang baru sebagai bahasa modern dan sebagai bahasa kesatuan Indonesia, perlulah ditetapkan bagi kata-katanya pola yang khas supaya kata-kata Indonesia mempunyai identitas sendiri dan tidak dikelirukan dengan kata-kata asing, kata daerah ataupun dialeknya. Di tempat yang lain sudah saya uraikan pikiran saya tentang pola kata-kata Indonesia sehingga cukuplah di sini saya ulang dengan ringkas garis-garis besarnya. Hendaknya dipertahankan pola suku kata Indonesia yang mudah dan bersahaja, yaitu yang hanya terjadi dari empat bentuk: V (Vokal), KV (Konsonan-Vokal), VK (Vokal-Konsonan) dan KVK (Konsonan-Vokal-Konsonan) yang dibatasi lagi dengan tak adanya *e* pepet pada suku akhir kata. Dalam mencerna kata asing, kata daerah ataupun kata dialek, kata yang diterima sebagai kata Indonesia itu hendaklah sedapat mungkin disesuaikan dengan pola kata Indonesia yang pada umumnya terjadi dari dua atau tiga suku.

Suatu aturan yang saya anggap penting juga adalah: dalam menerima kata-kata asing yang bersifat internasional sedapat-dapatnya kita pertahankan sejauh mungkin bentuk tulisannya yang bersifat internasional oleh karena

dilihat dari jurusan kebudayaan yang luas sekalian dasarnya sama dan banyak akan pengaruh-mempengaruhi. Tentulah dalam hal ini pola kata-kata Indonesia yang sudah ditentukan hendaklah dipertahankan sejauh mungkin. Dalam menentukan pola-pola kata Indonesia yang mudah ini tentu diperhitungkan juga pemakaian awalan dan akhiran yang seteratur mungkin. Sengaja saya mengatakan "seteratur mungkin" sebab bahasa bukanlah matematik. Untuk pegangan pembinaan dan pembakuan bahasa kita agaknya dapat kita rumuskan: Aturan-aturan yang kita buat hendaklah sedikit mungkin mengandung kecuali. Dan kalau mungkin kecuali yang kecil jumlahnya itu hendaklah beraturan pula.

Tak dapat ditolak bahwa zaman kita adalah zaman perancangan dan pembinaan. Dalam hal ekonomi hal itu telah jelas dan umum diterima dunia sekarang. Dengan bertambah ruwet perjalinan politik, agama, seni dan sebagainya dalam hubungan cita-cita manusia untuk masa yang akan datang, tak boleh tidak pekerjaan perancangan itu pun akan mengenai bahasa. Bukan hanya bahasa Indonesia, tetapi tak kurang juga bahasa Inggris, yang akan menjadi bahasa dunia. Dalam pekerjaan kita yang sungguh-sungguh untuk mendewasakan bahasa kita sebagai bahasa modern, tak boleh tidak kita mesti menumbuhkan ilmu perancangan dan pembinaan bahasa yang dalam dunia linguistik yang umum baru dimulai beberapa tahun yang akhir ini. Oleh karena sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia yang telah memberikan kepada kita bukan hanya kemestian tetapi juga pengalaman perancangan dan pembinaan bahasa, banyak kemungkinan--apabila tenaga berpikir dan keefisienan bekerja kita cukup besar--kita akan dapat memegang pimpinan dalam membentuk baik teori maupun praktek ilmu perancangan atau pembinaan bahasa, yang disebut juga *language engineering*, yang sangat diperlukan bukan hanya oleh bangsa-bangsa yang baru berkembang tetapi juga oleh pergaulan dunia modern yang makin lama makin rapat.

Akhirnya bahasa Indonesia yang tumbuh itu mesti lengkap dengan isinya, yaitu dalam bahasa Indonesia mesti terkandung khazanah kekayaan kebudayaan abad kedua puluh, yang dapat kita katakan melingkungi kekayaan kebudayaan manusia sepanjang zaman di seluruh dunia. Dengan kata yang lain, dalam waktu yang pendek dalam bahasa Indonesia mesti dapat dibaca segala karangan yang penting untuk perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Tentang hal ini tiada berhingga banyaknya karangan asli dan terjemahan yang harus diterbitkan dalam bahasa Indonesia, bukan hanya dari dan tentang kebudayaan-kebudayaan daerah, tetapi teristimewa dari dan tentang kebudayaan modern yang telah menjadi kebudayaan kita sendiri. Berhasil atau gagalnya kita menumbuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern bergantung kepada berhasil atau gagalnya kita memberi isi dunia modern yang selayaknya kepada bahasa kita itu. Dengan demikian, usaha

penyediaan bacaan yang lengkap dan setara dengan bahasa-bahasa modern yang lain adalah kunci dari politik perancangan dan pembinaan bahasa Indonesia.

Sebagai penutup saya ingin melukiskan perhubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah yang disebabkan oleh perkembangan dan usaha pembinaan bahasa Indonesia yang amat cepat. Pada hakekatnya dan sesungguhnya juga menurut kenyataannya, perkembangan dan pembinaan bahasa Indonesia yang amat cepat itu besar sekali pengaruhnya atas bahasa-bahasa daerah yang tidak mengalami perkembangan dan pembinaan seperti bahasa Indonesia. Kata-kata istilah dan kata-kata modern sehari-hari bahasa Indonesia banyak sekali yang diterima oleh bahasa-bahasa daerah sehingga persamaan istilah dan kata-kata modern sehari-hari dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah menjadi bertambah lama bertambah luas. Apabila kita ketahui bahwa sekarang ini kata-kata istilah saja telah mencapai jumlah lebih dari 325.000, belum lagi dihitung kata-kata modern sehari-hari, jelaslah bagi kita bagaimana cepat dan luasnya proses konvergensi antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah. Dalam hal ini hendaklah kita ingatkan juga bahwa baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa daerah banyak kata-kata lama yang lenyap oleh karena benda-benda dan perbuatan-perbuatan yang dijemakan kata-kata itu bertambah lama bertambah kurang relevan dalam kehidupan zaman kita.

Dalam pengaruh ini bukan hanya kata-kata yang diambil tetapi sering juga jalan pikiran, gaya, dan suasana modern yang menjelmakan pikiran dan kehidupan modern diterima oleh bahasa-bahasa daerah. Soal pengaruh bahasa Indonesia atas bahasa daerah dan, sebaliknya, sumbangan bahasa daerah atas pembentukan bahasa Indonesia mungkin akan menjadi lapangan penyelidikan sarjana linguistik dan kebudayaan yang sangat menarik hati.

Agaknya tak berlebih-lebihan kalau saya dalam proses tumbuhnya bahasa kesatuan dalam lingkungan bahasa daerah sebagai cabang-cabang bahasa Indonesia atau Melayu dalam arti yang luas meramalkan bahwa dalam beberapa puluh atau ratus tahun di masa yang akan datang bahasa-bahasa daerah yang serumpun itu lambat laun akan mengelilingi bahasa resmi dan kesatuan Indonesia sebagai dialek mengelilingi bahasa induknya.

Sesungguhnya proses saling pengaruh dan perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang merupakan suatu proses bahasa yang dapat dikatakan unik dalam sejarah.

4

**PENGEMBANGAN BAHASA
NASIONAL SEBAGAI UNSUR
KEBUDAYAAN NASIONAL**

KOENTJARANINGRAT

1. BAHASA SEBAGAI SAKAGURU KEBUDAYAAN

Bahasa yang mengonsepsikan seluruh isi alam pikiran manusia ke dalam lambang-lambang yang berwujud nyata merupakan unsur sakaguru dalam tiap kebudayaan. Oleh karena itu, untunglah bangsa dan negara yang sedang berkembang yang sudah mempunyai bahasa nasional. Kita bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang sudah memiliki bahasa nasional yang secara mutlak telah diakui dan dipergunakan oleh semua warga negara Indonesia. Apabila dibandingkan dengan negara-negara seperti India, Filipina, bahkan Malaysia, kita merupakan bangsa yang sangat beruntung. Hanya sayang, justru karena kita telah dikurniai dengan bahasa Indonesia kita tanpa banyak perjuangan, maka sejak lama ada sikap kurang perhatian terhadap bahasa itu. Kita menganggap bahwa bahasa Indonesia seolah-olah secara alamiah sudah ada dengan sendirinya; kita semua menganggap diri kita sendiri sudah pandai berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, hanya sedikit diantara kita yang merasakan kebutuhan untuk belajar berbahasa dengan lebih baik agar bahasa kita menjadi bahasa yang lebih indah. Hanya beberapa saja di antara kita yang berusaha keras untuk secara konsisten dan disipliner berbicara dalam bahasa Indonesia; begitu pula tak banyak di antara kita yang bercita-cita atau sanggup menganjurkan agar di antara anak-anak kita ada yang mau menjadi ahli bahasa Indonesia.

Di luar waktu kerja, di luar saat-saat mendengarkan pidato-pidato, atau di luar saat kita mengadakan pembicaraan yang bersifat resmi pada pertemuan-pertemuan kita orang Indonesia berbicara dengan menggunakan bahasa daerah, bahasa Jakarta, bahasa Belanda-Indonesia, ataupun suatu bahasa Indonesia khas yang tercampur dengan kata-kata Belanda, serta potongan-potongan kalimat bahasa Inggris. Jelaslah bahwa kalau kita semua tidak secara menyeluruh mulai lebih banyak menaruh perhatian yang serius terhadap bahasa nasional kita, maka sekalipun kita bukan ahli linguistik kita dapat melihat dengan jelas adanya terlampau banyak proses linguistik yang tidak hanya menghambat perkembangan bahasa Indonesia melainkan juga mengerosi dan merongrong eksistensinya!

Usaha untuk memperbesar perhatian kita terhadap bahasa Indonesia tidak hanya akan mengamankan eksistensinya dan mempercepat perkembangannya, tetapi oleh karena bahasa Indonesia itu merupakan unsur sakaguru kebudayaan nasional Indonesia, maka usaha tadi juga akan amat membantu perkembangan kebudayaan nasional kita itu.

2. MASALAH KEBUDAYAAN NASIONAL

Masalah kebudayaan nasional, sebenarnya masih patut tetap mendapat perhatian maksimal kita semua. Kita sering bangga bahwa ke-120 juta orang Indonesia yang menduduki Kepulauan Nusantara kita ini menunjukkan ane-

ka-warna yang besar dalam hal kebudayaan dan bahasa.

Sebaliknya, kita patut juga prihatin, mengingat adanya aneka-warna masalah yang telah mungkin akan timbul karena sifat itu. Masalah kebudayaan nasional Indonesia itu bukan hanya masalah cita-cita saja yang mengenai suatu kebudayaan kesatuan yang kita bayangkan untuk kelak kemudian hari, melainkan suatu masalah yang sangat nyata, yang mengenai soal kepribadian dan identitas kita sebagai bangsa, yang mengenai soal tujuan kita bersama untuk hidup sebagai bangsa, dan yang mengenai soal alasan dan motivasi kita untuk pada masa sekarang ini dengan sudah payah mengeluarkan tenaga ekstra untuk membangun.

Dalam *Repelita II* yaitu buku *Repelita II*, bagian III, bab 24 memang ada perhatian khusus terhadap masalah kebudayaan nasional. Kalau kita perhatikan isinya, maka bab tadi mengenai rencana-rencana program pengembangan kesenian (yang kuno, yang merupakan warisan sejarah, maupun yang daerah), pengembangan bahasa (nasional maupun daerah), dan juga ilmu pengetahuan (bukan aspek penelitiannya, melainkan soal penerbitan buku-buku dan majalah ilmiah).

Itulah kira-kira ruang lingkup kebudayaan nasional Indonesia menurut konsepsi para penyusun *Repelita II*. Sebenarnya kita perlu membedakan konsep "kebudayaan Indonesia" dari konsep "kebudayaan nasional Indonesia." Kebudayaan Indonesia itu sudah jelas adalah seluruh total isi pikiran, aktivitas dan hasil karya semua warga bangsa Indonesia dari suku bangsa mana pun juga. Apakah kebudayaan nasional Indonesia?

Menurut hemat saya, agar suatu kebudayaan nasional dapat didukung oleh sebagian besar warga sesuatu negara, maka syarat mutlak adalah bahwa kebudayaan nasional itu harus bersifat khas dan harus dapat dibanggakan oleh warga negara yang mendukungnya. Hal itu perlu, karena kebudayaan nasional harus dapat memberi identitas kepada warga negara tadi.

Sifat khas suatu kebudayaan memang hanya bisa dimanifestasikan dalam beberapa unsur yang terbatas dalam suatu kebudayaan, yaitu dalam bahasanya, dalam keseniannya (yang kuno warisan nenek moyang maupun yang kontemporer, termasuk, misalnya, gaya pakaian), dan dalam adat istiadat upacaranya (yang tradisional maupun yang baru). Sulit untuk menonjolkan sifat khas yang memberi identitas itu dalam unsur-unsur lain suatu kebudayaan. Menonjolkan sifat khas yang memberi identitas dalam sistem teknologi sulit (karena teknologi bersifat universal), juga dalam ekonominya (karena ekonomi itu harus dicocokkan dengan sistem ekonomi negara-negara maju), dalam sistem kemasyarakatannya (karena berdasarkan beberapa prinsip yang terbatas kemungkinannya), serta dalam ilmu pengetahuannya (karena ilmu harus bersifat universal, tak bisa khas, kecuali kalau ada *achievement*

yang khas, misalnya berupa penemuan baru), dan sulit juga dalam agama (karena agama adalah kehendak Tuhan; jadi dengan sengaja mengembangkan suatu agama yang khas Indonesia tidak mungkin juga).

Walaupun begitu, ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam hal mengembangkan kebudayaan nasional sesuatu negara. Aspek lain itu adalah syarat bahwa agar suatu unsur kebudayaan nasional bisa menimbulkan rasa kebanggaan pada mereka, dan sebaliknya untuk dapat menyebabkan kebanggaan bangsa mutunya pun harus tinggi.

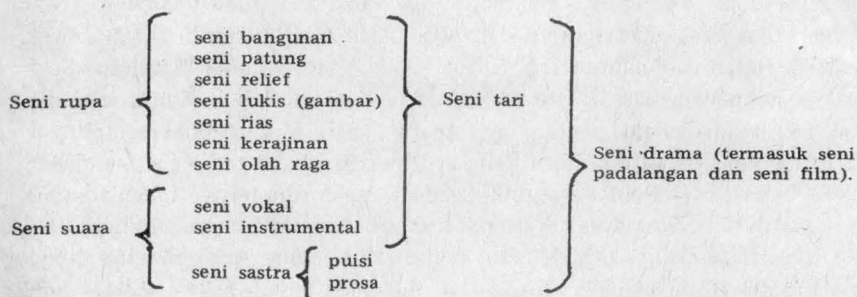
Kalau kebudayaan nasional Indonesia itu kita dasarkan atas konsepsi sifat khas dan mutu tinggi tadi, maka soal hubungan antara kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional yang sering menjadi buah perbincangan orang dari dulu pada zaman Pergerakan Nasional sampai sekarang itu menjadi tak penting lagi. Lepas dari soal daerah, kalau tiap gagasan, konsepsi atau hasil karya putra Indonesia dari suku bangsa manapun asalnya, pokoknya asal khas dan bermutu saja, sedemikian rupa sehingga sebagian besar orang Indonesia mau dan bisa mengidentifikasikan diri dan merasa bangga dengan karya tadi, maka itulah kebudayaan nasional Indonesia.

Dengan demikian, apabila ada suatu gaya pakaian wanita yang khas sifatnya tetapi toh indah sehingga kita bangga mempertontonkannya, maka itulah suatu unsur dalam kebudayaan nasional kita. Soal apakah gaya pakaian itu berasal dari kebudayaan Bugis, Minangkabau, Jawa, Bali, ataupun Maluku menjadi tidak penting lagi. Demikian juga kalau ada suatu pementasan gamelan yang khas sifat-sifatnya dan juga indah serta bermutu tinggi, maka gamelan itulah suatu unsur lagi dalam kebudayaan nasional Indonesia. Soal apakah permainan gamelan itu berasal dari kebudayaan Bali, Sunda atau daerah lain menjadi tidak penting lagi. Apabila suatu film nasional mempunyai sifat-sifat yang khas dan mutu yang sedemikian tingginya hingga mendapat sukses besar di festival-festival internasional, maka film tersebut menjadi suatu unsur dalam Kebudayaan Nasional kita. Soal apakah seniman-seniman dalam film itu adalah orang Manado, orang Jawa, orang Aceh ataupun orang Banjarmasin tidak menjadi penting lagi. Bilamana terjadi bahwa seorang ahli kimia berbangsa Indonesia menemukan suatu hal baru dalam bidang ilmiah yang khas, sedangkan hasilnya tadi demikian tinggi mutunya sehingga ahli kimia tadi mendapat hadiah Nobel, maka penemuan ilmiah tadi menjadi unsur dalam kebudayaan nasional Indonesia. Soal apakah ahli kimia tadi orang Irian, orang Lampung, orang Sunda ataupun orang keturunan Cina, menjadi tidak penting lagi. Dengan demikian kalau orkes simfoni Jakarta bisa mengembangkan sifat-sifat khas serta mencapai mutu yang tinggi, sehingga menjadi terkenal di dunia, maka bangsa Indonesia akan bangga dan sudi mengakui orkes simfoni itu tadi sebagai suatu unsur dalam kebudayaan nasional kita. Soal bahwa musik simfoni itu sebenarnya berasal dari kebudayaan

Barat dan bahwa seniman-seniman dalam orkes tersebut adalah orang-orang Sunda, Jawa, Indo atau keturunan Cinta, tidak penting lagi.

Ruang lingkup konsep kebudayaan nasional yang dibataskan kepada bahasa, kesenian, dan adat istiadat upacara yang dipakai oleh para konseptor Bab 24, Buku III *Repelita II*, mengenai rencana program-program dan proyek-proyek pengembangan kebudayaan nasional dalam bidang-bidang tersebut. Memang, para ahli perencanaan pembangunan kita telah sadar akan pentingnya hal-hal tersebut bagi suatu bangsa, karena hal-hal itu dapat membantu memberi identitas kepada para warganya, dan identitas sebagai bangsa itu mutlak perlu untuk mendorong motivasi untuk usaha pembangunan.

Peranan bahasa nasional dalam pengembangan kebudayaan nasional itu penting, karena kecuali sebagai sakaguru kebudayaan, bahasa juga mempunyai peranan utama dalam beberapa bidang kesenian penting, yaitu seni sastra dan seni drama. Untuk mendapat pengertian mengenai tempat kedua bidang khusus kesenian tadi dalam rangka ruang lingkup kesenian sebagai keseluruhan, maka dicantumkan di bawah ini bagan mengenai seluruh ruang lingkup kesenian. Masalah kebijaksanaan, politik dan pengembangan bahasa nasional itu sendiri sudah dan akan dibahas dalam lembaran-lembaran kerja yang lain. Lagi pula, masalah itu bukan lapangan keahlian saya, dan karena itu saya sekarang hanya akan mengkhususkan perhatian saya kepada masalah pengembangan bahasa nasional dalam rangka kesusastraan dan seni drama Indonesia.



3. BAHASA INDONESIA DALAM KESUSASTRAAN INDONESIA

Berdasarkan pendirian saya bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah hasil ciptaan dan karya manusia Indonesia, baik yang berada di daerah maupun di pusat, baik yang hidup dalam zaman dulu maupun dalam zaman sekarang, tetapi yang khas dan bermutu, maka yang saya anggap kesusastraan dan seni drama Indonesia bukan hanya kesusastraan dan seni drama dalam bahasa Indonesia, melainkan juga kesusastraan dan seni drama dalam bahasa daerah. Di antaranya hasil ciptaan yang mempunyai sifat yang paling khas

sehingga dapat memberi rasa kepribadian kepada kita, dan hasil ciptaan yang bermutu tinggi sehingga dapat memberi kebanggaan kepada kita akan terangkat menjadi unsur dalam kebudayaan nasional Indonesia. Di situlah tampak lebih terang lagi peranan bahasa nasional dalam hal mewujudkan kesusastraan nasional Indonesia, atau satu langkah lebih luas lagi, kebudayaan nasional Indonesia.

Seni kesusastraan Indonesia yang bersifat daerah memang ada banyak macamnya: di antaranya ada yang mempunyai sejarah tertulis yang panjang seperti seni kesusastraan Jawa, Bali, Bugis, dan Melayu, tetapi pada masa ini, seni kesusastraan daerah kontemporer belum banyak berarti. Hal itu adalah suatu pertanda bahwa kehidupan intelektual dalam kebudayaan daerah pada umumnya masih sangat berorientasi ke masa yang lampau, dan belum menunjukkan kemampuan dan potensi baru untuk menyesuaikan diri dengan suasana hidup masa kini.

Sebab keadaan itu mudah dapat kita fahami. Industrialisasi dan suasana hidup modern belum berkembang secara berarti di daerah-daerah. Kota-kota di daerah masih terlampaui bersifat kota administratif dengan golongan pegawai atau golongan priyayi sebagai kelas sosial yang dominan. Baik kelas usahawan daerah maupun kehidupan intelektual di kota-kota seperti itu masih lemah, dan karena itu masih terlampaui terpengaruh oleh gaya hidup dan mentalitas priyayi itu, yang pada umumnya masih belum mempunyai sikap mental modern dan yang karena itu masih terlampaui berorientasi kemasa yang lampau.

Walaupun kesusastraan nasional kita dalam bahasa Indonesia masih berada dalam keadaan pasang surut, hal itu toh sudah menunjukkan kemampuannya menghasilkan karya-karya bermutu yang menonjolkan sifat-sifat khas Indonesia. Cepat atau lambatnya perkembangan kebudayaan nasional menurut hemat saya tergantung kepada cepat-lambatnya perkembangan kesusastraan nasional dalam bahasa nasional. Walaupun demikian, saya berpendirian bahwa kesusastraan nasional Indonesia dalam bahasa nasional akan lebih terdorong maju apabila diimbangi oleh kesusastraan daerah kontemporer dalam bahasa daerah yang juga kuat. Kecuali penting dipandang dari sudut persaingan yang sehat, kesusastraan daerah yang lebih terorientasi ke zaman sekarang akan dapat memperkaya kesusastraan nasional, Lepas dari itu, hasil karya dalam kesusastraan daerah yang khas dan bermutu tinggi secara *an sich* dapat pula dianggap sebagai unsur dalam kebudayaan nasional untuk dibanggakan.

Seni drama, yang dapat dianggap sebagai suatu bidang kesenian perluasan seni kesusastraan, seperti yang tergambar dalam bagan pada halaman 58, mencakup segala bidang kesenian yang lain. Masalahnya sejajar dengan seni kesusastraan Indonesia. Seni drama Indonesia yang bersifat daerah banyak

macamnya menurut kebudayaan suku bangsa yang mendiami daerah yang bersangkutan. Seni drama Jawa, Bali, Lombok, Banjarmasin dan lain-lain hidup dalam berbagai bentuk, tetapi yang terpenting di antaranya adalah seni drama wayang atau seni pedalangan. Seni drama wayang di berbagai daerah tersebut di atas berorientasi ke zaman yang lampau, tetapi di samping itu juga ada, terutama di kota-kota di Jawa, beberapa bentuk seni drama yang bersifat kontemporer (ludruk, sandiwara rakyat, lenong dan lain-lain). Seperti diketahui, mutunya masih kasar, karena seni drama seperti itu biasanya merupakan tontonan bagi rakyat buruh di kota-kota. Walaupun demikian, sifatnya menarik, spontan, mempunyai fungsi sosial yang penting, dan mungkin juga bisa menonjolkan sifat-sifat kekhususan kebudayaan dan kehidupan bangsa Indonesia. Hanya saja mutunya masih perlu ditingkatkan, agar bisa kita akui sebagai kebudayaan nasional kita.

Seni drama dalam bahasa nasional sekarang sedang berkembang mencari kepribadiannya sendiri. Demikian juga halnya dengan bidang seni drama yang sekarang menjadi universal, ialah seni film. Juga seni film Indonesia sedang mencari-cari kepribadiannya, dan belum mencapai suatu kemantapan. Tekniknya pada umumnya sudah baik, tetapi dipandang dari sudut isinya belum menemukan sifat-sifat khas kehidupan masyarakat dan kebudayaan Indonesia, dan hanya dengan beberapa perkecualian yang menyolok pada umumnya masih menunjukkan mutu intelektual yang rendah.

Dalam hal membicarakan pengembangan kesusastraan Indonesia, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa daerah, yang bisa mengembangkan sifat-sifat khas dan bermutu, biasanya kita akan menyinggung soal usaha untuk meningkatkan daya kreatif para pengarang dan penyair kita.

Daya kreatif itu biasanya timbul pada para karyawan, ahli, sarjana, atau seniman dalam suatu bidang keahlian atau kesenian, yang sadar akan kekurangan dalam lingkungan atau karya mereka. Walaupun demikian, kesadaran saja belum cukup. Banyak orang sadar akan bermacam kekurangan yang ada dalam masyarakat sekitarnya, yang sadar akan berbagai kekurangan dalam pekerjaan, karya dan hasil karya mereka sendiri, tetapi toh tak berbuat apa-apa, karena menerima saja kekurangan itu, atau karena tak mampu memperbaiki kekurangan itu. Sebaliknya, kalau karyawan, ahli, sarjana atau seniman bersangkutan telah mempunyai keahlian tinggi dan memiliki mentalitas untuk selalu memperbaiki mutu karyanya, maka pada suatu ketika ia akan mencapai hasil yang belum pernah dicapai sebelumnya oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain. Dengan demikian, ia telah menciptakan hasil karya baru, atau ia telah mengadakan penemuan baru.

Daya kreatif di antara para karyawan, ahli, sarjana, atau seniman memang

hanya bisa dikembangkan melalui peningkatan mutu karya mereka dalam teknik atau konsepsinya. Walaupun demikian, pengembangan kesenian nasional tidak hanya memerlukan pengembangan mutu dan daya kreatif karyawan, ahli, sarjana dan senimannya saja, melainkan juga membutuhkan peningkatan mutu para konsumennya, yaitu berbagai golongan rakyat Indonesia yang harus menikmati hasil karya dari berbagai bidang kesenian tadi. Peningkatan mutu rakyat di sini berarti bahwa lebih banyak di antara kita orang Indonesia dari berbagai macam golongan harus meningkatkan pengetahuan umum kita, harus membiasakan diri kita untuk lebih banyak membaca dan untuk mengembangkan kebiasaan membaca kepada anak-anak kita yang akan menjadi konsumen dan pendukung kesenian dan kesusastraan nasional Indonesia di masa yang akan datang.

Sayang bahwa saran mengenai pentingnya usaha secara serius untuk meninggikan kapasitas intelektual, kebiasaan membaca, pengetahuan umum, pokoknya mutu manusia Indonesia pada umumnya, agak kurang menonjol dalam Bab 24 *Repelita II*.

5

**POLITIK BAHASA NASIONAL
DAN PENGAJARAN BAHASA**

JAZIR BURHAN

I. **A**danya ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara (UUD—1945) bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa daerah yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain) akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara karena bahasa-bahasa itu adalah sebagian dari kebudayaan (Bab XV fasal 36, dan Penjelasannya) menunjukkan bahwa kita sesungguhnya telah mempunyai politik bahasa nasional yang jelas dan tegas, jika dengan politik bahasa nasional itu—sebagaimana dirumuskan dalam pengarahannya praseminar ini—dimaksudkan sistem kebijaksanaan nasional dalam mengolah jaringan kebahasaan yang terpakai di negara kita. Berdasarkan hal itu, kami berpendapat bahwa masalah yang kita hadapi sekarang bukanlah "perencanaan" politik bahasa nasional, akan tetapi pengembangan dan pelaksanaan politik bahasa nasional yang sudah ada itu. Kami berpendapat bahwa politik bahasa nasional yang telah dinyatakan dalam UUD itu, ditinjau baik dari segi ideologi maupun dari segi praktis, sudah sejalan dengan keseluruhan pola pembangunan nasional yang dewasa ini sedang kita jalankan.

Untuk mengembangkan politik bahasa nasional yang sudah ada itu kita perlukan tafsiran resmi tentang isi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar itu. Tafsiran resmi itulah yang akan menuntun kita dalam menyusun ketentuan-ketentuan tentang kedudukan dan peranan berbagai bahasa yang dipakai di Indonesia.

Bila dengan "Bahasa Negara" dalam UUD itu dimaksudkan alat yang digunakan oleh negara (yaitu jawatan-jawatan pemerintah dan rakyat Indonesia sebagai suatu keseluruhan) untuk memberi isi kepada kebangsaan Indonesia, sebagaimana ditafsirkan oleh Tellings (1956), maka jelas predikat: *bahasa nasional*, *bahasa resmi*, *bahasa kebudayaan*, dan *bahasa pergaulan*, yang diberikan kepada bahasa Indonesia, telah tercakup di dalamnya. Dalam kamus linguistik, istilah-istilah itu mempunyai arti sebagai berikut:

Bahasa nasional adalah bahasa yang dipakai oleh suatu negara sebagai bahasa persatuan dalam lingkungan politik, sosial, dan kebudayaan. *Bahasa resmi* adalah bahasa yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan-legislatif, eksekutif dan yudikatif. *Bahasa kebudayaan* adalah bahasa yang digunakan dalam lapangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. *Bahasa pengantar* adalah bahasa yang digunakan dalam menyampaikan pelajaran di sekolah-sekolah. *Bahasa pergaulan* adalah bahasa yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari di kalangan masyarakat.

Jika memang demikian tafsirannya, maka sesungguhnya kedudukan dan peranan bahasa-bahasa yang terpakai di Indonesia sudah diatur dengan tegas. Yang belum kita lakukan adalah pelaksanaannya.

Kedudukan dan peranan bahasa-bahasa daerah telah diberi ketentuan pu-

la. Bahasa-bahasa daerah yang dipelihara dengan baik-baik oleh rakyatnya akan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu dipandang sebagai sebagian dari kebudayaan. Yang belum jelas adalah apa tafsiran resmi tentang istilah "dipelihara juga".

Kedudukan dan peranan bahasa-bahasa asing memang belum ditentukan dengan tegas, baik dalam UUD maupun dalam keputusan pemerintah. Akan tetapi bahwa bahasa asing tertentu diperlukan dalam rangka pembangunan nasional dalam artinya yang luas dapat dicari dalam tujuan dan garis kebijaksanaan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai Pola Pembangunan Nasional.

Uraian ini selanjutnya membatasi diri pada masalah pokok kertas kerja ini. Sebagaimana terbayang pada judulnya, masalah yang akan dibicarakan adalah hubungan pengajaran bahasa dalam politik pendidikan nasional dan politik bahasa nasional. Pertanyaan yang akan dicoba menjawabnya dalam uraian ini adalah, sebagai berikut:

Bahasa-bahasa mana yang harus diajarkan di sekolah-sekolah kita?

Apa tujuannya?

Bagaimana cara mengajarkannya?

Pada jenis dan tingkatan sekolah-sekolah mana diajarkan?

Kapan harus dimulai dan untuk berapa lama diajarkan?

Bagaimana kita harus mengatur program ini?

Bagaimana kita mengetahui sampai berapa jauh hasil pelaksanaan itu?

Bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk mempertinggi mutu pengajaran ini?

Masalah di atas sesungguhnya adalah masalah yang termasuk bidang pendidikan nasional, dalam hal ini: perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ditentukan oleh tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu sendiri pada hakekatnya merupakan pelaksanaan politik pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, pemecahan masalah di atas akan bertitik tolak dari tiga bidang: politik pembangunan nasional, politik pendidikan nasional, dan politik bahasa nasional.

Urutan pembicaraan seperti yang dikemukakan di atas dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa politik pembangunan nasional merupakan titik tolak dari segala kegiatan pembangunan dalam arti keseluruhannya. Politik pembangunan nasional sebagaimana yang telah digariskan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan sumber semua kebijaksanaan dalam berbagai bidang pembangunan.

II. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara itu, tujuan pembangunan nasional adalah "mewujudkan masyarakat yang adil

dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan bersatu, dalam-dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Hakekat pembangunan itu adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (*GBHN*, 1973; IIA dan IIB). Dalam Bab IIE, dikemukakan bahwa wawasan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara yang mencakup:

1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, dalam arti:
 - a. bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama;
 - b. bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahesa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya;
 - c. bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib dan sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa;
 - d. bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya;
 - e. bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan seni dan budaya dalam arti:
 - a. bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri-kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta dengan keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa;
 - b. bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi model dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi dalam

- a. bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensil maupun efektif adalah modal dan milik bersama-bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus menjadi merata di seluruh wilayah Tanah Air;
 - b. bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan kehidupan ekonominya.
4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam arti:
- a. bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara;
 - b. bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Sengaja kami mengutip pengertian wawasan nusantara ini seutuhnya agar kita mendapat gambaran yang jelas tentang arah pembangunan nasional kita.

III. Dalam politik pendidikan nasional yang kita anut ini, *pendidikan* diartikan sebagai "totalitas pengalaman yang memungkinkan individu tumbuh dan berkembang sebagai manusia perseorangan, sebagai anggota keluarga, sebagai warga masyarakat, warga negara yang warga dunia". (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1970) *Pendidikan nasional* ditasirkan sebagai "segala usaha pembinaan kepribadian dan pengembangan kemampuan manusia Indonesia seumur hidup, baik jasmaniah maupun rohaniah dalam rangka pembinaan persatuan bangsa dan perwujudan masyarakat Pancasila" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1971) Tujuan nasional adalah "membina semua warga negara menjadi manusia Pancasila yang berpribadi, berkesadaran akan Ketuhanan Yang Mahaesa, berkesadaran bermasyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitarnya. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1971).

Politik pendidikan nasional kita menekankan adanya tiga misi penting yang harus diemban oleh pendidikan nasional, yaitu *misi nasional*, *misi sosial budaya* dan *misi pembangunan dan teknologi*. Misi nasional pendidikan mencakup pembinaan mental Pancasila, pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, dan pembinaan ketahanan nasional.

Misi sosial budaya pendidikan mencakup pembinaan kebudayaan nasional, pembinaan hak-hak asasi manusia, pembinaan hidup demokrasi, dan pembinaan *rule of law*.

Misi pembangunan dan modernisasi mencakup pembinaan rasionalisasi, efisiensi dan produktivitas, dan pembinaan pengetahuan dan teknologi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1971).

Dalam dunia pendidikan sudah disadari bahwa pengajaran bahasa merupakan kunci bagi segala kegiatan pendidikan. Tujuan utama pengajaran bahasa

dalam program pendidikan modern adalah untuk mendorong kemajuan individu dan masyarakat, membantu individu hidup lebih baik dalam masyarakat. Melalui pengajaran bahasa di sekolah-sekolah murid-murid didorong menumbuhkan kemampuan berkomunikasi untuk belajar, untuk hidup bermasyarakat, dan untuk menjadi warga negara yang berguna dan produktif. Sehubungan dengan kehidupan demokrasi, pengajaran bahasa membantu tumbuhnya kemampuan murid-murid menghargai dan bekerja sama dengan orang lain dalam memecahkan berbagai persoalan. (Sowards and Scobey 1962) Usaha-usaha dalam bidang pendidikan hanya akan berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan dalam tujuan pendidikan itu bila dalam pelaksanaannya digunakan bahasa pengantar yang dikenal dan dikuasai oleh guru dan murid. Apa pun yang dipelajari manusia hasilnya akan sangat ditentukan oleh penguasaan bahasa yang dipunyainya yang digunakan dalam proses belajar itu. Dan pengabaian faktor bahasa dapat mendatangkan akibat bahwa pendidikan mengalami kegagalan, bahkan mengalami kehancuran (Kelly, 1969).

IV. Bila kita ambil tafsiran politik bahasa nasional seperti yang telah diuraikan di atas — dan jika memang benar tafsiran seperti itu — maka jaringan kebahasaan di negara kita adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjalankan fungsinya sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa ilmu dan kebudayaan nasional dan bahasa pergaulan.
2. Bahasa-bahasa daerah, sebagai bagian dari kebudayaan daerah, berfungsi sebagai bahasa pergaulan di daerahnya masing-masing, dan bahasa kebudayaan daerah yang sekaligus dipandang sebagai unsur kebudayaan nasional.
3. Bahasa-bahasa asing tertentu berperanan sebagai alat dalam membantu perkembangan ilmu dan kebudayaan nasional, dan sebagai alat komunikasi dalam hubungan-hubungan kerja sama dengan negara-negara lain dalam ilmu, kebudayaan, dan teknologi yang diperlukan dalam pembangunan bangsa.

Kenyataan yang tampak dalam masyarakat dewasa ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menjalankan fungsinya sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa ilmu dan kebudayaan nasional, dan sebagai bahasa pergaulan. Perlu kita catat bahwa belum semua fungsi ini dapat dijalankan bahasa Indonesia dengan baik. Sebagai bahasa nasional dalam hubungan politik, sosial, dan kebudayaan ia telah menjalankan tugasnya dengan baik (Kartz, 1974). Akan tetapi sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa

pengantar, sebagai bahasa ilmu dan kebudayaan, serta sebagai bahasa pergaulan nasional, masih banyak peranannya yang dilakukan oleh bahasa lain, baik bahasa-bahasa daerah maupun bahasa-bahasa asing. Dalam ilmu dan teknologi banyak peranan bahasa Indonesia yang dijalankan oleh bahasa asing. Dalam bidang pendidikan, sebagian peranannya dijalankan oleh bahasa-bahasa daerah dan bahasa-bahasa asing. Begitu pula halnya dalam fungsinya sebagai bahasa resmi dan bahasa pergaulan.

2. Bahasa-bahasa daerah sebagai bahasa kebudayaan dan bahasa pergaulan daerah tampak telah menjalankan fungsinya dengan baik. Malah bahasa-bahasa daerah telah pula mengambil alih beberapa kehidupan nasional di daerahnya, seperti dalam menjalankan administrasi pemerintahan (Asse-gaff, 1974; Suardi, 1974) dan dalam lapangan pendidikan.
3. Bahasa-bahasa asing tertentu telah membantu memperkembang ilmu dan teknologi nasional, serta dalam hubungan kerja sama dengan negara-negara asing. Di samping itu, terutama dalam dunia perguruan tinggi, dan dalam lingkungan ekonomi dan perdagangan, ia banyak pula mengambil alih fungsi bahasa nasional. Malah dalam hubungan-hubungan resmi pun kadang-kadang terlihat bahasa-bahasa asing tertentu mendesak fungsi bahasa Indonesia.

V. Berdasarkan uraian di atas marilah sekarang kita coba mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok dalam kertas kerja ini.

1. BAHASA-BAHASA YANG HARUS DIAJARKAN

Bila kita bertitik tolak dari pola pembangunan nasional, pola pendidikan nasional dan politik bahasa nasional yang telah dibicarakan pokok-pokoknya di atas, jelas bahwa bahasa-bahasa yang harus diajarkan di sekolah-sekolah adalah bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, dan bahasa-bahasa asing tertentu.

Bahasa Indonesia harus diajarkan di sekolah-sekolah oleh karena, baik secara ideologis maupun secara teknis, sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan bangsa. Wawasan nusantara yang menjadi tujuan pembangunan nasional jangka panjang sebagaimana telah digariskan dalam pola pembangunan nasional akan sukar menjadi kenyataan tanpa ada satu bahasa nasional yang kuat, yang diketahui dan dikuasai oleh seluruh anggota masyarakat, yang mampu mendukung gagasan ilmu dan kebudayaan bangsa, yang dihormati dan dirasakan sebagai identitas bangsa, oleh seluruh rakyat. Bahasa seperti ini tidak hanya akan menjadi mesin penggerak masyarakat, kebudayaan, dan kemajuan bangsa, akan tetapi juga akan selalu merupakan ramuan bagi kemajuan itu. Dalam realisasinya baik sebagai bahasa lisan maupun sebagai bahasa tulisan ia akan merupakan petunjuk tentang jaringan-jaringan antar

hubungan dalam masyarakat, peranan anggota masyarakat dalam kehidupan bersama, luasnya hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat, nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat dan lambang kebangsaan (Fishman, 1968).

Gagasan tentang masyarakat bangsa tidak akan dipahami dengan baik oleh masyarakat bila *satu* bahasa nasional yang dikenal dan dikuasai oleh seluruh anggota masyarakat, dan antara pemerintah dan masyarakat tidak ada. Negara yang mempunyai satu bahasa umum yang dikenal oleh seluruh rakyatnya akan lebih maju dalam pembangunan, dan ideologi politiknya akan lebih aman dan stabil (Fishman, 1968).

Bahasa resmi yang kurang dikenal dan kurang dimengerti (oleh rakyat) hanya akan merupakan bahasa orang berkuasa saja. Bagi mereka bahasa itu hanyalah merupakan senjata untuk memperkosa (Kritaz, 1974). Akan terasa lebih penting lagi untuk menempatkan bahasa Indonesia pada tempat yang tertinggi dalam dunia pendidikan bila kita ingat bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan jauh sebelum kemerdekaan bangsa. Bahasa ini telah berhasil mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dalam suku bangsa, bahasa dan kebudayaan menjadi satu bangsa dalam satu negara yang merdeka dan berdaulat.

Dan yang terpenting adalah bahwa tercantumnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam UUD berarti bahwa tempat yang terpenting dalam jaringan pengajaran bahasa harus diduduki oleh bahasa Indonesia, sebab segala kegiatan pembangunan yang kita lakukan sekarang landasannya adalah Pancasila dan UUD 1945 itu.

Mengenai bahasa daerah, perlu kita perhatikan kembali bunyi penjelasan UUD pasal 36. Dalam penjelasan itu disebutkan bahwa bahasa-bahasa daerah yang dipelihara oleh rakyatnya baik-baik akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara karena bahasa itu merupakan sebagian dari kebudayaan. Jelas di sini bahwa bahasa-bahasa daerah dipandang sebagai sebagian dari kebudayaan, bukan sebagai alat komunikasi dalam hubungan kehidupan nasional. Tentu tak dapat kita lupakan bahwa bantuan bahasa-bahasa daerah terhadap kelancaran komunikasi di daerahnya yang belum terjangkau oleh bahasa Indonesia selama ini sangat besar. Akan tetapi, dipandang dari sudut politik bahasa nasional, peranannya hanya terbatas pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah yang bersangkutan.

Sebagai bagian dari kebudayaan nasional, bahasa-bahasa daerah tentu patut diajarkan di sekolah. Ruang geraknya terbatas pada daerah yang bersangkutan dan hanya diajarkan sebagai salah satu aspek kebudayaan.

Ada satu hal yang perlu dipikirkan masak-masak. Terlalu menonjolkan pelajaran bahasa daerah apalagi menjadikannya bahasa pengantar, akan me-

rugikan kepentingan nasional (Slamet Mulajan, 1959; 46, Alisjahbana, 1957). Oleh karena itu bahasa daerah sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah hanya perlu diberikan pada daerah-daerah tertentu yang menginginkannya saja.

Bahasa-bahasa asing sesuai dengan pola pembangunan nasional tentu perlu diajarkan di sekolah-sekolah kita. Bahasa asing mana yang perlu diajarkan sangat ditentukan oleh politik luar negeri kita dan kebutuhan akan pengembangan ilmu dan teknologi. Di samping itu, untuk kepraktisannya harus dipertimbangkan faktor kerja sama luar negeri yang akan dilakukan. Akan tetapi, pertimbangan bahwa suatu bahasa telah terpakai sebagai bahasa dunia agaknya perlu menentukan putusan kita. Dalam hubungan ini bahasa Inggris tentu mendapat prioritas utama. Kalau perlu kita mengajarkan lebih dari satu bahasa asing, bahasa-bahasa seperti Arab, Jerman, Perancis, Belanda, Cina dan Rusia perlu dipikirkan.

2. TUJUAN PENGAJARAN BAHASA.

Setiap mata pelajaran yang diajarkan dalam pelaksanaan pendidikan harus jelas untuk apa pelajaran itu diberikan. Luas dan dalamnya tujuan masing-masing mata pelajaran akan sangat ditentukan oleh tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan, sesuai dengan peranannya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional itu. Berdasarkan pengertian itu dapatlah ditentukan tujuan masing-masing pelajaran bahasa yang disebutkan di atas:

a. Bahasa Indonesia

Sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia dalam masyarakat yang diuraikan diatas, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah-sekolah kita dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kemahiran murid menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, sehingga bahasa Indonesia berfungsi baginya sebagai alat berpikir, berkomunikasi, dan bermasyarakat.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kemahiran murid menggunakan bahasa Indonesia sehingga dengan kemahiran ini mereka mampu berpikir kritis dalam hal mengenal hubungan-hubungan fakta, peristiwa dan sebagainya mampu mengklasifikasikan, mengenal sebab akibat, dan menarik konklusi dan generalisasi. Bertambah cepat murid-murid memperoleh ketrampilan ini bertambah besar kemungkinan baginya untuk memperoleh kemajuan pribadi dan kehidupan dalam masyarakat.
3. Menumbuhkan dan mengembangkan pada murid-murid berbagai aspek ketrampilan berbahasa Indonesia, sehingga dengan ketrampilan

itu, melalui mendengar, berbicara, dan membaca, mereka mampu memperoleh, menilai, dan menghargai gagasan-gagasan yang diperolehnya melalui kegiatan itu, dan mampu mengemukakan perasaan, pendapat, atau pikirannya kepada orang lain, baik melalui berbicara atau melalui mengarang.

4. Menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan murid tentang berbagai pengertian mengenai bahasa Indonesia: tata bunyinya, tata kalimatnya, tata katanya, kosakata dan ungkapan-ungkapannya, pola intonasinya, lambang-lambang tertulis dan ejaannya, dan sejarahnya.
5. Memperkenalkan kepada murid-murid hasil-hasil sastra Indonesia sehingga dengan membaca dan menelaah sastra itu dikembangkan pengetahuan dan pemahamannya tentang gagasan dan tingkah laku manusia, nilai-nilai kebudayaan, dan peradaban bangsa.
6. Merangsang tumbuhnya perhatian murid terhadap bahasa, dan memperluas wawasannya tentang perkembangan, kemudahan, fungsi, kekuatan dan arti bahasa sebagai alat dalam belajar dan berkomunikasi.
7. Membantu murid-murid menemukan keseimbangan dan kepuasan diri melalui penggunaan bahasa dan merasakan kenikmatan melalui penggunaan bahasa itu dalam berbagai situasi.
8. Membantu murid-murid mengembangkan ukuran nilai-nilai, pertimbangan-pertimbangan, yang baik, dan tanggung jawab moral dalam menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan.
9. Melalui tujuan-tujuan di atas ditumbuhkan dan dikembangkan pula sikap mental yang positif pada murid-murid terhadap bahasa Indonesia sehingga murid-murid merasa bahwa bahasa Indonesia adalah miliknya pribadi dan milik bangsanya, yang bila dapat menggunakan bahasa itu dengan baik dan tepat dalam berbagai situasi pemakaian bahasa, dan merasa ikut bertanggung jawab terhadap kelanjutan perkembangan bahasa itu menjadi suatu bahasa yang kuat dan hidup.

Bahasa Asing

Sesuai dengan fungsi bahasa asing berdasarkan politik pembangunan nasional, politik pendidikan nasional, Politik Bahasa Nasional seperti diuraikan di atas, tujuan pengajaran bahasa asing di sekolah-sekolah kita adalah menumbuhkan ketrampilan murid berbahasa asing, sehingga dengan kemampuan itu ia dapat:

1. Berkomunikasi dengan bangsa asing tersebut.
2. Mengenal dan memahami bangsa dan kebudayaan asing tersebut.
3. Mempelajari ilmu dan kebudayaan asing melalui buku yang ditulis dalam bahasa asing itu dalam rangka studinya.

3. CARA MENGAJARKANNYA

Cara mengajarkan sesuatu mata pelajaran terletak dalam bidang metodologi. Dalam pengajaran bahasa, metodologi ini sudah sangat pesat perkembangannya sehingga untuk memperoleh hasil pengajaran yang baik perlu dikembangkan bidang ini lebih sempurna.

Masalah metode akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor: kurikulum, bahan, guru, murid, lingkungan, dan alat yang dapat dipakai. Prinsip-prinsip didaktik dan metodologi yang dicantumkan dalam kurikulum akan ikut pula menentukan pilihan metode. Oleh karena masalahnya cukup luas, soal ini tidak akan dibicarakan di sini. Hanya kami ingin menekankan, untuk memperoleh hasil pengajaran yang lebih baik dalam pengajaran bahasa, perlu dipikirkan pengembangan metode pengajaran bahasa itu. Agaknya sudah semakin disadari bahwa cara mengajarkan bahasa yang digunakan di sekolah-sekolah kita dewasa ini belum memenuhi harapan kita bersama.

4. JENIS DAN TINGKATAN SEKOLAH

Didasarkan atas tuntutan pembangunan nasional, tuntutan pendidikan nasional dan politik bahasa nasional, bahasa Indonesia jelas harus diajarkan pada semua jenis dan tingkatan sekolah, termasuk perguruan tinggi.

Bahasa-bahasa daerah, jika dikehendaki oleh masyarakat yang bersangkutan, dapat diajarkan di sekolah menengah. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi yang mempunyai fakultas sastra, perlu dibuka jurusan bahasa dan kesusastraan daerah.

Bahasa-bahasa asing tertentu, sesuai dengan kebutuhannya diajarkan di sekolah lanjutan atas.

5. MULAI DIAJARKAN DAN LAMANYA BERLANGSUNG

Bahasa Indonesia jelas harus mulai diajarkan sejak kelas satu SD dan berlangsung terus sampai perguruan tinggi. Di perguruan tinggi terutama dimaksudkan sebagai pembinaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Memberikan pelajaran bahasa Indonesia di semua jenis dan tingkatan sekolah mulai sejak kelas 1 sekolah dasar bukan saja sangat diperlukan untuk keperluan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, akan tetapi juga sangat berguna bagi usaha-usaha penstandaran bahasa. Melalui bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah, bahasa standar itu dapat diharapkan tumbuh dengan baik.

Dalam kurikulum SD yang berlaku dewasa ini (Kurikulum SD 1968) bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sebagian SD di daerah-daerah tertentu mulai digunakan sejak kelas III. Kami berpendapat bahwa di seluruh

Indonesia sudah masanya sekarang, sesuai dengan tuntutan pembangunan, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dimulai sejak kelas I. Alasan bahwa anak-anak lebih cepat belajar melalui bahasa ibu ternyata belum tentu benar karena bukti-bukti penyelidikan yang terkontrol baik pada negara-negara multibahasa tidak banyak tersedia (Le Page, 1971). Dan percobaan tak resmi (tak terkontrol) tentang hal ini melalui sistem pendidikan kita selama ini membuktikan bahwa anggapan itu tidak benar. Banyak daerah-daerah yang mulai mengajarkan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran dan sebagai bahasa pengantar sejak kelas I. Ternyata tak ada kesukaran dialami murid-murid. Usaha-usaha yang dilakukan orang di Irlandia menggunakan bahasa Iris sebagai bahasa pengantar menggantikan bahasa Inggris dan mengajarkan bahasa Iris dengan intensif di sekolah-sekolah dalam rangka menghidupkan kembali bahasa Iris itu ternyata merupakan pemborosan waktu, biaya, dan tenaga, sebab akhirnya setelah anak dewasa, mereka harus lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Sebabnya ialah kenyataan bahwa bahasa Inggrislah yang sangat diperlukannya dalam kehidupannya (Rubin 1971). Situasi di Indonesia dalam hal ini, agaknya sama dengan di Irlandia, itu. Pada waktu dewasa, bahasa Indonesialah yang sangat diperlukan anak-anak sebab bahasa Indonesia memberikan kemungkinan kehidupan yang lebih baik. Di samping itu, harus pula kita ingat bahwa wawasan kepulauan nusantara menjadi satu kesatuan politik, kesatuan seni budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan keamanan yang menjadi pola pembangunan dan cita-cita nasional memerlukan setiap orang Indonesia mengenal dan menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan tingkatan sekolah di Amerika dan di Australia telah menyebabkan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda suku bangsa, bahasa dan kebudayaannya itu menjadi orang Amerika dan Australia tulen (Le Page, 1971) Oleh karena itu, bagi Indonesia, pola berpikir lama yang sangat ditonjolkan oleh penjajah dahulu, bahwa anak-anak lebih mudah belajar dalam bahasa ibunya, tidak menguntungkan ditinjau dari segi kepentingan nasional; apalagi pendapat seperti itu masih diragukan kebenarannya. Itulah sebabnya kami berpendapat bahwa untuk Indonesia masa kini dan masa datang bahasa Indonesia harus diajarkan dan digunakan sebagai bahasa pengantar sejak kelas I sekolah dasar. Pengajaran membaca dan menulis permulaan harus diberikan dalam bahasa Indonesia, karena kegiatan ini sangat menguntungkan pengajaran bahasa Indonesia.

Bahasa-bahasa daerah, jika dikehendaki untuk diajarkan di sekolah-sekolah, kiranya tepat kalau diberikan di sekolah lanjutan atas dan di perguruan tinggi (jurusan sastra) saja. Alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada hakekatnya, oleh karena bahasa daerah adalah bahasa yang terpakai di rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat di daerah itu, anak-

anak secara tidak resmi telah mempelajari bahasa itu terus-menerus sejak kecil. Dengan demikian, kemampuan menggunakan bahasa itu telah mulai dipelajari sejak ia berumur sangat muda.

- b. Sistem tulisan dan ejaan bahasa-bahasa daerah dewasa ini sama dengan sistem tulisan dan ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bagi bahasa-bahasa daerah yang mempunyai sistem bahasa tertulis, anak-anak tidak akan buta huruf dalam bahasa daerahnya.
- c. Bahasa daerah tidak memegang peranan sebagai bahasa ilmu dalam kehidupan nasional. Waktu tiga tahun di SMA dipandang cukup untuk memberikan pengetahuan tentang bahasa itu.
- d. Dengan menyediakan waktu yang pendek untuk bahasa-bahasa daerah, dapat disediakan waktu lebih banyak untuk mata pelajaran lain yang lebih penting.
- e. Dengan mulai memberikan bahasa daerah di SLA, murid SD dan SLP tidak dibebani dengan lebih dari satu pelajaran bahasa. Mempelajari bahasa lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan terlalu berat bagi murid sehingga hasil pelajaran kurang memuaskan.
- f. Bahasa daerah harus diajarkan sebagai bahasa pilihan. Hal ini disesuaikan dengan pilihan murid terhadap bahasa daerah mana yang ingin dipelajarinya. Ini sangat serasi untuk sekolah-sekolah di kota-kota besar yang murid-muridnya berasal dari berbagai suku bangsa, jika di sekolah ini diajarkan bahasa daerah.
- g. Untuk mengajarkan bahasa diperlukan guru yang mendapat latihan dan pendidikan khusus. Hal ini sering tak dapat dipenuhi, sehingga sering terjadi bahwa pelajaran bahasa daerah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Buku pelajaran dan buku bacaan dalam bahasa daerah sering kurang mencukupi, baik kualitas maupun kuantitas. Bila ini terjadi, kita membuang waktu, tenaga, dan biaya percuma.

Bahasa-bahasa asing tertentu paling kurang untuk masa tertentu baru mulai diajarkan di SLA. Alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kesempatan lebih dahulu kepada murid-murid menguasai bahasa Indonesia dengan baik.
- b. Penguasaan bahasa asing baru diperlukan murid di perguruan tinggi bila mereka meneruskan pelajarannya ke perguruan tinggi itu. Keperluan penguasaan bahasa asing tertentu di perguruan tinggi itu pun hanya diperlukan untuk bidang-bidang ilmu tertentu, sebab bahasa pengantar di perguruan tinggi adalah bahasa Indonesia.
- c. Kecuali yang akan bekerja di perusahaan asing atau kantor-kantor pariwisata, lapangan kerja bagi tamatan SLP umumnya tidak memerlukan

penguasaan bahasa asing. Andai kata penguasaan dirinya dengan kursus bahasa asing yang dewasa ini banyak tersedia.

- d. Oleh karena tidak diajarkan bahasa asing di SMP, waktu dapat diberikan lebih banyak untuk mempelajari mata pelajaran lain yang langsung berguna bagi anak-anak.
- e. Oleh karena hanya satu bahasa yang dipelajari murid-murid, yaitu bahasa Indonesia, maka pelajaran bahasa Indonesia dapat diberikan dengan lebih intensif.
- f. Mempelajari suatu bahasa tanpa ada keperluan yang mendesak akan kurang baik hasilnya karena tidak ada motivasi belajar. Bahasa asing tidak diperlukan dalam pergaulan sehari-hari dan belum diperlukan untuk studi taraf SLA dan oleh karena itu belum berguna mempelajari bahasa ini pada sekolah-sekolah sebelum SLA.

6. CARA MENGATUR PROGRAM DAN PELAKSANAANNYA

Pengajaran bahasa, terutama pengajaran bahasa nasional, perlu diatur dengan teliti bila kita mengharapkan hasil yang baik. Berbeda dari pelajaran lain, pelaksanaan pengajaran bahasa memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Guru, buku-buku, perlengkapan pelajaran, alat-alat evaluasi, dan lain-lain memerlukan persyaratan-persyaratan khusus yang tidak mungkin dilakukan dengan asal jadi saja. Terutama pengajaran bahasa nasional dalam hubungan dengan penstandaran bahasa, pelaksanaan pengajarannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga betul-betul sesuai dengan apa yang diperlukan.

Untuk kepentingan pembangunan bangsa berdasarkan pola pembangunan nasional, pola pendidikan nasional dan politik bahasa nasional perlu ada suatu badan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas mengatur masalah ini. Badan ini harus digerakkan oleh tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang ini. Untuk kelancaran tugas-tugasnya, tentu saja harus disediakan biaya sesuai dengan yang diperlukan dan diberi fasilitas yang cocok. Apa pun nama yang akan diberikan kepada badan ini, entah Pusat Pengajaran Bahasa, Badan Pembina Pengajaran Bahasa, atau yang lain, tugas-tugas yang harus dilakukannya adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pengembangan kurikulum dan silabus.
- b. Perencanaan dan pengembangan buku pelajaran, buku pegangan guru, buku bacaan, alat bantu pelajaran audio-visuil, dan lain-lain.
- c. Koordinasi pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan guru dalam materi dan metode serta teknik mengajar.
- e. Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan.

- f. Perencanaan dan pengembangan pusat pengujian bahasa.
- g. Mengadakan penyelidikan terus-menerus terhadap pelaksanaan dalam rangka meningkatkan hasil dan mutu.
- h. Penerbitan berkala profesi dan penerbitan lain sehubungan dengan bidang-bidang tugas di atas.
- i. Dan lain-lain yang bertalian dengan pengajaran bahasa ini.

Mengenai bahasa-bahasa yang diajarkan, apa tujuannya, di sekolah-sekolah mana diajarkan, kapan dimulai, dan berapa lama diberikan, pendapat kami agak berbeda dari apa yang berlaku di sekolah-sekolah kita dewasa ini.

Dunia pendidikan kita dewasa ini sedang membangun. Kurikulum baru sedang disusun untuk mengganti kurikulum lama, yang dipandang sudah usang. Keusangannya disebabkan oleh sistem pendidikan lama yang dirasakan sebagai peninggalan penjajahan, kurang sesuai dengan kebutuhan Indonesia yang sedang membangun. Sistem lama itu juga sudah tidak relevan lagi dalam menanggapi datangnya era ilmu dan teknologi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1970). Pada tempatnyalah sekarang kita menyusun kurikulum baru yang sesuai dengan pola pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

VI. Apa yang kami usulkan di sini memang berbeda dari apa yang selama ini kita laksanakan. Perbedaan itu terutama mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hubungan dengan pengajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum lama, SD terpecah menjadi dua, yaitu SD yang mulai mengajarkan bahasa Indonesia sejak kelas I dan SD yang mengajarkan bahasa Indonesia sejak kelas III. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pun disesuaikan dengan keadaan itu. Jadi ada SD yang mulai mengajar dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sejak kelas I, ada yang mulai sejak kelas III. Di dunia perguruan tinggi terlihat pula ketidaksamaan. Ada Perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia dan ada pula yang tidak. Usul kami adalah agar di semua jenis dan tingkatan sekolah, termasuk perguruan tinggi, bahasa Indonesia harus diajarkan sebagai mata pelajaran. Sebagai bahasa pengantar bahasa Indonesia harus digunakan sejak kelas I SD di seluruh Indonesia.
2. Sesuai dengan kurikulum lama pada daerah tertentu, bahasa-bahasa daerah diajarkan dan digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas I dan kelas II SD. Sebagai mata pelajaran, bahasa daerah diberikan sejak SD kelas I sampai sekolah lanjutan atas. Kami mengusulkan agar bahasa daerah — bila dikehendaki — hanya diberikan di SLA saja selama tiga tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Pelajaran membaca dan menulis permulaan yang di daerah-daerah tertentu selama ini diberikan dalam bahasa daerah harus diganti dengan pelajaran membaca dan menulis permulaan dalam bahasa

Indonesia. Ini sekaligus dapat mempermudah pelajaran bahasa Indonesia di kelas I SD itu.

Untuk studi kebudayaan nasional, di perguruan tinggi, terutama yang mempunyai jurusan sastra dan sosial, ada baiknya diberikan mata kuliah bahasa dan kebudayaan daerah. Dengan demikian, dapat ditampung pelaksanaan bunyi penjelasan Pasal 36 UUD, 1945. Terlalu menonjolkan bahasa daerah dalam pengajaran tidak sejalan dengan politik bahasa nasional dan pola pembangunan nasional.

3. Pengajaran bahasa asing di sekolah-sekolah kita dewasa ini diberikan mulai kelas I SLP yang berlangsung terus sampai perguruan tinggi. Bahasa asing yang diajarkan dewasa ini adalah bahasa Inggris (SLP dan SLA), dan bahasa asing tertentu lain, sesuai dengan keperluannya, pada perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah kejuruan, seperti sekolah agama Islam juga diajarkan bahasa Arab.

Kenapa bahasa asing harus mulai diajarkan di SLP kami tidak menemukan alasan yang pernah dikemukakan. Namun agaknya pengaruh sistem pendidikan lama sangat besar. Karena SLP setingkat dengan MULO pada zaman penjajahan, dan di MULO diajarkan bahasa asing (Inggris), maka SLP kita pun mengajarkan bahasa asing itu.

Kami berpendapat bahwa setiap bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah kita, pada tingkat berapa pun dimulainya, harus ada alasan yang sejalan dengan pola pembangunan nasional.

Oleh karena pada hakekatnya bahasa asing baru diperlukan untuk studi di perguruan tinggi, maka mengajarkan bahasa asing di SLP berarti penghamburan waktu, biaya, dan tenaga. Pada tempatnya, paling kurang untuk jangka waktu tertentu, bahasa asing itu baru mulai diajarkan di SLA dan diberikan secara lebih intensif. Waktu, biaya, dan tenaga yang selama ini diberikan untuk pengajaran bahasa asing di SLP dapat dialihkan untuk menunjang mata pelajaran lain yang lebih langsung kegunaannya.

Di samping itu, dengan menunda pengajaran bahasa asing ke SLA murid-murid SLP diberikan kesempatan menguasai bahasa Indonesia lebih dalam sebelum mereka mempelajari bahasa asing.

Kami berpendapat bahwa disebabkan oleh kedudukannya sebagai bahasa dunia, bahasa ilmu dan teknologi modern dewasa ini, bahasa Inggris perlu mendapat prioritas utama.

4. Salah satu segi yang sangat penting dalam hubungan dengan politik bahasa nasional dan pengajaran bahasa, yang boleh dikatakan sangat mendesak, adalah yang bertalian dengan bahasa Indonesia. Oleh karena dalam politik bahasa nasional bahasa Indonesia menduduki tempat yang sangat

penting, maka pengaturan pelaksanaannya sangat mendesak. Pelaksanaannya dewasa ini boleh dikatakan masih jauh dari yang diharapkan. Kiranya penelitian dan pengembangan bidang ini perlu mendapat prioritas.

Penglihatan selang pandang dan keluhan-keluhan masyarakat akan kurangnya hasil pengajaran itu membuktikan dugaan di atas dengan mudah. Oleh karena itu, bagi pengajaran bahasa Indonesia adanya suatu badan yang mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaannya seperti diusulkan di atas sangat mendesak. Usaha-usaha penstandaran bahasa Indonesia akan menemui kegagalan bila pelaksanaan pengajarannya di sekolah-sekolah tidak disesuaikan dengan keperluannya.

Daftar Sumber

- Alatis, James E. ed. 1970. *Report of The Twenty-First Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Studies*. Washington: Georgetown University Press.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1957. *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*. Djakarta: Pustaka Rakjat.
- Assegaff, D.H. 1974. "Komunikasi Sosial dalam Masyarakat Pedesaan di Indonesia", dalam *Prisma* III/3:25-30.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1968 a. *Kurikulum Sekolah Dasar*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1968 b. *Rencana Pendidikan SMP*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1968 c. *Rencana Pendidikan SMA*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1970. *Basic Memorandum Tentang Pendidikan*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1971, *Pembaharuan Pendidikan di Indonesia*.
- Fishman, Joshua A; Ferguson, Charles A. dan Das Gupta, Jyotirindra. ed. 1968. *Language Problems of Developing Nations*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Fishman, Joshua A. 1972. *Sociolinguistics*. Massachusetts: Newbury House Publisher.
- Halliday, M.A.K.; McIntosh, Angus and Strevens, Peter. 1968. *The Linguistic Sciences and Language Teaching*. London: Longmans.
- Le Page, R.B. 1971. *The National Language Question*. London: Oxford University Press.
- Mackey, William Francis. 1966. *Language Teaching Analysis*. London: Longmans.
- Kartz, Ulrich. 1974. "Bahasa, Komunikasi dan Kontrol Sosial" dalam *Prisma* III/3: 71-78.
- Kelly, L.G. 1969. *25 Centuries of Language Teaching*. Massachusetts: Newbury House Publisher.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Rubin, Joan. 1971. "Evaluation and Language Planning," dalam Joan Rubin, and Bjorn H Jernud ed. *Can Language Be Planned?* Honolulu: University Press of Hawaii.
- Slametmuljana, Prof. Dr. 1959 (?). *Politik Bahasa Nasional*. Djakarta: Djambatan
- Sowards, G. Wesley and Scobey, Mary-Margaret. 1962. *The Changing Curriculum and the Elementary Teacher*. California: Wadsworth Publishing Co., Inc.
- Suardi, Harsono. 1974. "Problem Komunikasi untuk Menunjang Pembangunan" dalam *Prisma* III/3: 31-36.
- Tellings, A. ED. Schimdgall. 1956 "Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Resmi dan Bahasa Nasional". dalam *Pembinaan Bahasa Indonesia* X:81-106.
- UNESCO. 1953. *The Use of the Vernacular Language in Education*. Paris: Unesco.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Weinreich, Uriel. 1963. *Languages in Contact*. The Hague: Mouton & Co.

6

**POLITIK BAHASA NASIONAL
DAN KETAHANAN NASIONAL**

IMAM SUKARSONO

1. PENDAHULUAN

Judul kertas kerja ini mengingatkan kita kepada tulisan di dalam *Majalah Tempo* edisi 29 Juni 1974. Di bawah judul "Rumus Kamus" di dalam tulisan itu diketengahkan Seminar Politik Bahasa Nasional yang hampir pasti akan diselenggarakan mulai tanggal 3 sampai tanggal 5 Februari 1975. Dikatakan pula bahwa seminar itu nanti akan membahas sepuluh buah kertas kerja yang akan disampaikan oleh sastrawan, wartawan, ahli bahasa, pendidik, bahkan juga oleh seorang dari lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan. Kata-kata "oleh seorang dari lingkungan" ini merupakan kata tambahan dari penulis kertas kerja ini. Kata-kata yang asli di dalam tulisan itu hanya berbunyi "... bahkan juga dari HANKAM". Urutan penyebutan orang yang akan menyampaikan kertas kerja itu dapat memperlihatkan kepada para pembaca adanya keinginan penyusun kalimat tersebut untuk minta perhatian akan betapa luas dukungan yang diperoleh pemrakarsa seminar, dengan menampilkan bukti bahwa bukan saja orang-orang atau ahli-ahli yang sehari-hari berkecimpung di bidang kebahasaan yang akan menyampaikan kertas kerja melainkan juga orang yang sehari-hari bertugas di bidang pertahanan keamanan akan turut serta menyumbangkan hasil renungannya. Kata-kata "... bahkan juga dari HANKAM" itu juga dapat dilihat sebagai serangkaian kata-kata yang mengundang penafsiran bahwa penutur kalimat seolah-olah ingin berseru:

"Hai kawan-kawan se bidang pengabdian, marilah kita singsingkan lengan baju lebih tinggi! Lihatlah, kawan-kawan dari bidang HANKAM turut terjun membantu kita."

Tidak perlu diragukan lagi bahwa pemrakarsa seminar memang melihat adanya korelasi antara masalah yang akan diseminarkan, yaitu politik bahasa nasional, dan masalah pertahanan, keamanan nasional. Pemrakarsa seminar menilai kadar korelasi itu cukup tinggi sehingga salah satu aspeknya dipandang tepat untuk dijadikan objek pembahasan di dalam seminar. Lalu dimintanyalah kesediaan seorang pejabat pada Departemen Pertahanan-Keamanan kerja dengan judul "Politik Bahasa Nasional dan Ketahanan Nasional". Permintaan itu beroleh tanggapan positif; pejabat pada Departemen Pertahanan-Keamanan tersebut ternyata memperlihatkan penilaian yang sama dengan penilaian yang dilakukan oleh pemrakarsa seminar. Taggapan positif itu berupa kesediaan membuat kertas kerja itu dan pejabat itu ialah orang yang namanya ditulis di bawah judul karangan ini. Akan tetapi, ia lebih dahulu minta perhatian para peserta seminar bahwa segala hal yang dituangkannya ke dalam kertas kerja ini merupakan pendapatnya pribadi, pribadi sebagai perwira/anggota ABRI dan pribadi sebagai anggota Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, bukan pendapat resmi Departemen Pertahanan-

Keamanan. Kata-kata "sebagai perwira/anggota ABRI" dicantumkan di sini untuk memperlihatkan adanya sekadar kewajaran apabila seorang yang bukan anggota ABRI menilai seorang perwira sebagai orang yang patut dijatuhi pilihan untuk dimintai penjelasan tentang hal-hal yang bersangkutan-paut dengan ke-ABRI-an; dengan kata-kata lain pada setiap perwira harus dapat diharapkan adanya kemampuan untuk menjelaskan hal-hal yang terletak di bidang HANKAM/ABRI kepada siapa saja yang tidak dilarang, tanpa melewati batas yang telah digariskan oleh Pimpinan HANKAM/ABRI. Kata-kata "sebagai anggota Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dicantumkan untuk menegaskan bahwa tiap-tiap percikan pikirannya sebagai perwira senantiasa dikaitkan dengan kepentingan pengembangan bahasa nasional. Dengan demikian pendapat pribadi yang dituangkan ke dalam kertas kerja ini diharapkan dapat memenuhi ruang lingkup yang diinginkan oleh pemrakarsa seminar. Batang tubuh kertas kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Tujuan dan arah pembangunan nasional;
- b. Bahasa sebagai tiang pancang kebudayaan;
- c. Politik bahasa nasional;
- d. Pertahanan-keamanan nasional;
- e. Kesimpulan;
- f. Penutup.

2. BATANG TUBUH

2.1. Tujuan dan Arah Pembangunan Nasional

"Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan ber-satu di dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta di dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja, melainkan keselarasan, kese-rasian, dan keseimbangan antara keduanya; bahwa pembangunan itu merata di seluruh Tanah Air; bahwa pembangunan itu bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian masyarakat, melainkan untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup. Bangsa Indo-nesia menghendaki keselarasan hubungan antarmanusia dan Tuhannya, an-tara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan usaha mengejar kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masya-

rakat yang serba selaras adalah tujuan akhir pembangunan nasional; secara ringkas tujuan akhir itu disebut masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Di dalam tujuan dan arah pembangunan itu terkandung usaha membentuk manusia-manusia pembangunan, yaitu manusia-manusia Indonesia yang sadar akan perlunya membangun hari esok yang lebih baik daripada hari ini, yang percaya kepada diri sendiri bahwa ia dapat memperbaiki kehidupannya dan yang memiliki kemampuan serta sikap yang diperlukan untuk mengubah nasibnya. Demikianlah uraian tentang tujuan dan arah pembangunan nasional yang dapat dibaca pada halaman 17 dan 18 buku *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/1975--1978/1979* jilid I yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan RI. Letnan Jenderal (Purnawirawan) Dr. T.B. Simatupang di dalam salah satu edisi majalah *Karya Wira Jati* (majalah resmi Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) menulis bahwa membangun berarti mengorganisasi bangsa untuk kemajuan. Dapatlah dicatat bahwa inti pengamatan Jenderal Purnawirawan Simatupang ini sama dengan tujuan akhir pembangunan yang diuraikan di dalam buku *Repelita Kedua* itu. Beberapa cukilan lagi dari jilid I buku *Repelita Kedua* masih perlu ditambahkan di sini. "Sejak semula rakyat Indonesia menyadari bahwa pembangunan bukanlah hal yang mudah dan pembangunan mencakup segi-segi yang luas atau serba dimensi. Ia mencakup bidang-bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, dan lain-lain".

Cukilan-cukilan dari jilid I Buku *Repelita Kedua* yang ditampilkan di muka mengandung prinsip-prinsip yang tepat untuk dijadikan pangkal tolak penjelasan pelbagai hal yang terletak di dalam ruang lingkup kertas kerja ini. Prinsip-prinsip ini ialah, sebagai berikut:

1) *Manusia Indonesia seutuhnya*

Manusia sebagai faktor penentu utama perlu ditonjolkan di dalam BAB I buku *Repelita Kedua* tersebut; oleh karena itu, kata "manusia" di tulis dengan huruf "M" (kapital). Apakah yang dimaksudkan dengan "Manusia Indonesia seutuhnya" atau "Manusia Indonesia yang utuh? Penulis ini mengajukan pendapat bahwa "Manusia Indonesia seutuhnya" ialah Manusia Indonesia yang mampu memenuhi tuntutan segala bidang kehidupan bangsa. Ia mampu:

- a. menempatkan diri sebaik-baiknya sebagai unsur rakyat yang utuh, yakni rakyat yang berkebangsaan satu, kebangsaan Indonesia;
- b. menempatkan diri sebaik-baiknya sebagai putera Tanah Air yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi dan membela bahasa yang satu untuk seluruh bangsa, yakni bahasa Indonesia;
- d. menjunjung tinggi dan membela lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- e. menjunjung tinggi dan membela bendera kebangsaan Sang Merah Putih.

Dari kemampuan-kemampuan yang diuraikan pada huruf di atas ini, dapat ditarik garis-garis untuk membentuk pelbagai aspek yang merupakan sumber pelbagai usaha dan kegiatan, yaitu usaha dan kegiatan untuk:

1. memupuk, memelihara, mengembangkan, dan membina nasionalisme dan patriotisme; usaha dan kegiatan ini bersumber pada dan beroleh ruang gerak dari *aspek idial*;
2. menggalang ketahanan kejiwaan yang tangguh dan sanggup menanggulangi pelbagai ancaman, melalui saluran kejiwaan; usaha dan kegiatan ini memancar dari *aspek kejiwaan*;
3. menggalang kekuatan moral Pancasila yang sanggup memancarkan sinar dan cahaya ke tiap-tiap sudut dan pelosok bidang kehidupan bangsa, sehingga tiada ancaman atau hambatan yang tidak dapat diatasi olehnya, usaha dan kegiatan ini memancarkan dari *aspek moral*;
4. menggalang kekompakan rakyat semesta di dalam perjuangan memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; usaha dan kegiatan ini dipancarkan oleh *aspek politik, ekonomi, sosial budaya*.
5. menggalang kekuatan pertahanan Keamanan Nasional di segala bidang; usaha dan kegiatan ini dipancarkan oleh *aspek pertahanan keamanan nasional*.

Di samping aspek-aspek yang diuraikan pada (1) sampai (5) di atas ini, niscaya masih dapat ditampilkan ke depan beberapa aspek yang lain. Akan tetapi, di dalam pembinaan bangsa kelima aspek inilah yang dapat dipandang sebagai unsur utama, sedangkan aspek-aspek yang lain sebagai unsur bantu.

2) Masyarakat Maju, Adil, dan Makmur Berdasarkan Pancasila

Menurut uraian pada halaman 18 jilid I buku *Repelita Kedua* itu, yang dimaksudkan dengan masyarakat maju, adil, dan makmur ialah masyarakat yang mengandung keselarasan antara manusia dan Tuhannya, antara manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa, serta keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan usaha mengejar kebahagiaan di akhirat; dengan kata lain, masyarakat yang mengandung serba keselarasan. Suatu masyarakat dapat dikatakan maju apabila dinamikanya di dalam rangka pembinaan bangsa ke luar selalu sederap dan selangkah dengan dinamika masyarakat bangsa-bangsa lain, dan ke dalam selalu dapat memenuhi tuntutan kemandirian nasional di segala bidang kehidupan. Dan akhirnya, satu hal yang perlu digarisbawahi dengan tebal ialah bahwa masyarakat yang mengandung serba keselarasan dan menjadi tujuan pembangunan itu harus berdasarkan Panca-

sila; dengan kata lain, tidak dikehendaki keselarasan dengan dasar lain daripada Pancasila.

2.2 Bahasa sebagai Tiang Pancang Kebudayaan

Hidup berarti hidup di tengah-tengah kenyataan, hidup yang lahir dari tanggungan kepentingan antara manusia-manusia yang tergabung di dalam pergaulan hidup bersama itu. Kenyataan-kenyataan hidup yang biasanya tampak secara lahiriah itu tidak lain daripada pantulan cahaya yang keluar dari inti yang sebenar-benarnya. Adapun inti yang sebenarnya dan yang menentukan mati atau hidupnya suatu pergaulan hidup ialah perangkat hubungan antara manusia-manusia di dalam pergaulan hidup itu. Makin mantap perangkat hubungan itu makin mantap pula bentuk hidup yang diwujudkannya. Perangkat hubungan itu ditegakkan terutama oleh ukuran-ukuran, yakni ukuran-ukuran di dalam rangka pemenuhan hajat hidup. Ukuran-ukuran ini bersumber pada kesadaran manusia akan nilai-nilai yang mengatasi tuntutan-tuntutan sesuatu waktu. Kesadaran manusia akan nilai-nilai ini merupakan landasan kebudayaan di dalam suatu pergaulan hidup bersama, atau bila perangkat hubungan-hubungan di dalamnya memperlihatkan suatu tertib, merupakan landasan kebudayaan di dalam suatu masyarakat. Penerapan ukuran-ukuran di dalam rangka pemenuhan hajat hidup itu memberikan bentuk-bentuk nyata kepada kebudayaan. Dengan kata lain, melalui penerapan ukuran-ukuran itu kebudayaan melahirkan kenyataan-kenyataan masyarakat. Kalau orang berbicara tentang hukum, maka ukuran-ukuran itu yang sekali lagi, bersumber pada kesadaran akan nilai-nilai yang mengatasi tuntutan-tuntutan sesuatu waktu, beroleh bentuk konkret yang disebut aturan hukum. Kesadaran akan nilai-nilai hidup masyarakat itulah yang merupakan *dasar kebudayaan*. Kenyataan-kenyataan masyarakat dilahirkan oleh *kebudayaan* melalui *penerapan ukuran-ukuran* yang bersumber pada *kesadaran akan nilai-nilai*. Dengan demikian, nilai-nilai serta ukuran-ukuran itu merupakan unsur hakiki masyarakat yang menampakkan diri di semua bidang kehidupan. Di dalam pergaulan hidup bersama, manusia memerlukan alat untuk memahami, untuk mengerti maksud sesama manusia. Alat yang paling efektif untuk keperluan tersebut ialah *bahasa*. Dengan bahasa manusia dapat membentuk pengertian-pengertian; melalui bahasa pula manusia beroleh pengalaman-pengalaman hidup. Bahasa merupakan perangkat pengertian-pengertian dan, kembali lagi, pengertian-pengertian ini pun bersumber pada kesadaran akan nilai-nilai. Oleh karena bahasa merupakan alat untuk membentuk dan mengeluarkan pengertian-pengertian, dapatlah pula dikatakan bahwa bahasa juga merupakan alat pengukur tingkat kemajuan masyarakat. Pergaulan hidup bersama melahirkan bahasa, dan bahasa merupakan syarat mutlak bagi tegaknya pergaulan hidup bersama itu. Dan oleh karena pergaulan hidup bersama melahirkan kebudayaan, maka tepatlah apabila dikatakan pula bahwa bahasa berfungsi sebagai

tiang pancangi kebudayaan. Bahasa yang meniangpancangi kebudayaan seluruh bangsa, disebut *bahasa nasional*.

2.3 Politik Bahasa Nasional

Penulis berpendapat bahwa penempatan kata "nasional" pada titik tengah kaca teropong pembahasan dapat menambah kejelasan uraian tentang politik bahasa nasional. Di dalam sila pertama Sumpah Pemuda terdapat kata "bangsa". Supaya lebih jelas, baiklah sila pertama tersebut ditampilkan di bawah ini:

"Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia".

Kata "bangsa" dapat dipandang sebagai sinonim kata "nasi" atau *nasion*. Kata "nasi" merupakan hasil serapan kata *natie* (Belanda) dan kata "nasion" merupakan hasil serapan kata *nation* (Inggris). Di dalam praktek, kata "nasion" inilah yang lebih disukai daripada kata "nasi" untuk ditempatkan sebagai sinonim kata "bangsa". Alasannya tentu tidak sulit. Kata "nasi" yang berarti bangsa mempunyai ejaan sama dengan kata "nasi" yang merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Dan, kalau huruf "s" di dalam kata "nasi" diucapkan kurang jelas, mungkin ia masuk ke dalam telinga pendengar sebagai huruf "z", sehingga pendengar ini mungkin mengira bahwa kata yang didengarnya ialah kata "nazi". Kemudian kalau pengamatan dilanjutkan, dapatlah dicatat bahwa kata nama-sifat "nasional" lebih sering digunakan daripada kata nama benda "nasi" dan "nasion". Kata nama benda yang lebih sering digunakan ialah sinonimnya, yakni kata "bangsa". Orang lebih sering mendengar atau membaca kata-kata "bangsa Indonesia" daripada "nasion Indonesia". Inti pengertian kata dasar "nasi" beserta kata jadinya, antara lain "nasional", "nasionalitas" dan "nasioanlisme", telah dicoba dijelaskan oleh sejumlah sarjana terkemuka dengan menggali pelbagai kepustakaan. Akan tetapi, tiada satu pun penjelasan yang dapat memuaskan, dalam arti dapat menjangkau tiap-tiap segi dan sudut bidang kehidupan. Prof. Steinmetz mengatakan bahwa "nasi" tumbuh dari rakyat sebagai suatu kesatuan politik yang menetap di suatu daerah tertentu dan memiliki negara sebagai suatu organisasi yang berdaulat, melalui peradaban dan pendidikan yang (cukup) tinggi. Kalau kata "nasi" memperlihatkan satu kesatuan kebudayaan, maka keturunan dan kesamaan naluri membedakan kesatuan kebudayaan yang disebut "nasi" ini dari kesatuan yang disebut "ras". Kata "ras" ini pun hasil serapan kata Belanda yang ejaannya sama (*ras*) dan kata Inggris *race*. Kata "nasionalitas" yang diserap dari kata *natinaliteit* (Belanda) dan *nationality* (Inggris) mengandung arti kelompok orang yang mempunyai ikatan yang sama dengan ikatan yang terdapat pada kata "nasi" tetapi tidak terorganisasi sebagai rakyat yang merdeka. Menurut Stoddard "nasionalitas" mengandung arti konsep pemikiran psikologis, sedang kata "ras" mengandung arti kenyataan/fakta psikologis,

Dengan kata lain, menurut Stoddard, kata "nationalitas" menunjuk kepada sesuatu yang ada di dalam pemikiran secara politis, sedangkan kata "ras" menunjuk kepada sesuatu yang secara antropologis benar-benar ada. Banyak sarjana yang mengatakan betapa sulit melukiskan pengertian, ilmiah yang jelas tentang nasionalisme mutakhir baik yang bersangkutan paut dengan kelahirannya maupun yang berhubungan dengan pertumbuhan serta perkembangannya lebih lanjut. Terlampau banyak segi dan sudutnya. Prof. Struycken pernah menyatakan bahwa kalau kepadanya ditanyakan unsur apakah di luar hubungan ketatanegaraan yang memberikan corak kepada kesatuan. Jawab yang tegas atas pertanyaan itu tidak akan dapat diberikan berhubung dengan banyaknya faktor yang mempengaruhinya, misalnya kesatuan ras, bahasa, agama, kesusilaan, kebiasaan, letak geografis, perkembangan sejarah, perasaan dan kesadaran rakyat dan seterusnya.

Sungguhpun sejumlah sarjana telah mencoba membuat definisi tentang "nasi" tiada satu pun definisi yang dapat menampilkan pengertian yang bulat lengkap. Namun, di balik pelbagai definisi yang cukup banyak itu terlihat inti yang satu, yaitu bahwa nasi tumbuh dari *rakyat* sebagai *suatu kesatuan politik* yang menetap di *suatu daerah tertentu* dan memiliki *negara* sebagai *organisasi yang berdaulat*. Dapatlah dicatat bahwa inti yang satu itu mensyaratkan adanya;

- a. rakyat sebagai suatu kesatuan politik;
- b. suatu daerah tertentu;
- c. negara sebagai organisasi yang berdaulat.

Unsur-unsur lain di luar ketiga unsur yang disyaratkan ini dapat dipandang sebagai variasi.

Setelah inti yang satu itu dapat disepakati; dapatlah diadakan pengayunan langkah lebih lanjut untuk meneropong beberapa faktor penting lain yang turut menjaga tegaknya eksistensi nasi. Dari unsur-unsur penting ini cukup ditampilkan satu unsur saja yang tentu erat hubungannya dengan masalah yang ditempatkan sebagai judul kertas kerja ini, yaitu apa yang dikenal dengan sebutan aspirasi nasional. Aspirasi nasional meliputi empat unsur, yakni:

- a. kebulatan tekad untuk mewujudkan kesatuan dan kekompakan nasional di segala bidang kehidupan; akronim yang populer dewasa ini untuk menunjuk bidang-bidang dominan dari antara segala bidang kehidupan ini ialah IPPOLEKSOSBUDROHMIL, yang lengkapnya adalah, ideologi, psikologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, rohani, dan militer;
- b. kebulatan tekad untuk membela dan mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan nasional;
- c. kebulatan tekad untuk membina ciri khas dan keaslian (originalitas) nasional di tengah-tengah pergaulan antarbangsa; pembinaan bahasa na-

sional merupakan salah satu upaya di dalam kebulatan tekad ini;

- d. kebulatan tekad untuk menegakkan prestise dan kehormatan nasional di tengah-tengah pergaulan antarbangsa itu.

Bahasa nasional merupakan sarana nasional untuk komunikasi. Akan tetapi, bukan hanya kedudukan itu yang dimiliki bahasa nasional. Ia merupakan juga salah satu faktor penting untuk mengembangkan kepribadian, baik kepribadian individu maupun kepribadian kolektif atau kepribadian masyarakat dan bangsa. Kesadaran nasional melihat bahasa nasional sebagai unsur pengikat atau pemersatu bangsa. Bahasa nasional merupakan lambang *kepribadian nasional*. Oleh karena itu, tepatkah bahwa salah satu unsur aspirasi nasional, yakni unsur yang berupa kebulatan tekad untuk membina dan mempertahankan ciri khas nasional dan dalam pergaulan antarbangsa, mengandung upaya pembinaan *bahasa nasional*. Namun perlu diperhatikan, bahwa semangat yang menyala-nyala untuk memajukan dan mengembangkan bahasa nasional itu tentu tidak boleh merupakan penghambat bagi upaya penguasaan bahasa-bahasa asing. Makin banyak seseorang menguasai bahasa asing, makin luas pula ruang gerak yang dapat disediakannya untuk kegiatan memajukan dan mengembangkan *bahasa nasional*. Goethe berkata: "Barangsiapa mengabaikan bahasa-bahasa asing, ia tidak mengerti apapun mengenai bahasanya sendiri".

Setelah kedudukan bahasa nasional disoroti serba sedikit, tiba saatnya untuk mengarahkan teropong ke pertanyaan: *Apakah politik bahasa nasional itu?* Adakah beda antara "politik bahasa nasional" dan "politik nasional bahasa"? Hasil akhir yang dicapai dengan kedua istilah itu memang dapat sama.

Kedua istilah itu memperlihatkan perbedaan tekanan; mudah dipahami apabila di dalam pelaksanaan kebijaksanaan tampak pula perbedaan. Akan tetapi, perbedaan yang tampak di sini bukanlah perbedaan pokok, melainkan perbedaan gradual. Istilah "politik bahasa nasional" dapat dipandang sebagai istilah yang terdiri dari dua buah komponen, yaitu:

- a. "politik" sebagai komponen pertama, dan
- b. "bahasa nasional" sebagai komponen kedua,

Istilah "politik nasional bahasa" pun terdiri dari dua buah komponen, yaitu:

- a. "politik nasional" sebagai komponen pertama, dan
- b. "bahasa" sebagai komponen kedua.

Yang disebut pertama tentu masih terbuka untuk pembagian secara lain, yang artinya akan sama dengan yang disebut kedua, yaitu:

- a. "politik bahasa" sebagai komponen pertama, dan
- b. "nasional" sebagai komponen kedua.

Ada perbedaan di dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Dengan istilah yang di-

sebut pertama (yang komponen pertamanya "politik" dan komponen keduanya "bahasa nasional") yang ditempatkan sebagai pemegang peran utama ialah bahasa nasional. Segala upaya (yaitu yang tercakup di dalam pengertian "politik") dilakukan untuk memberikan posisi dan status yang sebaik-baiknya baik nasional maupun internasional kepada bahasa nasional. Kalau bahasa nasional ini diibaratkan seorang manusia A, maka kepadanya semua mata pertama-tama ditujukan.

Dengan pemusatan penglihatan kepada manusia A ini akan tampaklah kekurangan-kekurangan yang melekat padanya. Dengan menutup kekurangan-kekurangan ini, yang berarti memperbaiki si manusia A, akan dapatlah ditampilkan seorang tokoh yang dijagoi secara nasional. Di dalam rangka pengibaratannya ini bahasa-bahasa daerah dapat diibaratkan, alat perlengkapan yang digunakan untuk memperlengkapi manusia A yang akan ditokohkan dan dijagoi itu, tanpa menghilangkan hak bahasa daerah ini untuk juga memegang peran sebagai tokoh di daerah yang bersangkutan di samping tokoh atau jago nasional. Istilah yang disebut kedua (yang komponen pertamanya "politik bahasa" dan komponen keduanya "nasional") menempatkan bahasa sebagai pemegang peran utama.

Segala upaya (yaitu yang tercakup di dalam pengertian "politik") dilakukan untuk membina semua bahasa yang berhak hidup di dalam negara dengan tujuan supaya kebinekaan bahasa itu dapat berfungsi sebagai "tiang pancang" yang "meniangi" bahasa nasional yang dikembangkan serta dibina secara simultan dengan bahasa-bahasa daerah. Dari uraian tentang upaya melalui kedua istilah tersebut jelas sudah bahwa hasil akhirnya memang sama.

Dengan memilih judul "Politik Bahasa Nasional dan Ketahanan Nasional", pemrakarsa seminar ini, pada hemat penulis, mengikuti pola pemikiran yang sama dengan pola pemikiran penulis, yakni menempatkan bahasa nasional sebagai pemegang peran utama. Sebelum teropong diarahkan kepada upaya-upaya yang diperlukan untuk memberikan posisi dan status yang sebaik-baiknya kepada bahasa nasional, wajarlah apabila lebih dahulu dipaparkan keadaan bahasa nasional dewasa ini.

Ada pepatah bahasa Belanda yang berbunyi: *Zoveel hoofden, zoveel zinnen* (artinya lebih kurang: "Sekian banyak orang, sekian banyak pendapat", "Makin banyak orang, makin banyak pula pendapat") Tentang keadaan bahasa nasional dewasa ini pun terdapat pelbagai pendapat. Pendapat-pendapat itu dapat dimasukkan ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. golongan yang optimistis, dan
- b. golongan yang pesimistis.

Golongan a mengakui adanya pelbagai kekurangan pada bahasa nasional dewasa ini. Akan tetapi, mereka melihat kekurangan-kekurangan itu hanya se-

bagai "penyakit kanak-kanak" yang akan hilang bila si anak menjadi dewasa. Oleh karena itu, golongan tersebut senantiasa dengan senyum di bibir melakukan segala upaya di dalam batas kemampuan mereka untuk mempercepat hilangnya penyakit kanak-kanak itu. Golongan *b* melihat kekurangan-kekurangan yang melekat pada bahasa nasional dewasa ini dengan muka yang tegang.

Penulis ini menempatkan diri di dalam golongan *a*. Beberapa hal tentang keadaan bahasa nasional dewasa ini yang dipandang penting untuk ditonjolkan adalah sebagai berikut:

- a. Bentangan sayap bahasa Indonesia telah bertambah luas; sejumlah negara asing memandang bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mempunyai hari depan gemilang di dalam pergaulan internasional, terutama di kawasan yang meliputi negara-negara tersebut, sehingga sejak beberapa tahun yang lalu bahasa Indonesia diajarkan dan dipelajari di sana.
- b. Setapak demi setapak bahasa Indonesia dapat dibawa ke titik yang memungkinkan terjadinya pengenalan bahasa Indonesia dengan ilmu pengetahuan mutakhir.
- c. Di samping hal-hal yang menggembirakan itu, ada pula hal-hal yang dapat membangkitkan kerisauan, yaitu antara lain:
 - (1) Jumlah orang yang menguasai bahasa nasional secara baik masih lebih kecil daripada jumlah orang yang tidak dapat menguasainya secara baik, yang disebabkan oleh:
 - (a) Sistem pengajaran yang belum mampu mengenai sasaran secara tepat;
 - (b) kekurangan kegairahan dan kemauan pada sejumlah kecil orang untuk mawas diri dan kemudian mengadakan perbaikan-perbaikan di dalam pemakaian bahasa Indonesia; orang-orang ini seringkali memperlihatkan kekurangan kegairahan itu dengan mengajukan pertanyaan seperti:
 - Mengapa saya harus mempelajari bahasa Indonesia?
 - Bukankah bahasa Indonesia itu milik kita sendiri yang sudah terpatери erat dengan pribadi kita masing-masing.
 - (2) Jumlah orang yang suka menggunakan atau menyisipkan kata-kata asing ke dalam kalimat bahasa Indonesia dan orang yang lebih cepat menjatuhkan pilihan pada kata atau istilah asing untuk hal-hal yang sebenarnya dapat dikatakan atau diungkapkan dengan kata, istilah atau ungkapan bahasa Indonesia asli, masih cukup banyak golongan ini orang-orang yang latah, yaitu orang-orang yang suka serta merta mengikuti atau mencontoh kebiasaan menggunakan kata, istilah atau ungkapan asing. Kelatahan ini turut mempercepat penyebaran sikap

yang salah itu ke seluruh pelosok.

Dengan pengetahuan tentang keadaan bahasa nasional dewasa ini sebagai bahan, politik, yang pada hakekatnya ialah pemilihan alternatif-alternatif, bahasa nasional harus mempunyai ruang-lingkup yang memungkinkan tercapainya hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembentukan manusia-manusia pembangunan, dalam hal ini, pembangunan di bidang pembinaan bahasa nasional; manusia yang senantiasa mawas diri dan sanggup mengobarkan dinamika diri untuk diabdikan kepada usaha memberikan posisi dan status yang sebaik-baiknya, kepada bahasa nasional, baik secara nasional maupun secara internasional.
- b. Pengayunan bahasa nasional itu secara lebih baik oleh manusia-manusia pembangunan tersebut untuk ini memerlukan:
 - (1) pembakuan bahasa nasional pada semua sektornya;
 - (2) pembukaan pintu bagi masuknya kata dan istilah asing (untuk kemudian diserap) ke dalam bahasa nasional di dalam rangka usaha pembakuan itu, apabila pemasukan unsur-unsur asing tersebut memang benar-benar perlu;
 - (3) pemberian tempat kepada bahasa-bahasa daerah secara berimbang dengan bahasa nasional sehingga bahasa nasional dan bahasa daerah dapat saling mendukung di dalam pengabdian bersama kepada kepentingan nasional;
- c. Pembentukan sebuah badan yang dibekali dengan wewenang penuh untuk melakukan pengawasan dan pengendalian upaya-upaya yang diuraikan pada huruf *a* dan *b*.

2.4 'Pertahanan-Keamanan Nasional.

Di dalam jilid I buku Repelita Kedua pada Bagian III (Bidang-bidang Pembangunan) di belakang nomor urut 28 tertulis: "Pertahanan dan Keamanan". Dengan demikian, pertahanan-keamanan ditetapkan sebagai salah satu bidang pembangunan. Apakah yang dimaksudkan dengan pertahanan keamanan nasional? Salah satu syarat mutlak untuk menyukseskan perjuangan nasional yang dilandasi Pancasila berupa kondisi yang memungkinkan negara dan rakyat hidup aman dan damai, bebas dari segala gangguan di dalam segala bentuk dan manifestasinya. Di dalam kondisi demikian negara dan rakyat dapat melaksanakan tugas kewajiban masing-masing sebaik-baiknya di dalam rangka usaha mencapai tujuan perjuangan karena di dalam kondisi itu terdapat keselarasan antara kemerdekaan dan keadilan, kebutuhan jasmaniah dan tuntutan rohaniah yang dapat dipenuhi, dan ketenteraman serta ketertiban lahir batin, bebas dari perasaan takut dan tekanan-tekanan batin yang lain. Di dalam kondisi demikian tiap-tiap orang dapat menjalankan aktivitas

sosialnya secara konstruktif dan produktif untuk mempertinggi kebahagiaan hidup bagi diri sendiri khususnya dan bagi masyarakat umumnya, menuju ke masyarakat yang "tata tentram kerta raharja". Tanpa kondisi tersebut bangsa Indonesia tidak akan memiliki ketahanan nasional yang tangguh. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai kondisi tersebut di atas tercakup di dalam upaya yang disebut "pertahanan keamanan nasional". Upaya ini merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Oleh karenanya, tidaklah sulit difahami bahwa ruang lingkup upaya itu, ruang lingkup pertahanan keamanan nasional, meliputi segala bidang kehidupan negara dan rakyat. Seluruh rakyat dan seluruh potensi serta kekuatan nasional harus turut serta di dalam upaya tersebut. Pertahanan-keamanan di dalam hubungan ini merupakan istilah dwitunggal yang di dalam penggunaannya ganti berganti beroleh tekanan bergantung kepada intensitas bahaya yang dihadapi. Apabila intensitas bahaya atau gangguan yang dihadapi menempatkan kelangsungan hidup negara dan bangsa di dalam taruhan, maka tekanan diletakkan pada "pertahanan" dan penggunaan segala dana serta tenaga disesuaikan dengan itu, sedangkan apabila intensitas bahaya atau gangguan yang dihadapi tidak mempertaruhkan kelangsungan hidup negara dan bangsa, tekanan diletakkan pada "keamanan" dengan penggunaan dana serta tenaga yang sesuai pula. Bangsa Indonesia telah beroleh pengalaman di dalam perjuangan terus-menerus sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Pengalaman tersebut merupakan sumber yang tak ternilai harganya bagi kelanjutan perjuangan nasional. Dari pengalaman itu, bangsa Indonesia beroleh pelajaran bahwa berkat penggalangan seluruh kekuatan dan seluruh potensi nasional telah tercapai sukses-sukses perjuangan. Di dalam menghadapi usaha-usaha melanjutkan perjuangan, pembinaan, dan penggunaan kekuatan serta potensi nasional secara integral harus memperoleh pencurahan perhatian. Perjuangan nasional yang meledak pada tanggal 17 Agustus 1945 didorong dan digerakkan oleh amanat penderitaan rakyat serta dijiwai oleh falsafah Pancasila. Ia merupakan perwujudan tekad dan niat bangsa Indonesia untuk mengakhiri penderitaannya dan sekaligus untuk membentuk sebuah negara kesatuan sebagai wadah serta alat perjuangan bangsa di tengah-tengah pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Sungguh tepatlah pernyataan bangsa Indonesia kepada dunia bahwa tujuan perjuangan nasional bangsa Indonesia ialah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis di dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Apabila bangsa Indonesia dapat memelihara dan menegakkan kondisi yang memungkinkan berdirinya masyarakat demikian, bangsa Indonesia memiliki KETAHANAN NASIONAL. Apakah yang diartikan dengan ketahanan nasional? Ketahanan nasional ialah kemampuan, keuletan, dan daya tahan (nasional untuk menghadapi segala tan-

tangan, ancaman dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, yang langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ruang lingkup pengertian ketahanan nasional menampakkan dengan jelas bahwa:

- a. mau atau tidak mau, suka atau tidak suka pengaruh kondisi dan situasi di dalam hubungan antarbangsa harus beroleh pencurahan perhatian yang seksama;
- b. ketahanan merupakan *resultante* yang muncul dari interaksi segala daya, dana, tenaga, dan lain-lainnya di segala bidang kehidupan bangsa yang dikerahkan dan kemudian digerakkan secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- c. manusia Indonesia, baik secara perorangan maupun di dalam ikatan golongan, merupakan pangkal ketahanan.

Tidak perlu diragukan, bahwa dengan memiliki ketahanan nasional, bangsa Indonesia akan mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketahanan nasional ini dapat ditegakkan melalui dua cara pendekatan, yaitu pendekatan melalui kesejahteraan dan pendekatan melalui keamanan. Kedua cara tersebut saling mengisi. Sekali lagi, upaya untuk memungkinkan terwujudnya kondisi yang memunculkan ketahanan nasional itu ialah upaya yang disebut "pertahanan keamanan nasional." Di dalam rangka ini bangsa Indonesia melahirkan sebuah doktrin yang beberapa bulan yang lalu diperjuangkan di dalam konferensi internasional tentang hukum laut yang berlangsung di Caracas. Doktrin ini ialah **WASAN NUSANTARA**. Pokok-pokok yang terkandung di dalamnya ialah:

- a. bahwa Nusantara sebagai wawasan adalah pandangan dan sikap bangsa untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, dengan azas keseimbangan;
- b. bahwa Nusantara sebagai kesatuan politik mengandung prinsip-prinsip:
 - (1) kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya yang menegaskan kesatuan wilayah, kesatuan wadah, kesatuan ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, dan merupakan modal dan milik bersama bangsa;
 - (2) kebinekaan di dalam keekaan yang mengharuskan bangsa Indonesia yang terdiri dari pelbagai suku bangsa dengan pelbagai bahasa daerah, yang memeluk pelbagai macam agama dan meyakini pelbagai macam kepercayaan, menampakkan wujud yang satu, utuh, dan bulat di dalam arti yang seluas-luasnya; dengan kata lain, menampakkan kesatuan bangsa yang kokoh;
 - (3) kesatuan tekad di dalam perjuangan untuk mencapai tujuan nasional yang mengharuskan bangsa Indonesia secara psikologis terikat oleh

perasaan yang satu, yaitu perasaan senasib sepenanggungan;

- (4) kesatuan landasan perjuangan yang mengharuskan bangsa Indonesia di dalam perjuangan mencapai tujuan nasional tunduk secara mutlak kepada ideologi yang satu, yaitu Pancasila
- (5) kesatuan hukum yang mengharuskan bangsa Indonesia memelihara dan mengembangkan hukum nasional yang satu;
- (6) kesatuan pertahanan keamanan yang mengharuskan bangsa Indonesia melakukan upaya yang satu di dalam usaha mewujudkan kondisi aman yang merupakan salah satu syarat mutlak untuk menyaksikan perjuangan nasional.

c. bahwa Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya mengandung prinsip-prinsip:

- (1) bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus berwujud peri kehidupan yang bulat utuh dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang serta dengan sikap hidup yang selaras dengan kemajuan bangsa;
- (2) bahwa pelbagai corak dan ragam budaya yang melukiskan kekayaan budaya bangsa merupakan modal dan landasan pengembangan budaya bangsa yang satu;

d. bahwa Nusantara sebagai kesatuan ekonomi mengandung prinsip-prinsip:

- (1) bahwa kekayaan wilayah bangsa baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah Tanah Air;
- (2) bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus sama di semua daerah tanpa pengabaian ciri-ciri khas daerah di dalam usaha pengembangan ekonomi daerah.

2.5. Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan di atas ketahanan nasional ialah kemampuan keuletan, dan daya tahan kita (nasional) untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, yang langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ia merupakan *resultante* yang muncul dari interaksi segala daya, dana, tenaga, dan lain-lainnya di segala bidang kehidupan bangsa yang dikerahkan dan kemudian digerakkan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Bahasa merupakan tiang pancang kebudayaan. Apabila tiang pancang bermutu kurang baik, kebudayaan otomatis kekurangan untuk berdiri tegak mengabdikan kepada kepentingan nasional. Ini berarti bahwa salah satu bidang kehidupan bangsa dan negara rentan terhadap ancaman. Maka jelaslah bahwa politik pertahanan keamanan nasional yang menggariskan kebijaksanaan di dalam upaya rakyat (upaya yang sekaligus merupakan salah satu fungsi peme-

rintahan) untuk mewujudkan kondisi aman (dan dengan kondisi ini dapat ditegakkan ketahanan nasional yang tangguh) sebagai salah satu syarat mutlak untuk menyukkseskan perjuangan nasional mempunyai korelasi yang erat dengan politik bahasa nasional. Dengan demikian, tepat pulalah langkah yang telah diambil oleh pemrakarsa seminar berupa pelemparan masalah politik bahana nasional dihubungkan dengan masalah ketahanan nasional ke tengah-tengah seminar.

Kepustakaan

1. Buku CADEK
2. Lothrop Stoddard. 1921. *The New World of Islam*.
3. Prof. Mr. A.A.H. STRUYCKEN 1915-1917 *Het Staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden*.
4. Me J. BIERENS DE HAAN, 1952. *Grondslagen der Samenleving*.
5. FREDERICK HERTZ. 1950. *Nationality in History and Politics*.

7

**POLITIK BAHASA NASIONAL
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

BASJUNI SURIAMIHARDJA

1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang politik bahasa nasional dihubungkan dengan pengembangan pendidikan akan membawa kita kepada ruang lingkup permasalahan yang sangat luas. Hubungan bahasa dengan pendidikan merupakan hal yang sangat mutlak. Dengan perkataan lain, proses pendidikan tidak mungkin tanpa bahasa.

Bahasa nasional kita dewasa ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Bukan permasalahan yang menyangkut fungsi, status atau kedudukan hukumnya karena bahasa Indonesia baik praktis maupun politis sudah merupakan kenyataan sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa ilmiah yang secara yuridis tercantum dalam undang-undang dan praktis telah digunakan oleh segenap warga bangsa Indonesia dengan penuh kesadaran.

Kedudukan dan kehidupan bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang patut kita banggakan, dibanding dengan kehidupan bahasa-bahasa nasional lain di negara-negara berkembang yang sebaya dengan kita. Meskipun demikian, kemajuan ilmu dan teknologi di negara-negara yang sudah maju yang membawa perubahan pada setiap aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat fisik materil maupun mental spirituil, membawa pengaruh pula terhadap kehidupan bahasa. Demikianlah, tidak terkecuali, bahasa nasional kita.

Dengan demikian, dewasa ini kenyataan menuntut kepada kita semua untuk menentukan politik bahasa nasional dalam rangka membina dan mengembangkan kehidupan bahasa nasional, yang serasi dengan tuntutan keadaan. Mengenai masalah pendidikan, seperti halnya peristiwa yang terjadi di bidang bahasa, dewasa ini kita dan umat manusia di seluruh dunia pada umumnya sedang dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang makin berat dan makin kompleks. Ini berarti manusia memerlukan adanya bimbingan baru yang realisasinya dijabarkan dalam bentuk pendekatan-pendekatan baru secara konseptual di sektor pendidikan.

Menyinggung masalah pelaksanaan pendidikan tidak bisa tidak harus menyinggung ruang lingkup kehidupan pendidikan di tiga lingkungan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan ini harus berjalan harmonis, isi-mengisi dan berkelanjutan, lebih-lebih bila kita berpijak pada prinsip bahwa proses pendidikan berlangsung seumur hidup.

Menyinggung lingkungan pendidikan formal, yaitu persekolahan, tinjauan kita di samping kepada sekolah-sekolah umum dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, harus menyangkut pula madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren sebagai lembaga pendidikan formal yang tradisional yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan menampung sejumlah anak didik yang tidak sedikit. Apa yang dimaksud dan yang dituju dengan pengembangan pendidikan kongkretnya adalah tepat bila kita landaskan kepada segala usaha nasional yang menuju perwujudan tercapainya tujuan pendidikan seperti yang

tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPR No. IV/1973. Mengenai pelaksanaan di lingkungan pendidikan formal saja, sebagaimana tercantum dalam Pelita II, kita menghadapi berbagai bidang permasalahan yang sedang dihadapi secara pragmatis, yang meliputi:

1. masalah relevansi isi dan sistem pendidikan dengan pembangunan dan pengembangan kesempatan kerja;
2. masalah peningkatan mutu;
3. masalah penyediaan penampungan kesempatan belajar bagi anak-anak sebagai salah satu pencerminan asas keadilan sosial;
4. masalah pembinaan bakat dan kesanggupan berprestasi;
5. inovasi sistem penyajian dan pengembangan kurikulum;
6. peningkatan kualifikasi dan pemerataan tenaga guru dan tenaga teknis;
7. pembinaan perguruan-perguruan swasta nasional;
8. penerapan secara seksama asas tiga komponen penanggung jawab pendidikan;
9. masalah putus sekolah (*drop-out*);
10. penyerasian kurikulum ilmu-ilmu pengetahuan umum pada madrasah-madrasah dan sekolah umum;
11. peningkatan peranan lembaga-lembaga pendidikan dalam proses menumbuhkan suatu tata cara kehidupan nasional yang lebih berorientasi disiplin kerja secara produktif; dan
12. pemantapan tanggung jawab fungsional atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh.

Suatu hal yang patut kita syukuri adalah bahwa perhatian, baik dari orang tua murid dan masyarakat maupun dari Pemerintah terhadap pendidikan pada saat ini sungguh menggembirakan. Sejalan dengan prestasi pembangunan yang telah dicapai, khususnya dibidang ekonomi, mulai pada tahun terakhir Pelita I, perhatian Pemerintah terhadap bidang pendidikan sangat besar. Betapa besar usaha dan anggaran belanja negara yang diinvestasikan di bidang pendidikan pada saat ini belum pernah terjadi pada masa-masa Pemerintahan mana pun di Indonesia sebelumnya. Hal-hal tersebut kiranya dapatlah menjadi bahan pertimbangan dalam memikirkan dan merencanakan sesuatu kebijaksanaan.

Akhirnya, dengan bertolak dari berbagai tinjauan dan permasalahan tersebut tadi, kita memikirkan dan menentukan politik bahasa nasional dihubungkan dengan pengembangan pendidikan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa permasalahan yang diikuti dengan saran-saran seperlunya.

2. ASUMSI DAN MASALAH MENGENAI HUBUNGAN ANTARA KEHIDUPAN BAHASA DAN PENDIDIKAN

Masalah politik bahasa yang bagaimanakah yang sejalan dan saling mendorong dengan pengembangan pendidikan dapatlah diperinci menjadi ber-

bagai anak masalah. Diantara anak-anak masalah yang terpenting dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa bahasa dan pendidikan merupakan dua hal yang bertalian dengan eratny telah merupakan pendapat setiap orang. Bahasa adalah alat utama dalam pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menyumbangkan sahamnya yang tak ternilai untuk mengembangkan dan membina bahasa. Kedua-duanya bekerja sama tunjang-menunjang dalam membentuk, memelihara, serta mengangkat martabat manusia. Sebaliknya, martabat manusia yang meningkat, akan merupakan pangkal tolak berikutnya bagi bahasa dan pendidikan, dan seterusnya, sebagaimana halnya spiral berputar dan meninggi.

Bahasa dan pendidikan adalah dua hal yang paling mengembangkan dan saling meningkatkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Keduanya juga merupakan motor penggerak bagi peningkatan aspek-aspek kebudayaan lainnya, baik yang bersifat lahiriah maupun bathiniyah. Demikian pula aspek-aspek kebudayaan itu pada gilirannya secara timbal balik menggerakkan dan menuntut pertumbuhan bahasa dan pendidikan.

- b. Hubungan dan pertalian yang erat antara pengembangan bahasa dan pengembangan pendidikan berlangsung dalam keluarga, lembaga-lembaga pendidikan formal, dan masyarakat.

Pertumbuhan yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga pendidikan mempengaruhi pertumbuhan yang berlangsung dalam keluarga dan dalam masyarakat. Juga sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan berbahasa dalam keluarga dan masyarakat; baik dalam percakapan maupun melalui media komunikasi, memberi warna yang cukup dominan bagi kehidupan berbahasa dan tantangan pembinaan serta pengembangan bahasa di lembaga-lembaga pendidikan formal.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana kurikulum sekolah dan media komunikasi di luar sekolah dapat berfungsi secara sinkron dan harmonis dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dan pendidikan.

- c. Sejalan dengan usaha pengembangan pendidikan formal dan berpijak pada adanya jenjang persekolahan, ruang lingkup pengembangan bahasa pun pasti memperhatikan hal ini. Perbedaan ruang lingkup pengajaran bahasa pada berbagai jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi sudah diatur dalam kurikulum lembaga-lembaga persekolahan yang bersangkutan.

Pada dasarnya kurikulum yang secara resmi berlaku pada lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah dewasa ini dibuat pada tahun 1968.

Yang masih menjadi masalah adalah pada jenjang dan jenis sekolah-sekolah yang manakah pengajaran bahasa perlu mendapat penekanan lagi.

Apakah volume, isi, dan metode pengajaran bahasa yang tercantum dalam kurikulum yang sekarang itu perlu mendapat peninjauan lagi. Sejalan dengan itu, apakah pengaturan kedudukan berbagai bidang kebahasaan (nasional, daerah, asing) sudah tepat diwadahi secara rasional dalam kurikulum sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pendidikan dan bagi kehidupan sehari-hari? Sejauh manakah telah ada keimbangan fungsional bagi kehidupan praktis sehari-hari antara jumlah mata pelajaran bahasa asing dan bahasa-bahasa daerah, terutama di sekolah-sekolah menengah? Di samping itu, bagaimana pula hubungan pengajaran bahasa pada madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren sebagai lembaga-lembaga pendidikan formal yang tradisional dan yang menampung lebih kurang 20% anak didik dibandingkan dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah umum?

- d. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tampak adanya perbedaan selera dalam penggunaan bahasa atau istilah.

Penerapan selera secara polos atas dasar kesantiaian dan prestise sosial dan sangat pribadi itu kadang-kadang tanpa disertai kesadaran akan kebanggaan nasional atas penggunaan bahasa sendiri dapat menimbulkan semacam ancaman bagi kehidupan bahasa. Masyarakat kita yang di dalam kehidupannya, cukup menghargai para pemimpinnya, baik yang tradisional, yang fungsional ataupun karismatis, menempatkan para pemimpin pada posisi percontohan dan pembawa perubahan. Sehubungan dengan hal tersebut, timbul persoalan mengenai bagaimana potensi-potensi sosial itu dapat senantiasa membantu pembinaan dan pengembangan bahasa nasional secara positif.

Keempat anak masalah yang didasari oleh asumsi-asumsi itulah yang akan dibahas pada bagian berikut ini.

3. FAKTA-FAKTA PERMASALAHAN YANG DIJUMPAI DI LAPANGAN DAN SARAN PENDEKATANNYA

- a. Pada 2a di atas telah dikemukakan bahwa relevansi antara pengembangan bahasa dan pengembangan pendidikan erat sekali. Masalah yang masih perlu dipecahkan ialah bagaimana meningkatkan tarafnya. Hal-hal berikut ini memberikan gambaran mengenai hal itu.

1. Di negara-negara maju diperoleh pengalaman bahwa perkembangan dunia pengetahuan dan teknologi antara lain berakibat penambahan atau lahirnya kata-kata atau istilah-istilah baru setiap hari. Pengalaman ini sekarang meresap ke lingkungan kosakata kita meskipun dalam corak yang agak berlainan. Sejumlah besar istilah asing memasuki dunia ilmu pengetahuan, perguruan-perguruan dan masyarakat kita. Peristilahan itu diperlukan secara berbeda-beda. Ada yang dipakai tanpa perubahan dan ada yang diterjemahkan atau

disesuaikan sehingga di segi lain tidak sedikit menimbulkan "kekacauan". Kekacauan peristilahan ini cukup mengkhawatirkan, apalagi terjadinya ini di tengah-tengah kesadaran dan usaha kita untuk senantiasa menjadikan bahasa Indonesia bahasa ilmiah.

Keadaan semacam itu menunjukkan bahwa pembinaan bahasa kalah cepat dan belum seimbang dengan kecepatan pertumbuhan masyarakat, khususnya dalam bidang ilmu dan teknologi. Dengan demikian, keadaan menuntut para ahli bidang ilmu yang bersangkutan, termasuk ahli bahasa, agar secara dinamis melakukan standardisasi istilah-istilah. Hal ini mendorong urgensi penulisan kamus (umum dan istilah) yang cukup lengkap dan progresif.

2. Setelah dua tahun ejaan baru bahasa Indonesia berlaku, masih banyak hal-hal yang belum terselesaikan. Hal ini dapat disadari, karena dewasa ini kita masih berada dalam saat peralihan. Bahan-bahan pelajaran di sekolah masih banyak yang tertulis dalam ejaan lama dan penerapan ejaan yang baru masih belum merata. Meskipun demikian, gejala ke arah pemakaian ejaan khusus dalam beberapa koran atau penulisan teks bahasa Indonesia dalam film-film, menyimpang dari ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, cukup jelas. Hal ini menyangkut disiplin nasional yang menimbulkan permasalahan yang tidak kecil pula bagi murid-murid di sekolah. Dalam hal ini, semua warga negara dan para pemakai bahasa umumnya perlu senantiasa membina konsensus nasional untuk mentaati ejaan bahasa yang resmi dengan penuh disiplin.
3. Di perguruan tinggi masih sangat dirasakan kurangnya buku-buku ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Pada umumnya para mahasiswa, terutama pada tingkat-tingkat permulaan, masih terbatas kemampuannya untuk mempelajari ilmu pengetahuan langsung dari buku yang ditulis dalam bahasa asing. Di segi lain, terjemahan-terjemahan, selain dari masih sangat terbatas, ada kesulitan pula mengenai bahasa terjemahannya. Keadaan ini berakibat kurang baik terhadap pemahaman dan perkembangan ilmu serta pendidikan itu sendiri. Hal ini mendorong keharusan disempurnakannya kegiatan penterjemahan buku-buku ilmiah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan secara nasional.
4. Dalam hubungan dengan fakta-fakta di atas dapat kiranya dimaklumi bahwa politik bahasa yang dihubungkan dengan pengembangan pendidikan haruslah berkaitan dengan upaya penyediaan fasilitas-fasilitas belajar yang baik dan mencukupi. Penyediaan kamus (umum, istilah) yang baru dan progresif, peningkatan usaha terjemahan buku ilmiah yang ditulis dalam bahasa asing, pengadaan

buku-buku pelajaran bagi murid-murid dalam jumlah yang mencukupi, penulisan buku-buku informasi bagi murid-murid dan guru-guru, buku-buku ceritera dan lain-lain, merupakan kebutuhan mutlak.

Umumnya masyarakat umum pemakai bahasa belum banyak yang memiliki kamus, baik kamus bahasa Indonesia, maupun kamus bahasa daerah. Meskipun tidak sedikit yang berminat, barangnya sering jarang didapat. Hal tersebut secara otomatis menyangkut pula hubungan timbal balik antara bahasa, pengembangan pendidikan dan masalah perbukuan dan perpustakaan secara nasional. Penentuan politik bahasa nasional harus berpaut dengan politik perbukuan dan perpustakaan dengan segala aspeknya.

- b. Dalam 2b di gambarkan bahwa kehidupan bahasa di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat saling isi-mengisi dan pengaruh-mempengaruhi. Dalam hal ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan sehari-hari, murid-murid sekolah mendengar dan berpartisipasi dalam pembicaraan di lingkungan keluarganya, membaca surat kabar dan media tertulis lainnya, mengikuti acara radio dan televisi, mendengar pidato pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Banyak sekali ucapan kata, struktur kalimat, peristilahan, singkatan dan sebagainya yang berlainan dari tuntunan bahasa di sekolah. Hal itu menjadi unsur yang mempengaruhi perkembangan jiwa dan watak anak. Menertibkan, mengembangkan, dan mendisiplinkan kehidupan berbahasa pada setiap lingkungan kehidupan dalam masyarakat di luar sekolah adalah suatu usaha yang akan menunjang suasana pengembangan pendidikan.
2. Di sekolah sendiri jumlah jam khusus untuk pelajaran bahasa nasional, umumnya memiliki proporsi yang mencukupi. Dikemukakan secara "khusus", karena dengan berfungsi sebagai bahasa pengantar untuk semua mata pelajaran dan kegiatan sekolah, maka bahasa Indonesia akan turut berkembang sejalan dengan pengembangan ilmu-ilmu yang diantarkannya itu. Dalam hubungan ini, kerja sama antara guru bahasa dan guru mata pelajaran lain dalam hubungan dengan pembinaan bahasa merupakan tuntutan yang mutlak. Yang masih menjadi masalah dalam pengajaran bahasa Indonesia adalah pengisiannya dengan materi dan cara penyajiannya.
3. Peranan "guru kelas" di sekolah dasar secara fundamental adalah menentukan sekali dalam penanaman kesanggupan berbahasa bagi anak-anak secara baik. Karena itu, kegiatan pengajaran bahasa di sekolah guru menghendaki peningkatan yang lebih baik di samping

terselenggaranya pembinaan bagi guru yang telah aktif bertugas dalam bentuk usaha-usaha penataran yang berencana.

- c. Mengenai pengajaran bahasa pada lembaga pendidikan formal, dewasa ini ada beberapa hal yang perlu dicatat, yaitu:
 1. Kebanyakan sekolah dasar di daerah tertentu menggunakan bahasa ibu (bahasa daerah) sebagai bahasa pengantar di kelas I sampai dengan kelas III, di samping sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sejak kelas I. Taman kanak-kanak umumnya mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
 2. Sementara itu, anak-anak tamatan sekolah dasar menunjukkan, bahwa mereka belum cukup mampu menggunakan bahasa Indonesia. Anak-anak kelas VI sekolah dasar pada umumnya masih belum mampu menangkap bahan pelajaran secara seksama yang diberikan dalam bahasa Indonesia sehingga guru kadang-kadang terpaksa menerangkan dengan bahasa daerah (penelitian Drs. Yoes Roesyana, tahun 1971).
 3. Ada sekolah dasar pada Proyek Perintis Sekolah Pembangunan yang mencoba mengajarkan bahasa asing (bahasa Inggris) kepada murid-muridnya sebagai percobaan.

Hal-hal tersebut di atas menggambarkan adanya sesuatu yang memerlukan ketegasan dan ketepatan kebijaksanaan. Masa anak-anak merupakan periode yang sangat penting untuk membentuk watak dan kepribadian secara fundamental dan bahasa memegang peranan yang sangat menentukan.

Dewasa ini sekolah dasar di samping merupakan lembaga pendidikan umum dan fundamental juga merupakan kebutuhan pendidikan minimal warga bangsa kita. Lapisan terbesar masyarakat kita terdiri dari tamatan sekolah dasar. Dengan demikian, tekanan pilihan utama politik pembinaan bahasa nasional sehubungan dengan lembaga persekolahan haruslah diletakkan di sekolah dasar, termasuk madrasah-madrasah Ibtidaiyah dan pesantren-pesantren yang setingkat.

Bahasa daerah sebagai bahasa yang digunakan dalam kehidupan rakyat sehari-hari perlu mendapat tempat yang rasional. Hubungan timbal balik dan isi-mengisi antara bahasa nasional dan bahasa daerah haruslah dihadapi dengan kebijaksanaan pembinaan secara harmonis dan yang terhindar dari keadaan pengaruh-mempengaruhi secara negatif.

Selanjutnya, baiklah kita tinjau situasi pendidikan kebahasaan di tingkat sekolah menengah:

1. Anak-anak lulusan sekolah lanjutan atas sekarang pada umumnya dirasakan belum cukup mampu menguasai bahasa asing sebagaimana diperlukan untuk kelanjutan studinya di perguruan tinggi. Padahal di perguruan Tinggi mereka dituntut agar segera dapat menggunakan bahasa itu untuk dapat belajar dari sumber ilmu berbahasa asing (khususnya bahasa Inggris).
2. Sementara itu, terdapat juga keluhan-keluhan dari dosen di perguruan tinggi mengenai rendahnya mutu dan kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa-mahasiswa tingkat permulaan.
3. Dari berbagai pihak di masyarakat seringkali terdengar permintaan agar pengajaran bahasa daerah dapat diperluas ke semua jenis dan jenjang pada sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas sampai dengan kelas tertinggi.

Pelajaran bahasa asing sebagai alat untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta komunikasi internasional haruslah ditempatkan dalam proporsinya yang wajar. Anak-anak sekolah menengah harus mendapat cukup bekal kemampuan berbahasa asing sehingga kelanjutan studinya di perguruan tinggi tak perlu mendapat hambatan-hambatan.

Selain itu, identitas nasional dan kepentingan praktis tidak boleh dikorbankan. Dengan belajar bahasa asing kita tidak bermaksud menjadikan masyarakat kita berbahasa asing; tidak boleh pula kepentingan umum dikorbankan untuk keperluan sebagian kecil warga masyarakat yang mendapat kesempatan melakukan hubungan internasional.

Di samping itu, adalah kewajiban mutlak setiap warga negara untuk senantiasa membina dan mengembangkan bahasa Indonesia benar-benar sebagai bahasa ilmiah yang selalu relevan dengan segala perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat itu sendiri. Mengabaikan bahasa daerah dapat menimbulkan kesulitan berkomunikasi dengan masyarakat banyak, dan ini bisa berarti tidak tembusnya penghayatan penemuan-penemuan baru dan pembaharuan-pembaharuan kepada bagian terbesar bangsa kita, padahal untuk berhasilnya usaha-usaha pembangunan hal tersebut merupakan syarat mutlak. Penerangan-penerangan yang disampaikan dalam bahasa Indonesia kepada masyarakat pedesaan yang umumnya hanya mengerti dengan baik melalui bahasa daerah, akan terlalu banyak memakan waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Anggota Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menerangkan bagaimana seharusnya melakukan keluarga berencana, dokter menanyakan gejala-gejala penyakit yang diderita pasiennya, ulama menerangkan bagaimana beribadat haji, pamong desa menerangkan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan falsafah dan pengamalan hidup

Pancasila. Ini semua pada saat-saat ini hanya bisa dipahami jelas dengan melalui bahasa daerah. Atas dasar hal-hal tersebut diperlukan adanya kehamonisan pembinaan yang rasional dalam ketiga bidang kebahasaan itu, dan pelaksanaannya harus jelas tergambar dalam kurikulum sekolah. Adalah hal yang rasional, sesuai dengan kehidupannya dalam masyarakat sehari-hari, apabila dipertimbangkan pula untuk semua jenjang dan jenis sekolah menengah.

Di tingkat perguruan tinggi, berbagai jurusan bahasa dan sastra berkembang dengan baik. Tetapi perhatian masyarakat kepada bahasa asing lebih besar daripada perhatiannya kepada bahasa nasional, apalagi bahasa daerah. Mengingat kedudukan dan fungsi bahasa seperti telah dikemukakan di atas maka situasi semacam itu sungguh-sungguh tidak menggembirakan. Meskipun pada dasarnya orang punya kebebasan memilih jurusan pendidikan yang dikehendaknya, demi tegaknya identitas nasional di samping masalah pengembangan bahasa itu sendiri, politik bahasa nasional haruslah mengatasi permasalahan tersebut.

- d. Sehubungan dengan kehidupan berbahasa dalam masyarakat termasuk peranan yang dimainkan oleh tokoh masyarakat yang dianggap tokoh percontohan dan pembawa perubahan, wajarlah apabila beberapa ilustrasi berikut menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan politik pembinaan bahasa:
 1. Setelah seorang pemimpin atau tokoh masyarakat dalam pidatonya menggunakan istilah baru, maka istilah tersebut menjadi populer.
 2. Ketentuan Pemerintah atau anjuran para pejabat Pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat mengenai penggunaan kata-kata bahasa Indonesia cukup mendapat perhatian masyarakat.
 3. Pemakaian bentuk singkatan-singkatan (akronim) yang belum dibakukan dalam suatu sistem yang jelas, yang dilihat dari segi efisien secara umum kurang menguntungkan, dewasa ini masih meluas.
 4. Penggunaan istilah-istilah baru dari bahasa yang telah "mati", yang bagi masyarakat umum sama asingnya dengan istilah bahasa asing yang dialihkannya, dewasa ini tetap menjadi mode.
 5. Kebiasaan menggunakan bahasa asing di kalangan orang-orang terpelajar tertentu, secara sadar atau tidak, sebagai tanda "status atau kelas sosial", juga makin meluas.
 6. Surat-surat kabar yang memuat iklan-iklan mencari tenaga kerja, kesempatan pemasukan barang, dan lain-lain, dalam bahasa asing sedang menjadi mode. Demikian pula halnya dengan spanduk-spanduk, plakat-plakat dan sebagainya tentang suatu kegiatan usaha,

seni, olah raga, pendidikan dan lain-lainnya, meskipun tidak ada hubungannya dengan orang asing.

Situasi sosial tersebut di atas haruslah ditertibkan dan diatur secara tegas dalam ruang lingkup politik bahasa nasional. Kondisi dan faktor sosial yang menunjang haruslah dipupuk, dikembangkan, dan dimanfaatkan. Sebaliknya hal-hal yang merugikan haruslah dihilangkan. Hal-hal yang negatif sebagaimana tersebut dalam sebagian ilustrasi di atas cukup merugikan bukan saja dalam bidang bahasa tetapi juga bagi pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hubungan politik bahasa dengan pengembangan pendidikan di masyarakat harus mendapat perhatian yang sama di sekolah-sekolah. Pendidikan non-formal dan informal lebih lama dan lebih luas ruang lingkungannya, lebih-lebih dengan berpegang kepada prinsip pendidikan seumur hidup.

- e. Sebagai tambahan, kiranya cukup bermanfaat untuk dikemukakan posisi bahasa nasional dalam hubungan dengan percaturan kehidupan internasional dan integrasi program pembinaan bahasa dengan program pembangunan nasional secara keseluruhan.

1. Ditinjau secara demografis, geografis dan politis bangsa Indonesia, letak Indonesia dan posisi politik Indonesia dalam kehidupan antarnegara dan antarbangsa, khususnya di kawasan Asia Pasifik, cukup meyakinkan. Posisi Indonesia dalam ikatan regional ASEAN kiranya merupakan pembuktian.

Bahasa Indonesia sudah mulai populer dipelajari oleh orang-orang di negara tetangga termasuk negara yang tidak tergolong dalam "bangsa-bangsa serumpun", dan ada yang sudah memasukkannya dalam kurikulum persekolahan.

Masalah ini harus sudah mulai terwadahi dalam ketentuan politik bahasa nasional. Pemikiran, sewajarnya mulai dikembangkan dari pemikiran tentang posisi bahasa asing dalam kehidupan nasional kita ke arah pemikiran bagaimana bahasa Indonesia bisa mudah dipelajari dan dimanfaatkan sebagai *lingua franca* oleh bangsa-bangsa lain; khususnya di kawasan Asia Pasifik.

2. Dengan memperhatikan segala permasalahan tersebut dalam uraian di atas diketahui bahwa banyak permasalahan yang sudah mulai atau tengah digarap oleh Pemerintah dan badan-badan lain. Terlepas dari rasa puas atau tidak, permasalahan itu sudah tercantum dalam kebijaksanaan dan program Pemerintah baik dalam Garis Besar Haluan Negara maupun dalam PELITA I dan II sebagai program operasional pembangunan nasional secara menyeluruh.

Politik bahasa nasional yang dihubungkan dengan pengembangan

pendidikan nasional itu tidak terlepas dari jalinan interaksi dan interelasi dengan pembangunan nasional secara makro, yang keduanya merupakan program dan tugas nasional pula. Dengan perkataan lain, pelaksanaan dan tanggung jawab kepada tidak hanya semata-mata di tangan Pemerintah akan tetapi juga pada pundak masyarakat secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menetapkan politik bahasa, tugas dan partisipasi masyarakat haruslah tergambar secara tegas.

4. KESIMPULAN

Sampailah sekarang kepada bahagian terakhir prasaran ini. Sebagai penutup, baiklah kita coba menarik beberapa kesimpulan dari uraian yang baru lalu.

- a. Politik bahasa nasional dengan segala permasalahannya yang dihubungkan dengan pengembangan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kaitan permasalahan yang berada dalam pendidikan itu sendiri. Penetapan politik bahasa nasional harus berarti menunjang kelancaran usaha pengembangan dan pembaharuan pendidikan.
- b. Politik bahasa nasional haruslah meliputi usaha peningkatan pembinaan dan pengembangan kemampuan berbahasa dan pengembangan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan formil, keluarga, dan masyarakat umumnya.
- c. Politik bahasa nasional hendaknya meletakkan pengaturan yang tepat dan pengembangan kemampuan berbahasa dan pengembangan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan formil, keluarga, dan masyarakat umumnya.
- d. Politik bahasa nasional harus menciptakan konsensus nasional dalam usaha mengembangkan disiplin pemakaian bahasa dalam segala lapangan kehidupan.
- e. Politik bahasa nasional dan pengembangan pendidikan bertalian erat dengan politik perbukuan dan perpustakaan secara nasional.
- f. Politik bahasa nasional harus mengarah kepada prospek bahasa Indonesia menjadi *lingua franca* di kawasan Asia Pasifik.
- g. Politik bahasa nasional dengan program operasionalnya harus berintegrasi dengan kebijaksanaan dan program pembangunan nasional secara keseluruhan.

8

**POLITIK BAHASA NASIONAL
DAN PENGEMBANGAN KESUSASTRAAN**

AJIP ROSIDI

I. BEBERAPA KENYATAAN

1. Para pengajar dan sastrawan sudah lama terdengar mengeluh mengenai buruknya pengajaran (bahasa dan) sastra baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Kurikulum yang tidak jelas arahnya, dan pengajar yang jumlah dan kemampuannya tidak memadai, bahan-bahan yang jauh dari pada lengkap semuanya menyebabkan pengajaran sastra hanya seadanya. Buku-buku yang menjadi pegangan disusun oleh para guru dengan bersumber kepada karangan-karangan Teeuw dan Jassin yang berasal dari kurang lebih tahun 1950-an.

Ketinggalan jaman!

Hal itu menyebabkan para sastrawan merasa berada di luar jangkauan para pelajar. Mereka menulis dalam majalah yang tidak pernah sampai kepada para pelajar dan para guru. Sebaliknya para guru dan pelajar menganggap para sastrawan terlalu jauh melompat ke muka sehingga "sulit dimengerti". Akibatnya maka sastra dan sastrawan Indonesia adalah sesuatu yang dianggap berada di luar kehidupan nyata, yang tak mempunyai sentuhan nyata dengan masyarakat dan bangsa.

2. Kalaupun ada guru atau pelajar yang menaruh minat serius terhadap kehidupan sastra, maka ia akan menemui kesulitan dalam memperoleh buku-buku karya sastra yang hendak dibacanya. Tak adanya perpustakaan yang lengkap di tiap kota menyebabkan timbulnya kesulitan ini. Yang punya perpustakaan yang paling lengkap ialah Jakarta, antara lain berupa Dokumentasi H.B. Jassin yang terkenal itu, Perpustakaan Museum Pusat, Perpustakaan Lembaga Bahasa Nasional, Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Di kota-kota besar lain seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Ujungpandang boleh dikatakan tak ada perpustakaan yang lengkap; yang kurang lengkap pun jarang. Tapi betapapun di kota-kota besar itu buku-buku karya sastra masih lebih mudah diperoleh daripada di kota-kota kecil. Makin jauh dari Jakarta, makin sulit buku-buku itu diperoleh. Kenyataan itu menyebabkan ada yang berpendapat bahwa sastra (dalam bahasa) Indonesia adalah sastra kota, yang meliputi kurang lebih 15% penduduk. Kalau ini benar, sudah bagus, karena 15% dari 120 juta adalah 18 juta, sedang jumlah buku sastra hanya 3.000-5.000 eksemplar sekali cetak.
3. Para sastrawan Indonesia pada umumnya adalah orang kota, atau orang kampung yang kemudian menetap di kota. Mereka biasanya tumbuh menjadi pengarang karena adanya hasrat sendiri yang kebetulan memperoleh tumpuan berbagai kebetulan seperti memperoleh buku-buku sastra dengan satu atau lain jalan. Kemudian mereka mengembangkan dirinya dengan mencari sendiri. Atas usahanya sendiri yang tidak

gampang, mereka membaca karya-karya sastra Indonesia lebih dahulu (umumnya secara sporadis), kemudian membaca karya-karya sastra dunia yang biasanya lebih mudah mereka peroleh. Sastra (dalam bahasa) Indonesia adalah sebuah sastra yang baru, belum lagi satu abad usianya. Karya-karyanya belum banyak, dan kebanyakan masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang nampak dengan mudah. Hal ini menyebabkan (calon-calon) sastrawan kita lebih suka belajar dari karya-karya sastra dunia, yang lebih mudah dilakukannya daripada apabila ia ingin menggali sastra daerahnya sendiri atau salah satu sastra daerah di Indonesia. Tentu saja dalam hal ini faktor psikologis ingin kelihatan "modern" pun sampai batas-batas tertentu menjadi penyebabnya pula. Hal ini menyebabkan timbulnya kesan yang sudah banyak dikemukakan, yaitu para sastrawan Indonesia selalu memperlihatkan dirinya akrab dengan Albert Camus, Sartre, Saul Bellow, Stephen Spender, dan lain-lain, memikirkan dan membahas masalah-masalah yang menjadi topik di Eropah dan Amerika, tapi kurang langsung terasa menjadi masalah para pembaca awam Indonesia. Mungkin hal ini harus pula kita cari sebabnya pada kenyataan sejarah bahwa berkesusastraan, secara sekarang: menulis roman, esei, cerita pendek, drama dan lain-lain, sebenarnya pengaruh tradisi Barat. Bentuk-bentuk karya sastra demikian, sebelumnya tidak dikenal dalam kesusastraan tradisional di Indonesia.

4. Adalah menarik bahwa dalam kehidupan sastra Sunda modern, bentuk-bentuk roman, cerita pendek, puisi yang juga sama berasal dari Barat, sekarang sangat populer. Berlainan dengan roman-roman dan cerita pendek berbahasa Indonesia mutakhir yang banyak eksperimen dengan menekankan perhatian kepada masalah-masalah manusia, hidup, kemanusiaan, maka dalam roman-roman dan cerita pendek Sunda sekarang dituliskan persoalan kehidupan nyata manusia kongkret dalam bahasa sehari-hari. Saya kira hal yang sama terdapat juga dalam kehidupan sastra daerah yang lain, Jawa misalnya. Sastra (berbahasa) Indonesia adalah sastra kota dengan manusia-manusianya yang kompleks dengan masalah-masalah filsafat dan lain-lain sedangkan sastra (berbahasa daerah) Sunda adalah sastra padesan yang melukiskan kehidupan nyata yang dihadapi dan dihayati oleh orang-orang kampung dengan persoalan-persoalannya yang bersifat agraris. Kalaupun terjadi di kota atau tokohnya hidup di kota, sastra (daerah) Sunda tetap berwarna agraris. Dengan kata lain: sastra Indonesia adalah sastra yang bersifat intelektual individualistik; sedangkan sastra berbahasa (daerah) Sunda bersifat agraris-komunal. Kenyataan ini akan kian menarik apabila di sini dikemukakan pula bahwa pada umumnya sastra (berbahasa) Melayu (di Semenanjung) sekarang adalah juga sastra padesan. Masa sastra kota dalam sejarah perkembangan sastra Melayu di Semenanjung hanyalah

sejenak, yaitu semasa Angkatan Sastrawan 50, yang umumnya berlaku di Singapura.

II. BEBERAPA PERTANYAAN

1. Apakah kenyataan-kenyataan tersebut akan kita anggap wajar dan sesuai dengan cita-cita kita hendak menjadi bangsa yang berkebudayaan (yang berarti berkesusastraan pula)? Apabila tidak, bukankah kita memerlukan suatu politik pengembangan sastra nasional bersama-sama dengan suatu politik bahasa nasional yang jelas?
2. Dalam menyusun suatu politik pengembangan sastra nasional, di manakah letak kesusastraan klasik daerah? Di manakah letak sastra modern daerah? Bagaimanakah hubungannya dengan kesusastraan klasik dunia? Dengan sastra modern dunia?
3. Mengingat bahasa Indonesia adalah salah satu pemersatu nasional Indonesia, yang terpatrit dalam Sumpah Pemuda 1928, tidakkah seharusnya sastra Indonesia pun menjadi pemersatu pula? Tidakkah dalam hal ini perlu adanya usaha dalam pendidikan sedemikian rupa sehingga setiap anak Indonesia mengenal sastra nasionalnya dengan baik? Dan mengingat bahwa sastra nasional Indonesia itu terdiri dari sastra dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa daerah, baik klasik maupun modern, tidakkah memang perlu suatu kebijaksanaan pendidikan yang jelas dalam hal ini? Tidakkah hal itu menyebabkan perlunya ada usaha berencana dan teratur dalam mempelajari dan menterjemahkan karya-karya sastra daerah baik yang klasik maupun yang modern?
4. Tapi untuk keluasan pandangnya, bukankah tidak cukup anak Indonesia hanya berakraban dengan sastra nasionalnya saja? Tidakkah mutlak bahwa anak-anak Indonesia pun harus mengenal sastra dunia, baik klasik maupun modern? Tidakkah hal itu menyebabkan perlunya ada usaha berencana dan teratur dalam mempelajari dan menterjemahkan karya-karya sastra dunia baik yang klasik maupun yang modern? Dalam hal ini bukankah wajar apabila kita pertama-tama memberikan prioritas kepada sastra-sastra negeri tetangga, mengingat letak geografisnya serta sastra India dan sastra Arab, mengingat kedudukannya yang istimewa dalam kehidupan kerohanian kita?

III. BEBERAPA GAGASAN

1. Agar supaya anak-anak Indonesia merasa satu dalam sastra, maka perlu adanya suatu kebijaksanaan pendidikan yang menyeluruh dengan perpustakaan yang mempunyai koleksi dasar yang sama untuk setiap tingkat pendidikan yaitu setidak-tidaknya mencakup:

- a. buku-buku karya sastra berbahasa Indonesia yang lengkap;
- b. buku-buku terjemahan atau saduran sastra daerah, klasik ataupun modern;
- c. buku-buku terjemahan atau saduran sastra dunia, klasik atau modern;
- d. buku-buku berbahasa daerah, klasik atau modern.

Di tingkat sekolah lanjutan, perpustakaan itu harus berlangganan majalah-majalah kesusastraan yang penting-penting.

Mengingat perkembangan bahasa Indonesia yang sangat cepat, maka perlu diusahakan edisi mudah sastra klasik (berbahasa) Indonesia seperti Siti Nurbaya oleh Marah Roesli, dan *Muda Teruna* karya M. Kasim bagi anak-anak sekolah dasar. Demikian juga karya-karya klasik daerah seperti *Dewa Ruci*, *Munding-Laya*, dan *Si Malim Kundang*, dan karya-karya klasik dunia seperti karya-karya Shakespeare, Dumas, Tolstoy, Kalidasa, Vyasa, dan Rumi. Dalam hal ini Proyek Penyediaan Buku-buku Bacaan Sekolah Dasar yang menjadi pelaksana Inpres Pendidikan, yang konon akan berjalan beberapa tahun itu, hendaknya memprioritaskan buku-buku bacaan yang demikian. Karena sulit untuk mengharapkan buku-buku demikian dengan pasif menanti saja, maka perlu adanya suatu usaha terarah untuk penciptaan naskah-naskah, termaksud, misalnya melalui suatu loka karya para penulis.

Untuk mengetahui nilai-nilai budaya Indonesia yang terdapat dalam karya-karya sastra klasik berbahasa daerah, maka penelitian sastra perlu diselenggarakan secara berencana, teratur dan kontinu. Hasil-hasil penelitian itu hendaknya ditulis dalam bahasa Indonesia, kemudian dipublikasikan. Usaha ini akan merupakan suatu usaha raksasa, dan akan menyerap tenaga-tenaga ahli sastra daerah, sehingga dengan demikian akan memberikan motivasi yang jelas bagi para mahasiswa fakultas sastra yang memilih jurusan Nusantara atau sastra daerah. Di samping usaha penelitian, maka juga usaha penterjemahan karya-karya sastra klasik daerah yang bersifat ilmiah harus dilaksanakan secara kontinu.

Untuk menampung hasil-hasil dan untuk menjadi alat komunikasi dalam bidang penelitian dan terjemahan karya sastra daerah (dan asing), maka perlu diterbitkan sebuah majalah yang representatif. Majalah Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang diterbitkan Lembaga Bahasa Nasional, cukup sebagai sarana dasar, tapi harus diperkembangkan dan harus dicetak.

4. Untuk memberikan dorongan dan rangsangan bagi ciptaan-ciaptan kreatif ataupun penelitian, maka perlu diberikan hadiah tahunan yang berdasarkan karya (bukan jasa penulisnya). Anugerah Seni (atas jasa) yang pernah diberikan sejak 1969 (hanya sampai 1972?), perlu dimantapkan lagi

fungsi dan sasarannya, sehingga saling mengisi dengan hadiah tahunan atas karya dimaksud, Hadiah ini tidak hanya untuk karya-karya dalam bahasa Indonesia, melainkan juga dalam bahasa-bahasa daerah yang masih mempunyai kegiatan kreatif.

5. Untuk memberikan rangsangan bagi penerbitan karya-karya sastra, perlu adanya suatu kebijaksanaan perpustakaan, sehingga setiap penerbitan buku bermutu sudah mempunyai pasaran tetap sekurang-kurangnya 1.000 eksemplar. Artinya, untuk itu harus ada sekurang-kurangnya 1.000 perpustakaan (atau 500 bila masing-masing mengambil dua eksemplar) yang akan membeli buku tersebut. Untuk itu misalnya harus diusahakan agar terbentuk perpustakaan kota setidaknya di setiap kota kabupaten atau kotamadya, lebih ideal apabila bisa dibentuk di setiap kota kecamatan.

9

**PERSOALAN BAHASA INDONESIA
UNTUK PERS**

GOENAWAN MOHAMAD

Sudah banyak diketahui peranan pers dalam sejarah bahasa Indonesia pada masa lalu. Memang, penelitian yang serius tentang hal ini agaknya belum pernah dilakukan. Tetapi, biasa dicatat bahwa tanpa ikut sertanya pers dalam penggunaan dan pertumbuhan bahasa itu, barangkali Sumpah Pemuda tak akan pernah terjadi — atau tak akan banyak artinya. Karena perkara ini telah banyak dibicarakan, saya di sini tak bermaksud mengulang kaji. Dengan hormat saya telah menolak usul untuk berbicara tentang "peranan pers dalam pertumbuhan bahasa Indonesia". Kerta kerja ini justru ingin mempersoalkan kembali asumsi tentang besarnya peranan tersebut. Dalam bentuk semacam laporan dari seorang pemakai bahasa kepada para ahli bahasa, kertas kerja ini bermaksud menyampaikan beberapa kenyataan yang dihadapi pers dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia. Saya percaya, atau saya berharap, dengan ini ada tambahan sumbangan bagi pemikiran kembali politik bahasa nasional.

Menurut kesan saya, kecenderungan utama dalam politik bahasa nasional — yang menyangkut pembinaan bahasa Indonesia — selama beberapa tahun terakhir ini ialah perhatian yang lebih berat kepada bahasa Indonesia tertulis. Pertandanya ialah usaha besar penerbitan dan pembaharuan ejaan. Tentu disadari bahwa pembakuan ejaan merupakan sekedar basis ke arah yang lebih jauh. Di samping itu, memang harus diakui kenyataan bahwa bahasa Indonesia pada umumnya dipergunakan secara tertulis. Bahasa lisan orang Indonesia lazimnya bahasa daerah. Jadi, mendahulukan pembinaan bahasa tertulis dalam hal bahasa Indonesia memang cukup beralasan.

Namun marilah kita saksikan perkembangan kenyataan hampir setengah abad setelah Sumpah Pemuda tahun 1928. Tak lama lagi Indonesia akan dipersatukan komunikasinya dengan satelit domestik. Televisi akan kian jadi penting. Sejak delapan tahun yang lalu, jumlah pemancar radio diperbesar dengan hadirnya radio-radio "non-RRI", dan transistor menyusup ke hampir semua pelosok. Film Indonesia mencapai jumlah produksi yang tinggi serta pasaran yang meluas. Ada tanda-tanda penting dalam kehidupan khalayak. Kita perlu mencatat pula bahwa kegemaran membaca masih tetap tipis-bahkan relatif lebih menipis. Jumlah penduduk yang buta huruf kabarnya masih sekitar 30 persen. Dengan kata lain, yang tengah berlangsung ialah suatu loncatan tanpa kesulitan dari suatu kebudayaan "prapustaka" dan kebudayaan "post-pustaka", dari suatu kebudayaan lisan yang lama ke kebudayaan lisan yang baru.

Dan bahasa Indonesia juga ikut serta dalam loncatan itu. Meskipun, seperti dikatakan di atas, pada umumnya dan pada dasarnya bahasa lisan sehari-hari masih tetap bahasa daerah, kiranya sulit diragukan bahwa bahasa Indonesia semakin mengambil tempat dalam bahasa lisan penduduk. Pidato para pejabat, wejangan para rohaniawan, bahasa pengantar dalam rapat

organisasi pemuda, semua itu makin banyak yang mempergunakan kalimat bahasa Indonesia. Belum lagi bahasa yang dipergunakan para guru di depan kelas sejak sekolah dasar sampai dengan sekolah tinggi, bahasa dalam lalu kanak-kanak, lagu populer dan bahasa iklan yang mudah dihafal, yang terdengar lewat media di luar pers.

Dari gambaran itu kiranya dengan mudah ditarik suatu kesimpulan: perluasan basis sosial dan bahasa Indonesia pada akhirnya tidak akan berlangsung melalui pers atau penerbitan lain. Pers sendiri makin lama makin berada dalam posisi untuk dipengaruhi, dan bukannya mempengaruhi. Peranannya akan lebih bersifat pasif. Tak mengapa. Perlu diingat bahwa pers memang merupakan tempat yang merekam kenyataan dalam kehidupan bahasa melalui teknologi percetakan. Yang menjadi persoalan ialah: salah satu kenyataan yang kian penting dalam kehidupan bahasa Indonesia ialah pertumbuhan bahasa lisan — yang tak sepenuhnya siap direkam dan disebarluaskan dengan kondisi bahasa Indonesia yang ada.

Dengan itu yang saya maksudkan bukanlah tidak siapnya huruf dan ketentuan ejaan kita untuk mewujudkan bunyi dalam bentuk tertulis. Itu bukan hal yang istimewa. Yang ingin saya kemukakan di sini ialah persoalan yang tercermin dalam dua contoh di bawah ini. Keduanya merupakan kutipan dari dua surat kabar yang bersirkulasi besar dan tersebar di seluruh Indonesia:

1. ... Tjun Tjun yang tanpa kesukaran mengalahkan lawannya Elo Hansen (Denmark) dengan straight-set 15-2/15-4, atas pertanyaan "Tjun, kena apa lu lebih gesit bermain di Jakarta ini dari pada di Asian Games", Tjun Tjun katakan "Jelas dong, sekarang lebih relax dan tidak setegang waktu di Teheran
....

Sinar Harapan, 10 Oktober 1974.

2. Ah, saya sih paling nggak demen deh, denger gossip! Apalagi nggosipin orang. Saya orangnya acuan saja Boleh mereka kheki ama saya, tapi pokoknya tuh yang di atas aja deh, yang tahu", kata Ida Royani sambil menunjuk ke atas-ke langit.

Buana SMF, 27 Oktober 1974.

Dilihat dari teknik penulisan berita, contoh yang pertama menunjukkan sebuah cacat menyolok: kalimatnya terlampau panjang. "Kalimat yang terbaik", kata Gustave Flaubert, "ialah kalimat yang terpendek". Prinsip sang novelis ini, yang sepenuhnya berlaku buat bahasa jurnalistik, sayang tak diterapkan dalam contoh tadi. Di samping itu, dalam berita tersebut pertanyaan kepada Tjun Tjun itu sebenarnya tak usah dikutip langsung. Tetapi bukan soal teknik penulisan berita yang mau diperbincangkan di sini. Kedua contoh di atas bagaimanapun juga tampaknya berhasil merekam pembicaraan secara akurat. Khususnya, keduanya memantulkan kembali sifat *colloquial* percakapan yang terjadi — ditandai dengan "warna Betawi" atau

"Jakarta" dalam bahasa. Pertanyaannya kemudian: apakah itu bahasa Indonesia juga? Para wartawan yang menuliskan tanya jawab itu tak merasa perlu menterjemahkan kata seperti *lu, dong, demen, kheki, acuhan*, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kata-kata tersebut dianggap cukup dimengerti para pembaca yang berbahasa Indonesia, baik di Nganjuk maupun di Sangir Talaud. Barangkali itu juga suatu indikasi besarnya pengaruh bahasa yang hidup dalam sub-kultur remaja Jakarta ke dalam bahasa Indonesia *colloquial* di mana saja sekarang. Dan sementara dewasa ini tidak teramat mudah bagi kita untuk membedakan mana bahasa Indonesia yang *colloquial* dan mana yang bukan, pengaruh bahasa semacam itu diam-diam masuk ke dalam pers. Kutipan dari *Sinar Harapan* di atas menunjukkan gejala tersebut: ia kita temukan dalam berita olah raga, dan bukan dalam ruang antarremaja. Tak jarang akhiran *in* (misalnya *dikibulin*) muncul di kepala berita halaman satu. Arus bahasa lisan, yang dalam bahasa Indonesia umumnya memperoleh "warna lokal", nampaknya tengah mendesak bentuk bahasa Indonesia yang ada untuk ditilik kembali.

Dan pers dengan sendirinya mengalami desakan itu. Seperti sudah dikatakan di atas, pers berperan sebagai perekam. Hasil wawancara atau pengutipan ucapan merupakan bagian penting dalam jurnalisme. Dalam arti itu pers merupakan "penterjemahan" bahasa lisan secara langsung ke dalam wujud huruf, angka, dan tanda baca. Meskipun demikian, kalangan pers Indonesia hingga kini belum bersepakat tentang sejauh mana bahasa pers Indonesia dapat merepresentasikan bahasa lisan yang umumnya memperoleh "warna lokal" itu. Jika *nggak* telah masuk begitu saja ke dalam bahasa pers Indonesia, bagaimana dengan kata *ndak* yang di Jawa tengah lazim dipakai dalam percakapan berbahasa Indonesia? Ataukah semua kata yang dianggap terlalu lokal diganti saja dengan kata yang menurut pak guru di sekolah kita dulu merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Apa pula sebenarnya bahasa Indonesia yang "baik dan benar" sekarang -- khususnya bahasa lisan? Bisakah kita mengganti kata *dong, deh, mah, sih, lho, mbok ya* atau *kok* -- yang terkadang menyiratkan arah makna tersendiri? Dan bagaimana pula kriterium akurat atau tidaknya pengutipan pers dalam menghadapi kata-kata seperti itu?

Di atas telah disebutkan bahwa kalangan pers Indonesia hingga kini belum bersepakat dalam perkara semacam itu. Agaknya ini memperlihatkan juga bagaimana pers Indonesia sekarang umumnya agak lamban dalam merumuskan sikap terhadap masalah-masalah bahasa yang setiap hari dihadapi. Di samping itu, barangkali belum timbul kesadaran bahwa ekspansi yang makin melebar antara bahasa Indonesia lisan dengan bahasa Indonesia tulisan telah menimbulkan persoalan yang cukup serius. Pers kita nampaknya masih beranggapan, bahwa persoalan bahasa bagi pers adalah persoalan bahasa

tulisan semata-mata. Saya kira anggapan itu semakin meleset.

Baru saja disebutkan tentang diskrepansi yang makin melebar antara bahasa Indonesia lisan dan bahasa Indonesia tulisan. Saya tak tahu apakah hal ini pernah diteliti oleh para ahli bahasa. Dalam pengalaman sebagai seseorang yang bekerja di bidang jurnalistik, saya hanya merasakannya benar. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita di buletin *PAB*. Di dalamnya dimuat jawaban seorang pejabat tinggi ABRI atas pertanyaan pers di Jayapura tentang kesan-kesannya mengenai pembangunan Irian Jaya. Yang saya dapatkan di sana ialah kalimat-kalimat yang tak teratur ujung atau akhirnya, dan kacau dalam hubungannya dengan kalimat-kalimat lain. Setelah saya teliti bisa saya simpulkan bahwa berita *PAB* itu sebenarnya suatu rekaman secara verbatim jawaban panjang sang pejabat; wartawannya mungkin takut melakukan pengeditan jawaban itu. Kesimpulan itu saya ambil berdasarkan pengalaman sebelumnya: seorang rekan pernah menyerahkan salinan tertulis dari sebuah percakapan pers dengan seorang menteri. Berkali-kali saya baca tak dapat saya ikhtisarkan apa sebenarnya yang dikatakan sang menteri. Tampaknya rekan yang menyalinnya secara setia dari pita rekaman mengalami kesulitan di mana harus meletakkan titik, koma, kata seru, tanda tanya dan tanda-tanda baca yang lain. Kejelasan yang mungkin ada dalam percakapan lisan itu tak terungkap lagi pada saat ia sudah berbentuk tulisan.

Tentunya disadari bahwa syarat-syarat kejelasan bahasa lisan memang berbeda dari syarat kejelasan bahasa tulisan. Dalam bahasa lisan peran infleksi, perobahan nada suara, dan lagu kalimat sangat menentukan. Dalam komunikasi langsung (baik yang kita hadiri sendiri maupun yang kita lihat dalam pemaparan media audio-visual bahkan kita lihat pentingnya "bahasa" non-verbal — perubahan wajah, gerak tangan, perubahan sikap tubuh — dalam mendukung kejelasan suatu dialog. Proses komunikasi di situ boleh dikatakan total dan simultan. Dalam bahasa tertulis kurang demikian halnya: masalah ejaan, tanda baca, alinea yang membentuk komposisi, bahkan tipografi, sangat penting. Kejelasan lebih banyak merupakan fungsi dari kerapian, keteraturan ejaan, letak serta urutan kata atau tanda baca. Pendeknya, kata menjadi suatu benda dalam ruang.

Perbedaan antara bahasa lisan dengan bahasa tulisan seperti ditunjukkan tadi bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tetapi, pergaulan kita dengan bahasa Indonesia menunjukkan sesuatu yang tak kita dapatkan, misalnya, dalam bahasa Inggris. Ada contoh yang terkenal untuk itu. Transkrip pita yang merekam pembicaraan bekas Presiden Nixon dalam persoalan Watergate tampaknya bisa menjelaskan pembicaraan itu sebagaimana adanya. Bahasa Inggris lisan telah mempunyai patokan-patokan yang pasti, yang bisa jadi pegangan bila hendak disalin dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, seorang

pembaca bahasa Indonesia harus berhati-hati untuk mengartikan, misalnya, kalimat seperti ini: "*Indonesia yang punya Pertamina*". Kalimat itu bisa berarti (a) *Indonesia adalah yang punya Pertamina*, atau juga (b) *Indonesia yang punya adalah Pertamina*. Perbedaan arti yang sedemikian besar itu — bahkan saling berlawanan di dalam bahasa lisan dapat dinyatakan dengan memberikan tekanan dalam mengucapkannya. Seorang wartawan yang harus mengutip kata-kata itu menghadapi persoalan: bagaimana mewujudkan tekanan itu dalam surat kabarnya? Meletakkan kata *adalah* seperti di atas dapat membantu. Hanya harus diingat bahwa kata *adalah* dalam susunan kalimat semacam itu hasil pengaruh bahasa Barat (Inggris: *to be*) merupakan produk bahasa tulisan. Dalam percakapan sehari-hari seorang tidak mengatakan "Buku saya *adalah* yang baru", tapi "Buku saya yang baru" (yang jika dibaca secara lain bisa berarti *my new book*). Diskrepansi antara bahasa lisan dan bahasa tulisan yang seperti itulah yang makin membesar sebagai akibat kebijaksanaan di bidang bahasa Indonesia selama ini. Dalam kebijaksanaan itu, disadari atau tidak, terutama sejak masa pendidikan sekolah, yang diurus hanyalah bahasa Indonesia tulisan.

Seperti dimaklumi, pelajaran berbicara, berpidato, berdebat tidak pernah dilakukan di sekolah-sekolah kita, apalagi dalam kaitannya dengan latihan kecakapan verbal dalam bahasa Indonesia. Bahkan calon-calon hakim, pembela, dan jaksa bukan saja tidak dididik dalam logika, tapi juga tidak pernah disiapkan secara memadai untuk mengutarakan pikiran secara lisan dalam aturan yang logis dan dengan cara persuasif. Barangkali hal ini dipengaruhi juga oleh sistem dan tradisi mahkamah peradilan kita yang tak banyak memberi kesempatan berargumentasi. Barangkali juga akar semua ini ialah tidak kuatnya lingkungan budaya yang menghargai elokuensi. Kebiasaan berbicara dalam adat kita hampir identik dengan kemerduan suara, keindahan kata-kata, dan daya mempesona. Kekuatan daya pikir yang dengan awas menganalisa kurang dipertaruhkan, juga originalitas ucapan yang bebas dari klise-klise.

Kemampuan verbal yang dalam bahasa Inggris disebut *wit* umumnya tak terdapat dalam bahasa Indonesia lisan. Kita jarang menjumpai ucapan kocak, segar, tangkas, dan cerdas dalam pidato-pidato. Untuk menarik hati pendengar, seorang pembicara dalam kelaziman pidato Indonesia harus berapi-api atau menyelipkan lelucon—seringkali yang agak cabul. Pidato di dalam bahasa Indonesia selama ini umumnya kering, tak menarik atau tidak efisien. Khususnya menghadapi tidak efisiennya bahasa lisan Indonesia ini pers Indonesia sering terlibat dalam persoalan yang cukup berat. Dalam kehendak untuk menghemat ruangan, surat kabar harus melakukan sesuatu — misalnya pengeditan atau *rewriting* pada waktu akan memuat sebuah pidato sambutan, percakapan atau perdebatan tanpa teks. Seringkali hasilnya tidak akurat,

bahkan bisa menyimpang. Dalam proses pengeditan atau *rewriting* itu kecenderungan subyektif si wartawan dapat mewarnai hasil rekamannya dalam bentuk tercetak. Di samping itu, masalahnya memang tak sederhana: dalam bahasa Indonesia lisan, totalitas suasana pemakaian bahasa itu sering lebih penting tinimbang kata-kata yang bisa dikutip *ad verbum*. Maka bisa dimengerti bila dalam proses pengadilan Hariman Siregar, misalnya, hakim memanggil pimpinan majalah *Mahasiswa Indonesia* edisi Jawa Barat untuk jadi saksi. Di sini si wartawan ingin didengar keterangannya, sampai sejauh mana laporan yang dimuat mingguan itu dari pidato terdakwa cukup akurat, atau cukup sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, memang perlu diragukan keakuratan rekaman pers tentang sebuah pidato atau percakapan lisan, jika kita menyadari kehidupan bahasa Indonesia lisan sampai sekarang. Bukan atas nama kaum wartawan bila di sini saya ingin menyatakan bahwa masalah "salah kutip" dalam wawancara yang sering terjadi dalam pers Indonesia akhir-akhir ini perlu dilihat juga dari sudut ini dan tak semata-mata karena kekurangkapan, atau kekurangajaran, sang reporter.

Sudah tentu harus diakui: wartawan Indonesia umumnya kini tak terlalu termashur kecakapan jurnalistiknya. Harus diakui bahwa seharusnya ada daya analisa yang kuat dalam berbahasa. Apabila seorang yang diwawancarai menggunakan bahasa yang tak efisien, ia harus bisa menggiringnya agar mempergunakan bahasa lisan yang lebih efisien. Tetapi, untuk itu dibutuhkan sikap kritis yang cukup dalam diri si wartawan apa yang disebut skeptisisme yang sehat. Sayang sekali sikap kritis dan daya analisa dalam berbahasa itu telah makin hilang dan belum timbul lagi di kalangan wartawan Indonesia. Di satu pihak ini disebabkan oleh pendidikan sekolah yang memisahkan pelajaran bahasa Indonesia dari keseluruhan proses belajar, yang berarti peningkatan intelektualitas dan pendidikan watak. Di lain pihak, karena pendidikan di luar sekolah—dalam pekerjaan—tidak selamanya merangsangnya untuk memakai bahasa sebagai alat dialog. Karenanya, bahasa kita sering hadir sebagai alat monolog, yang berisi pernyataan yang berhamburan tanpa disusul pertanyaan-pertanyaan baik karena sang wartawan tidak cakap atau karena ia tak berdaya.

Semua itu menunjukkan bahwa asumsi tentang besarnya peranan pers dalam pertumbuhan bahasa Indonesia perlu ditinjau kembali. Ini barangkali bisa memberi isyarat juga ke arah politik bahasa nasional yang lebih sadar tentang faktor-faktor di luar kehidupan bahasa Indonesia tulisan.

PANITIA PENYELENGGARA

Ketua	:	Amran Halim
Sekretaris	:	Zulkarnain
Anggota	:	S.W. Rudjiati Muljadi Lukman Ali S. Effendi Hans Lapoliwa Djajanto Supraba
Bendahara	:	Hasjmi Dini
Sekretariat	:	E. Asmad Rukijo Rapendi Samino
Notulis	:	Adun Sjubarsa Farid Hadi Lukman Hakim Yayah B. Lumintaintang Mudjanattistomo

DAFTAR PESERTA**A. Jakarta**

1. Ajip Rosidi
2. Anton M. Moeliono
3. A.S. Broto
4. Basjuni Suriamihardja
5. B.H. Hoed
6. B. Soehardi
7. Djoko Kentjono
8. Fuad M. Salim
9. Goenawan Mohamad
10. Harimurti Kridalaksana
11. Harsja W. Bachtiar
12. Imam Sukarsono
13. Koentjaraningrat
14. Muljanto Sumardi
15. S. Effendi
16. S. Takdir Alisjahbana
17. Suprpto
18. Sudijarto
10. Taufiq Ismail

B. Luar Jakarta (Jawa)

1. Andi Hakim Nasution
2. Jazir Burhan
3. Liek Wilardjo
4. Samsuri
5. S. Wojowasito
6. Th. Kundjana
7. Ukun Surjama

C. Luar Jawa

1. Amran Halim
2. Sjahrudin Kaseng
3. Suwardi M.S.
4. Suwedi Montana

